



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1598 TAHUN 2021

TENTANG

KLASIFIKASI ARSIP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi saat ini, Keputusan Gubernur Nomor 352/2004 tentang Klasifikasi dan Tata Cara Penyimpanan Arsip Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Klasifikasi Arsip;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KLASIFIKASI ARSIP.
- KESATU : Menetapkan klasifikasi arsip dengan kode dan jenis Klasifikasi Arsip sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kode dan jenis Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan tanda pengenal urusan sesuai fungsi dan tugas unit kerja, dasar pemberkasan dan penataan arsip, dan acuan bagi unit pengelola dan unit kearsipan pencipta arsip dalam mengelola arsip dinamis, untuk membantu menyusun tata letak identitas arsip yang terdiri dari:
- a. sistem kode klasifikasi berdasarkan urusan primer, sekunder dan tersier;
 - b. susunan kode menggunakan alfanumerik dengan menggabungkan antara alfabetis dan numerik;
 - c. urusan primer dengan kode alfabet berdasarkan dua huruf;
 - d. urusan sekunder berdasarkan numerik berdasarkan dua nomor; dan
 - e. urusan tersier berdasarkan numerik dan menjadi satu kesatuan kode Klasifikasi Arsip.
- KETIGA : Setiap pencipta arsip pada masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah melaksanakan pengelolaan arsip dan penyusunan data arsip yang tercipta dan tersimpan pada unit kerjanya masing-masing dengan berpedoman pada kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 352/2004 tentang Klasifikasi dan Tata Cara Penyimpanan Arsip Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 1598 TAHUN 2021
TENTANG
KLASIFIKASI ARSIP

KODE DAN JENIS KLASIFIKASI ARSIP

I. KA. KEARSIPAN

00 Kebijakan Kearsipan

- 00.00 Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan
Naskah terkait Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan
- 00.01 Perumusan Kebijakan
Naskah terkait Perumusan Kebijakan
- 00.02 Masukan dan Dukungan Kebijakan
Naskah terkait Masukan dan Dukungan Kebijakan
- 00.03 Standarisasi, Kewenangan dan Pedoman
Naskah terkait Standarisasi, Kewenangan dan Pedoman
- 00.04 Penyiapan Kebijakan
Naskah terkait Penyiapan Kebijakan
- 00.05 Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
Naskah terkait Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria

01 Pembinaan Kearsipan

- 01.00 Akreditasi dan Fasilitasi Akreditasi Kearsipan: Lembaga Kearsipan Unit Kearsipan, Lembaga Penyelenggaraan Jasa Kearsipan, dan Diklat Kearsipan
Naskah terkait Proses Akreditasi/Fasilitasi; Berkas Penetapan Akreditasi dan Penghargaan Kearsipan; Database Akreditasi dan Penghargaan
- 01.01 Sertifikasi Arsiparis
Naskah terkait Proses Sertifikasi Arsiparis; Berkas Penetapan Sertifikasi Arsiparis; Database Sertifikasi Arsiparis
- 01.02 Bina Arsiparis
Naskah terkait Pengembangan Profesi Arsiparis; Bimbingan Konsultasi Arsiparis; Penilaian Arsiparis; Pemilihan Arsiparis Teladan; Database Arsiparis
- 01.03 Bimbingan dan Konsultasi
Naskah terkait Penerapan Sistem (Klasifikasi Arsip, Tata Naskah Dinas); Penggunaan Sarana dan Prasarana Kearsipan; Unit Kearsipan; Sumber Daya Manusia
- 01.04 Supervisi dan Evaluasi Kearsipan
Naskah terkait Perencanaan; Pelaksanaan; Laporan Hasil Supervisi dan Evaluasi
- 01.05 Database Bimbingan dan Konsultasi, Supervisi dan Evaluasi
Naskah terkait Database Bimbingan dan Konsultasi, Supervisi dan Evaluasi
- 01.06 Fasilitasi Kearsipan
Naskah terkait Fasilitasi Tenaga Instruktur/Narasumber/Pembimbing/Magang/Praktek; Database Fasilitasi Tenaga Instruktur/Narasumber/Pembimbing; Fasilitasi Prasarana dan Sarana; Data

- Fasilitasi Prasarana dan Sarana Kearsipan; Fasilitasi Perumusan Kebijakan Kearsipan; Database Fasilitasi Perumusan Kebijakan Kearsipan; Fasilitasi Organisasi Profesi Arsiparis; Database Fasilitasi Organisasi Profesi Arsiparis; Pengajuan Permohonan Fasilitasi Yang Ditolak
- 01.07 Bimbingan Teknis dan Pelatihan Kearsipan
Naskah terkait Berkas Pelaksanaan Pelatihan/Bimtek Kearsipan; Laporan Bimtek dan Pelatihan; Database Pelatihan/Bimtek Kearsipan
- 01.08 Pengawasan Kearsipan
Naskah terkait Perencanaan; Pelaksanaan; Laporan Hasil Pengawasan; Database Pengawasan
- 01.09 Lomba-Lomba Kearsipan
Naskah Terkait Penyelenggaraan Lomba; Berkas Penetapan Lomba/Pemenang
- 01.10 Pemasyarakatan Kearsipan
Naskah terkait Berkas Sosialisasi/Diseminasi Kearsipan; Pengembangan Peran Serta Masyarakat; Fasilitasi Peran Serta Masyarakat; Forum Komunitas Kearsipan; Database Pemasyarakatan Kearsipan
- 01.11 Lembaga/Unit Kearsipan Teladan
Naskah terkait Penyelenggaraan; Berkas Penetapan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan
- 01.12 Jadwal Retensi Arsip
Naskah terkait Pengusulan dan Persetujuan/Pertimbangan Jadwal Retensi Arsip; Database Persetujuan/Pertimbangan Jadwal Retensi Arsip
- 02 Pengelolaan Arsip Dinamis
- 02.00 Penciptaan
Naskah terkait Pencatatan; Pendistribusian
- 02.01 Penggunaan
Naskah terkait Pengklasifikasian Pengamanan dan Akses Arsip; Peminjaman
- 02.02 Pemeliharaan
Naskah terkait Pemberkasan; Penataan Arsip Inaktif; Penyimpanan Arsip; Alih Media; Program Arsip Vital
- 02.03 Autentikasi Arsip Dinamis
Naskah terkait Pembuktian Autentisitas; Pendapat Tenaga Ahli; Pengujian; Penetapan Autentisitas Arsip Statis/Surat Pernyataan Pencipta Arsip
- 02.04 Penyusutan
Naskah terkait Pindahan Arsip Inaktif; Pemusnahan Arsip Yang Tidak Bernilai guna; Penyerahan Arsip Inaktif Retensi Diatas 10 Tahun dan Arsip Statis Kelembaga Kearsipan
- 02.05 Database Pengelolaan Arsip Dinamis
Naskah Terkait Database Pengelolaan Arsip Dinamis
- 03 Pengelolaan Arsip Statis
- 03.00 Akuisisi
Naskah terkait Monitoring Fisik dan Daftar; Verifikasi Terhadap Daftar Arsip; Menetapkan Status Arsipstatis; Persetujuan Untuk Penyerahan; Penetapan Arsip Yang Diserahkan; Berita Acara Penyerahan Arsip; Daftar Arsip Yang Diserahkan
- 03.01 Sejarah Lisan
Naskah terkait Administrasi Pelaksanaan Sejarah Lisan; Hasil Wawancara Sejarah Lisan

- 03.02 Daftar Pencarian Arsip Statis
Naskah terkait Pengumuman; Akuisisi Daftar Pencarian Arsip Statis
- 03.03 Penghargaan dan Imbalan
Naskah terkait Penghargaan dan Imbalan
- 03.04 Pengolahan
Naskah terkait Menata Informasi; Menatafisik; Menyusun Sarana Bantu Temubalik
- 03.05 Preservasi
Naskah terkait Preventif; Kuratif; Laporan Hasil Pengujian Mutu Preservasi
- 03.06 Autentikasi Arsip Statis
Naskah terkait Pembuktian Autentisitas; Pendapat Tenaga Ahli; Pengujian; Penetapan Autentisitas Arsip Statis/Surat Pernyataan
- 03.07 Akses Arsip Statis
Naskah terkait Layanan Arsip; Penerbitan Naskah Sumber; Pameran Arsip; Layanan dan Pemanfaatan Arsip
- 03.08 Pengelolaan Simpul Jaringan dalam SIKN melalui JIKN
Naskah terkait Perencanaan menjadi Simpul Jaringan SIKN melalui JIKN, Pendidikan dan Pelatihan Materi Simpul Jaringan SIKN melalui JIKN; Pengelolaan Informasi Arsip Simpul Jaringan SIKN Melalui JIKN
- 03.09 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Digabung dan/atau Dibubarkan, Serta Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan
Naskah terkait Persiapan; Pelaksanaan; Evaluasi dan Pelaporan
- 03.10 Penerbitan Izin Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup Yang Disimpan
Naskah terkait Permohonan Izin Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup Yang Disimpan; Kajian/Telaah Izin Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup Yang Disimpan; Penolakan/Pemberian Izin Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup Yang Disimpan
- 03.11 Jasa Kearsipan
Naskah terkait Konsultasi Kearsipan; Manual Kearsipan; Penataan Arsip; Otomasi Kearsipan; Penyimpanan Arsip; Perawatan dan Pemeliharaan Arsip; Database Jasa Kearsipan

- 04 Kerjasama Kearsipan
 - 04.00 Antar Lembaga
Naskah terkait Antar Lembaga
 - 04.01 Antar Provinsi/Kab/Kota
Naskah terkait Antar Provinsi/Kab/Kota
 - 04.02 Antar Negara
Naskah terkait Antar Negara

- 05 Pemanfaatan Integrasi Jaringan, Informasi, Aplikasi, dan Data Center Kearsipan
 - 05.00 Arsip Digital
Naskah terkait Arsip Digital
 - 05.01 Otentikasi Digital
Naskah terkait Otentikasi Digital
 - 05.02 Jasa Informasi
Naskah terkait Jasa Informasi
 - 05.03 Ruang Simpan Data Digital
Naskah terkait Ruang Simpan Data Digital

II. PP. PERPUSTAKAAN

00 Kebijakan

- 00.00 Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan
Naskah terkait Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan
- 00.01 Perumusan Kebijakan
Naskah terkait Perumusan Kebijakan
- 00.02 Masukan dan Dukungan Kebijakan
Naskah terkait Masukan dan Dukungan Kebijakan
- 00.03 Standarisasi, Kewenangan dan Pedoman
Naskah terkait Standarisasi, Kewenangan dan Pedoman
- 00.04 Penyiapan Kebijakan
Naskah terkait Penyiapan Kebijakan
- 00.05 Penetapan dalam bentuk NSPK Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria meliputi Kajian Kebutuhan Bahan Perpustakaan, Kajian Pengolahan Bahan Perpustakaan, Pedoman Pengolahan, Pembakuan Perpustakaan, Kajian Kepuasan Pemustaka
Naskah terkait Penetapan dalam bentuk NSPK Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria meliputi Kajian Kebutuhan Bahan Perpustakaan, Kajian Pengolahan Bahan Perpustakaan, Pedoman Pengolahan, Pembakuan Perpustakaan, Kajian Kepuasan Pemustaka

01 Deposit Bahan Pustaka

- 01.00 Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
Naskah terkait Penerimaan; Pengumpulan; Pengelolaan
- 01.01 Pembuatan Direktori Penerbit dan Pengusaha Rekaman
Naskah terkait Pembuatan Direktori Penerbit dan Pengusaha Rekaman
- 01.02 Pengkordinasian Serah Simpan Karya Cetak/Karya Rekam
Naskah terkait Pengkordinasian Serah Simpan Karya Cetak/Karya Rekam
- 01.03 Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
Naskah terkait Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
- 01.04 Implementasi Undang-Undang KCKR
Naskah terkait Implementasi Undang-Undang KCKR
- 01.05 Penyusunan Bibliografi Daerah, Katalog Induk Daerah
Naskah terkait Penyusunan Bibliografi Daerah, Katalog Induk Daerah
- 01.06 Bibliografi dan Katalog
Naskah terkait Bibliografi Nasional Indonesia (BNI); Bibliografi Daerah (BD); Katalog Induk Nasional (KIN); Katalog Induk Daerah (KID); Katalog Dalam Terbitan (KDT)
- 01.07 Pendaftaran Nomor International Standard Book Number (ISBN)
Naskah terkait Pendaftaran Nomor International Standard Book Number (ISBN)
- 01.08 Pendaftaran Nomor International Standard Music Number (ISMN)
Naskah terkait Pendaftaran Nomor International Standard Music Number (ISMN)

02 Pengembangan Koleksi

- 02.00 Akuisisi
Naskah terkait Pembelian; Konvensional; Digital; Hibah; Hadiah; Tukar Menukar; Terbitan Internal; Pendistribusian Bahan Pustaka Surplus
- 02.01 Seleksi Bahan Perpustakaan
Naskah terkait Seleksi Bahan Perpustakaan
- 02.02 Pengolahan Bahan Pustaka
Naskah terkait Pengolahan Bahan Pustaka

- 02.03 Transliterasi (Alihaksara), Translasi (Terjemahan) Bahan Pustaka
Naskah terkait Transliterasi (Alihaksara), Translasi (Terjemahan) Bahan Pustaka
- 02.04 Penyusunan Literatur Skunder
Naskah terkait Penyusunan Literature Skunder
- 02.05 Pangkalan Data Katalog Koleksi
Naskah terkait Pangkalan Data Katalog Koleksi

- 03 Jasa Perpustakaan dan Informasi
 - 03.00 Layanan Keanggotaan
Naskah terkait Layanan Keanggotaan
 - 03.01 Layanan Sirkulasi
Naskah terkait Layanan Sirkulasi
 - 03.02 Layanan Pinjam Antar Perpustakaan
Naskah terkait Layanan Pinjam Antar Perpustakaan
 - 03.03 Layanan Perpustakaan Keliling
Naskah terkait Layanan Perpustakaan Keliling
 - 03.04 Layanan Pinjam Paket Buku
Naskah terkait Layanan Pinjam Paket Buku
 - 03.05 Penyusunan Statistik Perpustakaan
Naskah terkait Penyusunan Statistik Perpustakaan
 - 03.06 Promosi Perpustakaan
Naskah terkait Promosi Perpustakaan
 - 03.07 Survey Kebutuhan Pemustaka
Naskah terkait Survey Kebutuhan Pemustaka
 - 03.08 Kajian Kepuasan Pemustaka
Naskah terkait Kajian Kepuasan Pemustaka
 - 03.09 Stock Opname dan Penyiangan Bahan Pustaka
Naskah terkait Stock Opname dan Penyiangan Bahan Pustaka
 - 03.10 Layanan Bimbingan Pemustaka
Naskah terkait Layanan Bimbingan Pemustaka
 - 03.11 Layanan Bagi Pemustaka Berkebutuhan Khusus
Naskah terkait Layanan Bagi Pemustaka Berkebutuhan Khusus
 - 03.12 Kemasulang Informasi
Naskah terkait Kemasulang Informasi
 - 03.13 Kerjasama Perpustakaan
Naskah terkait MoU; Perjanjian Kerjasama; Partisipasi Organisasi Profesi dan Kerjasama Internasional
 - 03.14 Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan
Naskah terkait Pengembangan Situs Web; Pengembangan Kemasulang Informasi Multimedia; Pengembangan Program Aplikasi Perpustakaan; Pengembangan Pangkalan Data Kepustakaan Digital
 - 03.15 Pangkalan Data Layanan Perpustakaan
Naskah terkait Pangkalan Data Layanan Perpustakaan

- 04 Pemanfaatan Integrasi Jaringan Informasi, Aplikasi, dan Data Center Perpustakaan
 - 04.00 Jejaring Katalog
Naskah terkait Jejaring Katalog
 - 04.01 Jejaring Bibliografi
Naskah terkait Jejaring Bibliografi
 - 04.02 Aplikasi Kepustakaan Digital
Naskah terkait Aplikasi Kepustakaan Digital
 - 04.03 Pangkalan Data Kepustakaan Digital
Naskah terkait Pangkalan Data Kepustakaan Digital

05 Preservasi Bahan Pustaka

05.00 Konservasi

Naskah terkait Perawatan Bahan Perpustakaan; Fumigasi Bahan Perpustakaan; Perbaikan Bahan Perpustakaan; Penjilidan Bahan Perpustakaan

05.01 Reprografi (Mikro Film, Reproduksi Foto)

Naskah terkait Reprografi (Mikro Film, Reproduksi Foto)

05.02 Transformasi Digital

Naskah terkait Transformasi Digital

05.03 Kurasi Digital

Naskah terkait Kurasi Digital

06 Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca

06.00 Pengembangan Perpustakaan

Naskah terkait Perpustakaan Umum; Perpustakaan Masyarakat (Tbm, Pojok Baca, dan Bentuk Lainnya); Perpustakaan Khusus; Perpustakaan Sekolah; Perpustakaan Perguruan Tinggi

06.01 Evaluasi Pengembangan Perpustakaan

Naskah terkait Supervisi; Sistensi; Monitoring

06.02 Akreditasi Perpustakaan

Naskah terkait Permohonan Akreditasi; Pelaksanaan Akreditasi; Data Perpustakaan Hasil Akreditasi

06.03 Pangkalan Data Perpustakaan

Naskah terkait Nomor Pokok Perpustakaan; Perpustakaan Berbasis Wilayah

06.04 Pemasarakatan Minat Baca

Naskah terkait Indeks Kegemaran Membaca; Sosialisasi, Promosi, dan Publikasi; Kerjasama dengan Komunitas, Masyarakat, dan Swasta

06.05 Organisasi Perpustakaan

Naskah terkait Forum Perpustakaan Umum; Forum Perpustakaan Masyarakat; Forum Perpustakaan Khusus; Forum Perpustakaan Sekolah; Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi; Gerakan Pemasarakatan Minat Baca; Organisasi Perpustakaan dan Lainnya

06.06 Pengembangan Tenaga Perpustakaan

Naskah terkait Pendidikan dan Pelatihan; Seminar, Workshop/ Penyuluhan tentang Kepustakawanan; Bimbingan Teknis Kepustakawanan; Sertifikasi Tenaga Perpustakaan; Pembinaan Tenaga Perpustakaan; Penyusunan Jurnal, Artikel, Tulisan Ilmiah/Populer; Penilaian Jabatan Fungsional Pustakawan; Evaluasi Tenaga Perpustakaan; Pangkalan Data Tenaga Perpustakaan; Pangkalan Data Tim Penilai Pustakawan

III. KI. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

00 Kebijakan

00.00 Kebijakan Komunikasi dan Informatika

Naskah terkait Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan; Penyiapan Bahan; Perumus Kebijakan; Pemberian Masukan dan Dukungan dalam Penyusunan Kebijakan; Penetapan dalam bentuk NSPK

00.01 Standardisasi Perangkat Komunikasi dan Informatika

Naskah terkait Teknik Komunikasi dan Informatika; Penerapan Standar Komunikasi dan Informatika; Kualitas Pelayanan dan Harmonisasi Standar; Standar dan Audit Perangkat Lunak

01 Informatika

01.00 e-Government

Naskah terkait Tata Kelola e-Government; Teknologi dan Infrastruktur e-Government; Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Government; Aplikasi Layanan Kepemerintahan Daerah; Aplikasi Layanan Publik

01.01 e- Business

Naskah terkait Tata Kelola e-Busniess; Teknologi dan Infrastruktur e-Busniess; Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Busniess; Aplikasi Layanan e-Busniess

02 Informasi dan Komunikasi Publik

02.00 Komunikasi Publik

Naskah terkait Tata Kelola Komunikasi Publik; Pengelolaan Opini Publik; Pengelolaan Aspirasi Publik; Layanan Komunikasi Publik

02.01 Pengolahan dan Penyediaan Informasi

Naskah terkait Informasi Politik, Hukum, dan Keamanan; Informasi Perekonomian; Informasi Kesejahteraan Rakyat

02.02 Pengelolaan Media Publik

Naskah terkait Media Cetak; Media Online; Media Luar Ruang dan Audio Visual

02.03 Kemitraan Komunikasi

Naskah terkait Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara; Kemitraan Media dan Dunia Usaha; Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi

02.04 Layanan Informasi Internasional

Naskah terkait Layanan Informasi Media Asing; Layanan Informasi Perwakilan Negara Asing dan Lembaga Internasional; Layanan Informasi Masyarakat Luar Negeri

03 Pusat Data dan Sarana Informatika

03.00 Pusat Data

Naskah terkait Fasilitasi Pusat Data; Pengelolaan Perangkat Pusat Data; Operasi Pusat Data

03.01 Infrastruktur Informatika

Naskah terkait Jaringan; Piranti Teknologi Informatika; Keamanan Informatika

03.02 Telekomunikasi Intra Pemerintah

Naskah terkait Penyediaan Sistem Telekomunikasi Intra Pemerintah Daerah; Pemeliharaan Sistem Telekomunikasi Intra Pemerintah Daerah; Penataan Sistem Telekomunikasi Intra Pemerintah Daerah

03.03 Sistem dan Data

Naskah terkait Portal dan Konten; Pengumpulan dan Pengolahan Data; Pengembangan Aplikasi

03.04 Pusat Kerjasama Internasional

Naskah terkait Kerja Sama Regional

03.05 Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat

Naskah terkait Pelayanan Informasi; Hubungan Masyarakat; Bimbingan Teknis

IV. PU. PEMERINTAHAN UMUM

00 Kebijakan

- 00.00 Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan
Naskah terkait Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan
- 00.01 Penyiapan Kebijakan
Naskah terkait Penyiapan Kebijakan
- 00.02 Perumusan Kebijakan
Naskah terkait Perumusan Kebijakan
- 00.03 Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)
Naskah terkait Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)
- 00.04 MOU
Naskah terkait MoU

01 Dekonsentrasi dan Kerjasama

- 01.00 Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
Naskah terkait Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
- 01.01 Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah
Naskah terkait Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah
- 01.02 Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah
Naskah terkait Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah
- 01.03 Fasilitasi Kecamatan
Naskah terkait Fasilitasi, Database pembentukan kecamatan, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi,
- 01.04 Fasilitasi Pelayanan Umum
Naskah terkait Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kecamatan, Koordinasi Pelayanan Administrasi Kecamatan, Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan Administrasi Kecamatan, Monitoring dan Evaluasi

02 Wilayah Administrasi dan Perbatasan

- 02.00 Toponimi dan Data Wilayah
Naskah terkait Toponimi dan Data Wilayah
- 02.01 Pengembangan dan Penataan Batas Antar Negara
Naskah terkait Pengembangan dan Penataan Batas Antar Negara
- 02.02 Batas Antar Daerah Wilayah
Naskah terkait Penataan Batas Wilayah Antar Kecamatan, Batas Wilayah Antar Kelurahan Satu Kecamatan, dan Batas Wilayah Antar Kelurahan Antar Kecamatan; Pemeliharaan Batas Wilayah

03 Kawasan dan Pertanahan

- 03.00 Kawasan Sumber Daya Alam
Naskah terkait Kawasan Sumber Daya Alam
- 03.01 Kawasan Sumber Daya Buatan
Naskah terkait Kawasan Sumber Daya Buatan
- 03.02 Kawasan Ekonomi, Industri, dan Perdagangan Bebas
Naskah terkait Kawasan Ekonomi, Industri, dan Perdagangan Bebas
- 03.03 Pertanahan dan Kawasan Khusus
Naskah terkait Pertanahan dan Kawasan Khusus; Fasilitasi Progam PRONA dan PRODA serta Fasilitasi Progam PTSL

- 03.04 Kawasan Perairan, Kelautan dan Kedirgantaraan
Naskah terkait Kawasan Perairan, Kelautan dan Kedirgantaraan
- 04 Fasilitasi, Bimbingan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 - 04.00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah
Naskah terkait Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah
 - 04.01 Penyusunan Standar Pelayanan Minimal
Naskah terkait Penyusunan Standar Pelayanan Minimal
- 05 Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Penataan Daerah, Pembinaan Daerah Pemekaran, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
- 06 Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga
 - 06.00 Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah
Naskah terkait Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah
 - 06.01 Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
Naskah terkait Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
 - 06.02 Penyiapan Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Kapasitas Kepala Daerah dan DPRD di bidang Pemerintahan
Naskah terkait Penyiapan Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Kapasitas Kepala Daerah dan DPRD di bidang Pemerintahan
 - 06.03 Hubungan Antar Lembaga Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD)
Naskah terkait Hubungan Antar Lembaga Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD)
 - 06.04 Asosiasi Daerah
Naskah terkait Asosiasi Daerah
- 07 Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah
 - 07.00 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Naskah terkait Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - 07.01 Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah
Naskah terkait Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah
 - 07.02 Pengembangan Kapasitas Daerah
Naskah terkait Pengembangan Kapasitas Daerah
- 08 Perencanaan Pembangunan Daerah/Per Wilayah
Naskah terkait Perencanaan Pembangunan Daerah/Per Wilayah
- 09 Pengembangan Wilayah
 - 09.00 Penyusunan Pedoman Penyerasian Pengembangan Wilayah
Naskah terkait Penyusunan Pedoman Penyerasian Pengembangan Wilayah
 - 09.01 Penyusunan dan Pemutahiran Basis Data dan Informasi Pengembangan Wilayah
Naskah terkait Penyusunan dan Pemutahiran Basis Data dan Informasi Pengembangan Wilayah
 - 09.02 Penyusunan dan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Wilayah
Naskah terkait Penyusunan dan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Wilayah
 - 09.03 Kawasan Strategis dan Andalan
Naskah terkait Kawasan Strategis dan Andalan

- 09.04 Wilayah Tertinggal
Naskah terkait Wilayah Tertinggal
- 09.05 Wilayah Pesisir Laut dan Pulau-Pulau Kecil
Naskah terkait Wilayah Pesisir Laut dan Pulau-Pulau Kecil

- 10 Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup
 - 10.00 Penataan Ruang Wilayah
Naskah terkait Penataan Ruang Wilayah
 - 10.01 Penataan Ruang Kawasan
Naskah terkait Penataan Ruang Kawasan
 - 10.02 Konservasi dan Rehabilitasi
Naskah terkait Konservasi dan Rehabilitasi
 - 10.03 Perencanaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Air
Naskah terkait Perencanaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Air
 - 10.04 Pengendalian Lingkungan Hidup
Naskah terkait Pengendalian Lingkungan Hidup

- 11 Pengembangan Ekonomi Daerah
 - 11.00 Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah
Naskah terkait Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah
 - 11.01 Promosi dan Investasi Daerah
Naskah terkait Promosi dan Investasi Daerah
 - 11.02 Sarana dan Prasarana Perekonomian daerah
Naskah terkait Sarana dan Prasarana Perekonomian Daerah
 - 11.03 Kemitraan Usaha
Naskah terkait Kemitraan Usaha
 - 11.04 Kelembagaan Ekonomi Daerah
Naskah terkait Kelembagaan Ekonomi Daerah

- 12 Penataan Perkotaan
 - 12.00 Perencanaan Pengendalian Perkotaan
Naskah terkait Perencanaan Pengendalian Perkotaan
 - 12.01 Penataan Kota Besar dan Metropolitan, Kota Menengah, dan Kota Kecil
Naskah terkait Penataan Kota Besar dan Metropolitan, Kota Menengah, dan Kota Kecil
 - 12.02 Kerjasama Perkotaan
Naskah terkait Kerjasama Perkotaan

- 13 Kesatuan Bangsa dan Politik
 - 13.00 Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
Naskah terkait Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
 - 13.01 Kewaspadaan Nasional
Naskah terkait Kewaspadaan Nasional
 - 13.02 Ketahanan Seni, Budaya, Adat, Agama, dan Kemasyarakatan
Naskah terkait Ketahanan Seni, Budaya, Adat, Agama, dan Kemasyarakatan
 - 13.03 Politik dalam Negeri
Naskah terkait Politik dalam Negeri
 - 13.04 Ketahanan Ekonomi
Naskah terkait Ketahanan Ekonomi

V. AT. KEAMANAN DAN KETERTIBAN

- 00 Kebijakan Profesi dan Pengamanan, Hukum, Hubungan Masyarakat, Hubungan Internasional, Teknologi Informasi, Intelijen Keamanan, Pemeliharaan Keamanan
 - 00.00 Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan
Naskah terkait Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan
 - 00.01 Penyiapan Kebijakan
Naskah terkait Penyiapan Kebijakan
 - 00.02 Perumusan Kebijakan
Naskah terkait Perumusan Kebijakan
 - 00.03 Norma Standar Prosedur Kriteria
Naskah terkait Norma Standar Prosedur Kriteria
 - 00.04 MoU
Naskah terkait MoU

- 01 Profesi dan Pengamanan
 - 01.00 Pengamanan Internal
Naskah terkait Pembinaan Pengamanan; Penelitian Personel; Produksi Dokumentasi
 - 01.01 Provos
Naskah terkait Penegakan, Ketertiban dan Disiplin; Penegakan Hukum; Pengamanan dan Pengawasan
 - 01.02 Pertanggungjawaban Profesi
Naskah terkait Standarisasi; Pembinaan Etika; Penegakan Etika

- 02 Hukum
 - 02.00 Penyusunan dan Penyuluhan Hukum
Naskah terkait Undang-Undang; Peraturan Kapolri; Peraturan Kasatker/Kasatfung
 - 02.01 Kerjasama Antar Lembaga
Naskah terkait Kerjasama Antar Lembaga Negara; Kerjasama Antar Lembaga Pemerintah; Kerjasama Antar Lembaga/Non Lembaga
 - 02.02 Penyuluhan Hukum
Naskah terkait Penyuluhan Internal; Penyuluhan HAM; Penyuluhan Masyarakat
 - 02.03 Bantuan Penasehat Hukum
Naskah terkait Penerapan Hukum; Bantuan Penasihat Hukum

- 03 Hubungan Masyarakat
 - 03.00 Penerangan Masyarakat
Naskah terkait Kemitraan; Penerangan Umum; Penerangan Satuan
 - 03.01 Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
Naskah terkait Produksi dan Dokumentasi; Pelayanan Informasi dan Dokumentasi; Analisis dan Evaluasi

- 04 Pemeliharaan Keamanan
 - 04.00 Pembinaan Masyarakat
Naskah terkait Pembinaan Penertiban Masyarakat; Pembinaan Keamanan Swakarsa; Pembinaan Perpolisian Masyarakat; Pembinaan Polisi Khusus
 - 04.01 Samapta Bhayangkara
Naskah terkait Tugas Umum; Pemeliharaan Ketertiban Umum; Pengendalian Masyarakat; Patroli dan Pengawasan

- 04.02 Pengamanan Obyek Vital
Naskah terkait Pengamanan VVIP/VIP; Pengamanan Pariwisata; Pengamanan Obyek Vital Nasional/Obyek Vital; Audit Sistem Pengamanan Obyek Vital Nasional
- 04.03 Kepolisian Udara
Naskah terkait Transportasi Udara; Operasi Udara; Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan
- 04.04 Kepolisian Perairan
Naskah terkait Operasional dan Pengendalian Operasi; Penegakan Hukum; Fasilitas Pemeliharaan Kapal dan Perbaikan;
- 04.05 Kepolisian Satwa
Naskah terkait Pemeliharaan Veteriner; Pelacakan dan Penangkalan

- 05 Hubungan Internasional
- 05.00 Sekretariat National Central Bureu (NBC) Internasional
Naskah terkait Kejahatan Internasional; Komunikasi Internasional; Konvensi Internasional; Liaison Officer dan Perbatasan
- 05.01 Biro Misi Internasional
Naskah terkait Perdamaian dan Kemanusiaan; Pengembangan Kapasitas

- 06 Lalu Lintas
- 06.00 Keamanan dan Keselamatan
Naskah terkait Kebijakan dan Strategi; Kerjasama; Audit
- 06.01 Operasi
Naskah terkait Operasi dan Latihan; Rencana Operasi; Tahanan dan Barang Bukti
- 06.02 Pendidikan Masyarakat
Naskah terkait Kemitraan Masyarakat; Pendidikan dan Penerangan; Kliping
- 06.03 Penegakan Hukum (Gakkum)
Naskah terkait Penyelidikan dan Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas; Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas; Tata Tertib
- 06.04 Registrasi dan Identifikasi
Naskah terkait Pengemudi; Kendaraan Bermotor; Materiil SIM, BPKB, STNK dan TNKB
- 06.05 Manajemen Operasional dan Rekayasa (Jemenopsrek)
Naskah terkait Identifikasi Data; Pengkajian dan Rekayasa; Operasional dan Rekayasa
- 06.06 Teknologi Informasi dan Komunikasi
Naskah terkait Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian; Pengembangan Sistem dan Teknologi; Sistem Informasi
- 06.07 Pengawasan dan Patroli Jalan Raya
Naskah terkait Pengawasan dan Patroli

- 07 Penanggulangan Kejahatan Terorisme (Densus 88AT)
- 07.00 Intelijen
Naskah terkait Analisis Terhadap Lapangan dan Penilaian Informasi; Analisis Terhadap Aktivitas dan Pergerakan Pelaku Tindak Pidana Terorisme; Surveillance; Direction Finder; Deteksi; Konta Intel
- 07.01 Investigasi
Naskah terkait Pemeriksaan; Pendanaan Terror; Nuklir, Biologi, Kimia, dan Radiologi
- 07.02 Pencegahan
Naskah terkait Pembinaan dan Penyuluhan; Deradikalisasi; Deedukasi

- 07.03 Penindakan
Naskah terkait *Striking Force*
- 07.04 Bantuan Operasional
Naskah terkait Dukungan Teknis; Pelatihan; Pusedabom
- 07.05 Tugas Wilayah
Naskah terkait Analisis dan Operasional
- 07.06 Operasional
Naskah terkait Penggunaan Manajemen Operasional; Pengkajian dan Analisis Kasus-Kasus Tindak Pidana Terorisme; Renops Kontinjensi Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme; Wasdal Penanganan Kasus Tindak Pidana Terorisme; Data-Data Kegiatan Operasional; Pengembangan Sistem Dan Metode Lidik Sidik; Harwat Tahanan Dan Barang Bukti

- 08 Intelijen Keamanan
 - 08.00 Persandian
Naskah terkait Umum; Operasional; Peralatan
 - 08.01 Intelijen dan Teknologi
Naskah terkait Informasi dan Teknologi; Bantuan Teknologi; Alat Khusus Intelijen
 - 08.02 Pelayanan Masyarakat
Naskah terkait Kegiatan Masyarakat; Orang Asing; Senjata dan Bahan Peledak
 - 08.03 Kerjasama
Naskah terkait Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri

- 09 Brigade Mobil
 - 09.00 Reserse Intel Mobile
Naskah terkait Reserse Intel Mobile
 - 09.01 Penjinakan Bom
Naskah terkait Penjinakan Bom
 - 09.02 Lawan Teror
Naskah terkait Lawan Teror
 - 09.03 Anti Anarki
Naskah terkait Anti Anarki
 - 09.04 Kimia, Biologi dan Radioaktif
Naskah terkait Kimia, Biologi dan Radioaktif

- 10 Teknologi Informasi
 - 10.00 Teknologi Komunikasi
Naskah terkait Pengkajian Sistem Komunikasi; Operasional Komunikasi; Materiil Komunikasi; Kontrak/Surat Perjanjian Jual Beli
 - 10.01 Teknologi Informasi
Naskah terkait Pengkajian System; Situs Kepolisian; Dukungan Teknis

- 11 Tata Operasional dan Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja
 - 11.00 Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tata Operasional Polisi Pamong Praja
Naskah terkait Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tata Operasional Polisi Pamong Praja
 - 11.01 Standardisasi Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja
Naskah terkait Standardisasi Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja

12 Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja

12.00 Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Polisi Pamong Praja

Naskah terkait Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Polisi Pamong Praja

12.01 Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Pengembangan dan Evaluasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Polisi Pamong Praja

Naskah terkait Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Pengembangan dan Evaluasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Polisi Pamong Praja

13 Perlindungan Masyarakat

13.00 Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perlindungan Masyarakat

Naskah terkait Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perlindungan Masyarakat

13.01 Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Aparatur dan Kelembagaan Perlindungan Masyarakat

Naskah terkait Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Aparatur dan Kelembagaan Perlindungan Masyarakat

13.02 Fasilitasi, Koordinasi, Pendataan dan Pembinaan Anggota Linmas

Naskah terkait Fasilitasi, Koordinasi, Pendataan dan Pembinaan Anggota Linmas

13.01 Fasilitasi Penegakan Perda

Naskah terkait Fasilitasi Penegakan Perda

14 Penyidik Pegawai Negeri Sipil

14.00 Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Naskah terkait Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil

14.01 Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Pembinaan dan Evaluasi Administrasi Aparatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Naskah terkait Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Pembinaan dan Evaluasi Administrasi Aparatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil

15 Perlindungan Hak-hak Sipil dan Hak Asasi Manusia

15.00 Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Supervisi Hak Asasi Manusia

Naskah terkait Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Supervisi Hak Asasi Manusia

15.01 Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Konvensi Internasional

Naskah terkait Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Konvensi Internasional

VI. BM. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN

00 Pemerintahan Kelurahan/Desa

00.00 Fasilitasi Pengembangan Kelurahan

Naskah terkait Pelaksanaan Pengembangan Kelurahan

00.01 Administrasi Pemerintahan Kelurahan

Naskah terkait Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan

00.02 Fasilitasi Permusyawaratan Kelurahan

Naskah terkait Pelaksanaan Penataan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Kelurahan; Pelaksanaan Penataan Kewenangan Badan Permusyawaratan Kelurahan

00.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset

Naskah terkait Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kelurahan; Pelaksanaan Pengelolaan Asset Kelurahan

00.04 Pengembangan Kapasitas

Naskah terkait Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan/Desa; Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Badan Permusyawaratan Kelurahan dan Masyarakat

01 Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat

01.00 Lembaga Masyarakat

Naskah terkait Pembinaan Penataan Lembaga Masyarakat di Kelurahan; Pelaksanaan Kerjasama Lembaga Masyarakat

01.01 Pembangunan Partisipatif

Naskah terkait Pelaksanaan Pengembangan Metode Pembangunan Partisipatif; Pelaporan Kinerja Pembangunan Kelurahan

01.02 Pendataan Potensi Masyarakat

Naskah terkait Inventarisasi Potensi Masyarakat; Evaluasi Perkembangan Masyarakat

01.03 Pengembangan Kawasan Kelurahan

Naskah terkait Pelaksanaan Identifikasi dan Analisa Penataan Ruang Kawasan Kelurahan; Pelaksanaan Penataan Pengembangan Terpadu Kawasan Kelurahan

01.04 Pelatihan Masyarakat

Naskah terkait Pelaksanaan Penyusunan Dan Pengembangan Kurikulum Pelatihan Masyarakat

02 Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat

02.00 Budaya Nusantara

Naskah terkait Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat; Pelaksanaan Kerjasama Adat Istiadat

02.01 Pemberdayaan Perempuan

Naskah terkait Pelaksanaan Peningkatan Pemberdayaan Perempuan; Pembinaan, Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Ketidaksetaraan Gender

02.02 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

Naskah terkait Pelaksanaan Pemberdayaan Keluarga; Pembinaan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga

02.03 Kesejahteraan Sosial

Naskah terkait Pelaksanaan Peningkatan Kesejahteraan Sosial; Pelaksanaan Penanganan Masalah Sosial

02.04 Tenaga Kerja Kelurahan

Naskah terkait Fasilitasi dan Evaluasi Pembinaan dan Pembinaan Tenaga Kerja; Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Perlindungan Tenaga Kerja

03 Usaha Ekonomi Masyarakat

03.00 Usaha Pertanian dan Pangan

Naskah terkait Pembinaan dan Pengembangan Usaha Pertanian, Agri Bisnis dan Lumbung Pangan

03.01 Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam

Naskah terkait Pelaksanaan Peningkatan Kerjasama dan Permodalan Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam; Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam

03.02 Produksi dan Pemasaran

Naskah terkait Pelaksanaan Pengembangan Informasi Pasar; Pelaksanaan Diversifikasi Kelurahan

03.03 Usaha Ekonomi dan Keluarga

Naskah terkait Pelaksanaan Peningkatan Kewirausahaan dan Perkoperasian; Pelaksanaan Pengembangan Usaha Jasa dan Industry Kecil

03.04 Ekonomi Kelurahan dan Masyarakat Tertinggal

Naskah terkait Ekonomi Kelurahan; Masyarakat Tertinggal

04 Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna Kelurahan

04.00 Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Kelurahan

Naskah terkait Pembinaan Pengelolaan Konservasi Kawasan; Pelaksanaan Rehabilitasi Lingkungan

04.01 Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Kelurahan

Naskah terkait Pelaksanaan Pengembangan dan Pendayagunaan Sumber Daya Lahan Kelurahan; Pelaksanaan Pengembangan dan Pendayagunaan Sumber Daya Pesisir Kelurahan

04.02 Fasilitasi Prasarana dan Sarana Kelurahan

Naskah terkait Pembinaan Pengelolaan Prasarana Air dan Sanitasi Lingkungan; Pembinaan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Pemukiman

04.03 Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Kelurahan

Naskah terkait Pelaksanaan Pemetaan Kebutuhan Teknologi Kelurahan; Pelaksanaan Pengkajian Pemanfaatan Teknologi Kelurahan

04.04 Pemasarakatan dan Kerjasama Teknologi Kelurahan

Naskah terkait Pelaksanaan Pemasarakatan Teknologi Kelurahan; Pelaksanaan Kerjasama Pengelolaan Teknologi Kelurahan

VII. PC. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

00 Pendaftaran Penduduk

00.00 Kebijakan Pendaftaran Penduduk

Naskah terkait Pengusulan, Penyiapan, Pengkajian, Perumusan dan Penetapan Kebijakan di bidang Pendaftaran Penduduk meliputi Identitas Penduduk, Pindah Datang/Mutasi Penduduk, Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan, Pembatalan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan Lainnya serta Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi Pendaftaran Penduduk; Penyusunan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang Pendaftaran Penduduk meliputi Identitas Penduduk, Pindah Datang/Mutasi Penduduk, Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan, Pembatalan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan Lainnya serta Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi Pendaftaran Penduduk

00.01 Identitas Penduduk

Naskah terkait Dokumen Pengajuan Layanan Identitas Penduduk berupa: Dokumen Perjalanan/Paspor, Visa Kunjungan, Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS), Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), Kutipan Akta Pencatatan Sipil, Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), Izin Kerja Tenaga Asing/Notifikasi/NIB, Surat Keterangan Pindah dari Perwakilan RI, Kartu Golongan Darah, Surat Pernyataan Belum Memiliki Surat Keterangan Biodata Penduduk/NIK, Surat Pernyataan Jaminan Tempat Tinggal, Surat Pernyataan Tidak Memiliki Dokumen Kependudukan, Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan dan Dokumentasi Bukti Verifikasi Lapangan (Foto Verifikasi dan Surat Pengantar RT/RW); Dokumen Hasil Layanan Identitas Penduduk Berupa: Biodata Penduduk, Surat Pemberitahuan Nomor Identitas Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El), Kartu Identitas Anak (KIA) dan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT); Data Kepemilikan Identitas Penduduk (KK, KTP-El, KIA dan SKTT); Laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pendaftaran Identitas Penduduk

00.02 Pindah Datang/Mutasi Penduduk

Naskah terkait Dokumen Pengajuan Layanan Pindah Datang/Mutasi Penduduk berupa: Dokumen Perjalanan/Paspor, Visa Kunjungan, Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS), Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT), Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El), Lembar Catatan Mutasi Orang Asing dari Ditjen Imigrasi, Kartu Seleksi Calon Transmigran, Surat Pernyataan Pindah Keluar Wilayah NKRI dan Surat Pemberitahuan Pemberangkatan Transmigran; Dokumen Hasil Layanan Pindah Datang/Mutasi Penduduk berupa: Surat Keterangan Pindah (SKP) bagi WNI dan Orang Asing Pemilik KITAS/KITAP, Surat Keterangan Pindah Luar Negeri (SKPLN) bagi WNI dan Orang Asing Pemilik KITAS/KITAP dan Surat Keterangan Datang (SKD) bagi WNI dan Orang Asing Pemilik KITAS/KITAP; Laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pendaftaran Pindah Datang/Mutasi Penduduk

00.03 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan

Naskah terkait Dokumen Pengajuan Layanan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan berupa: KK Daerah Asal, KTP-El Daerah Asal, Hasil Pendataan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial oleh Petugas dan Hasil Pendataan Orang Terlantar oleh Dinas Sosial; Dokumen Hasil Layanan Pendataan Penduduk Non Permanen dan

Rentan berupa: Surat Tanda Pendataan Penduduk Non Permanen (STP PNP), Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) dan Kartu Identitas Anak (KIA); Data Kepemilikan Identitas Penduduk Non Permanen dan Rentan (KK, KTP-El, KIA dan STP PNP); Laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan

00.04 Pembatalan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Lainnya

Naskah terkait Dokumen Pengajuan Layanan Pembatalan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Lainnya berupa: Salinan Penetapan Keputusan Pengadilan Tentang Pembatalan Dokumen Pendaftaran Penduduk, KK, KTP-El, KIA, Surat Keterangan Kependudukan, Surat Permohonan Instansi/Lembaga/Badan Hukum/Pribadi yang bersangkutan atau kuasanya dan Surat Pernyataan Melindungi Kerahasiaan dan Tidak Menyalahgunakan Data; Dokumen Hasil Layanan Pembatalan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Lainnya berupa: Surat Keterangan Pembatalan Dokumen Pendaftaran Penduduk, Dokumen Pendaftaran Penduduk (KK/KTP-El/KIA) Baru dan Surat Konfirmasi Keabsahan Dokumen Pendaftaran Penduduk; Laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan

00.05 Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi Pendaftaran Penduduk

Naskah terkait Program Kerja Pendaftaran Penduduk; Laporan Kinerja Pendaftaran Penduduk

01 Pencatatan Sipil

01.00 Kebijakan Pencatatan Sipil

Naskah terkait Pengusulan, Penyiapan, Pengkajian, Perumusan dan Penetapan Kebijakan di bidang Pencatatan Sipil meliputi Pencatatan Kelahiran, Kematian dan Lahir-Mati, Perkawinan dan Pembatalan Perkawinan, Perceraian dan Pembatalan Perceraian, Perubahan Status Anak (Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan), Perubahan Nama dan Peristiwa Penting Lainnya, Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil, Pewarganegaraan, Surat Keterangan Pencatatan Sipil Lainnya serta Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi Pencatatan Sipil; Penyusunan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang Pencatatan Sipil meliputi Pencatatan Kelahiran, Kematian dan Lahir-Mati, Perkawinan dan Pembatalan Perkawinan, Perceraian dan Pembatalan Perceraian, Perubahan Status Anak (Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan), Perubahan Nama dan Peristiwa Penting Lainnya, Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil, Pewarganegaraan, Surat Keterangan Pencatatan Sipil Lainnya serta Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi Pencatatan Sipil

01.01 Kelahiran

Naskah terkait Dokumen Pengajuan Layanan Kelahiran berupa : Surat Keterangan Kelahiran dari RS/Puskesmas/Klinik Bersalin/Dokter/Bidan, Akta Perkawinan, Berita Acara Kepolisian tentang Kelahiran Tanpa Asal-Usul, SPTJM Kelahiran dan Surat Rekomendasi Tim Advokasi Administrasi Kependudukan tentang Daftar Tambahan Register Kelahiran; Dokumen Hasil Layanan Kelahiran berupa: Register Akta Kelahiran, Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Kelahiran dari Luar Wilayah Republik Indonesia dan Daftar Tambahan Register Akta Kelahiran; Data kepemilikan akta kelahiran; Laporan pelaksanaan kegiatan fasilitasi pencatatan kelahiran

01.02 Kematian dan Lahir-Mati

Naskah terkait Dokumen Pengajuan Layanan Kematian dan Lahir-Mati berupa: Surat Keterangan Kematian dari RS/Puskesmas/Klinik/Dokter/Dinas Kehutanan/TPU, Surat Keterangan Lahir-Mati dari RS/Puskesmas/Klinik Bersalin/Dokter/Bidan, Surat Keterangan/Berita Acara Kepolisian tentang Kematian Tanpa Identitas, Surat Pernyataan dari Maskapai Penerbangan/Kapal Laut tentang Kematian yang Tidak Ditemukan Jenazahnya, Salinan Penetapan Keputusan Pengadilan Negeri dan Surat Rekomendasi Tim Advokasi Administrasi Kependudukan tentang Daftar Tambahan Register Kematian; Dokumen Hasil Layanan Kematian dan Lahir-Mati berupa: Register Akta Kematian, Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Kematian dari Luar Wilayah Republik Indonesia, Surat Keterangan Lahir-Mati dan Daftar Tambahan Register Akta Kematian; Data kepemilikan akta kematian dan surat keterangan lahir-mati; Laporan pelaksanaan kegiatan fasilitasi pencatatan kematian

01.03 Perkawinan dan Pembatalan Perkawinan

Naskah terkait Dokumen Pengajuan Layanan Perkawinan dan Pembatalan Perkawinan berupa: Surat Keterangan Perkawinan dari Pemuka Agama atau Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME, Salinan Penetapan Keputusan Pengadilan Negeri tentang Perkawinan (bagi mempelai yang salah satu berbeda agama/bagi mempelai yang salah satu berusia di bawah 19 tahun/bagi mempelai salah satu atau keduanya telah meninggal dunia), Perjanjian Perkawinan, Surat Izin dari Komandan, Surat Izin dari Perwakilan Negara Asing, Salinan Penetapan Keputusan Pengadilan Negeri tentang Pembatalan Perkawinan dan Surat Rekomendasi Tim Advokasi Administrasi Kependudukan tentang Daftar Tambahan Register Perkawinan; Dokumen Hasil Layanan Perkawinan dan Pembatalan Perkawinan berupa: Register Akta Perkawinan, Catatan Pinggir Pengesahan Perjanjian Perkawinan pada Register Akta Perkawinan, Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Perkawinan dari Luar Wilayah Republik Indonesia, Daftar Tambahan Register Akta Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan dan Catatan Pinggir Pembatalan Perkawinan pada Register Akta Perkawinan; Data Kepemilikan Akta Perkawinan dan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan; Laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pencatatan Perkawinan

01.04 Perceraian dan Pembatalan Perceraian

Naskah terkait Dokumen Pengajuan Layanan Perceraian dan Pembatalan Perceraian berupa: Salinan Penetapan Keputusan Pengadilan Negeri tentang Perceraian, Salinan Penetapan Keputusan Pengadilan Negeri tentang Pembatalan Perceraian dan Surat Rekomendasi Tim Advokasi Administrasi Kependudukan tentang Daftar Tambahan Register Perceraian; Dokumen Hasil Layanan Perceraian dan Pembatalan Perceraian berupa: Register Akta Perceraian, Catatan Pinggir Perceraian pada Register Akta Perkawinan, Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Perceraian dari Luar Wilayah Republik Indonesia, Daftar Tambahan Register Akta Perceraian, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Catatan Pinggir Pembatalan Perceraian pada Register Akta Perceraian dan Catatan Pinggir Pembatalan Perceraian pada Register Akta Perkawinan; Data Kepemilikan Akta Perceraian dan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian; Laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pencatatan Perceraian

- 01.05 Perubahan Status Anak (Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak)
 Naskah terkait Dokumen Pengajuan Layanan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak berupa: Kutipan Akta Kelahiran, Salinan Penetapan Keputusan Pengadilan tentang Pengangkatan Anak, Surat Pernyataan Pengakuan Anak (bagi Ibu Kandung WNI), Salinan Penetapan Keputusan Pengadilan tentang Pengakuan Anak (bagi Ibu Kandung WNA), Surat Keterangan Perkawinan dari Pemuka Agama atau Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME yang Terjadi Sebelum Kelahiran Anak, Salinan Penetapan Keputusan Pengadilan tentang Pengesahan Anak dan Kutipan Akta Perkawinan yang Terjadi Sebelum Kelahiran Anak; Dokumen Hasil Layanan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak berupa: Surat Keterangan Pengangkatan Anak WNA oleh WNI di Luar Wilayah NKRI, Catatan Pinggir Pengangkatan Anak pada Register Akta Kelahiran, Catatan Pinggir Pengakuan Anak pada Register Akta Kelahiran Anak, Catatan Pinggir Pengakuan Anak berdasarkan Penetapan Pengadilan pada Register Akta Kelahiran Anak, Register Akta Pengakuan Anak, Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Pengakuan Anak WNI dari Luar Wilayah NKRI, Catatan Pinggir Pengesahan Anak pada Register Akta Kelahiran Anak, Catatan Pinggir Pengesahan Anak berdasarkan Penetapan Pengadilan pada Register Akta Kelahiran Anak, Register Akta Pengesahan Anak dan Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Pengesahan Anak WNI dari Luar Wilayah NKRI; Laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pencatatan Perubahan Status Anak
- 01.06 Perubahan Nama dan Perubahan Peristiwa Penting Lainnya
 Naskah terkait Dokumen Pengajuan Layanan Perubahan Nama dan Perubahan Peristiwa Penting Lainnya berupa: Salinan Penetapan Keputusan Pengadilan tentang Perubahan Nama, Salinan Penetapan Keputusan Pengadilan tentang Perubahan Peristiwa Penting Kependudukan dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil; Dokumen Hasil Layanan Perubahan Nama dan Perubahan Peristiwa Penting Lainnya berupa: Catatan Pinggir Perubahan Nama pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Catatan Pinggir Perubahan Peristiwa Penting Lainnya pada Register Akta Pencatatan Sipil; Laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Peristiwa Penting Lainnya
- 01.07 Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil
 Naskah terkait Dokumen Pengajuan Layanan Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil berupa: Dokumen Autentik yang Menjadi Persyaratan Penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, Kutipan Akta Pencatatan Sipil dimana terdapat Kesalahan Tulis Redaksional yang akan Dibatalkan, SPTJM Kebenaran Data Pembetulan/ Pembatalan Akta Pencatatan Sipil, Salinan Penetapan Keputusan Pengadilan tentang Pembatalan Akta Pencatatan Sipil, Salinan Berita Acara Pembahasan Rapat Tim Advokasi Permasalahan Administrasi Kependudukan tentang Pembatalan Akta Pencatatan Sipil, Salinan Surat Rekomendasi Tim Advokasi Permasalahan Administrasi Kependudukan tentang Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dan Berita Acara Pembatalan Akta Pencatatan Sipil; Dokumen Hasil Layanan Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil berupa: Catatan Pinggir Pembetulan Akta Pencatatan Sipil pada Register Akta Pencatatan Sipil, Catatan Pinggir Pembatalan Akta Pencatatan Sipil berdasarkan Penetapan Keputusan Pengadilan pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang Dibatalkan, Catatan Pinggir Pembatalan Akta Pencatatan Sipil berdasarkan Penetapan Keputusan Pengadilan pada

Register Akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan, Catatan Pinggir Pembatalan Akta Pencatatan Sipil Tanpa melalui Penetapan Keputusan Pengadilan (Contrarius Actus) pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan, Catatan Pinggir Pembatalan Akta Pencatatan Sipil Tanpa melalui Penetapan Keputusan Pengadilan (Contrarius Actus) pada Register Akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan, Surat Keterangan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil, Register Akta Pencatatan Sipil Baru sesuai Penetapan Keputusan Pengadilan dan Register Akta Pencatatan Sipil Baru sesuai Berita Acara Pembatalan Akta Pencatatan Sipil; Laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

01.08 Pewarganegaraan

Naskah terkait Dokumen Pengajuan Layanan Pewarganegaraan berupa: Salinan Keputusan Presiden mengenai Perubahan Status Kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI, Salinan/Petikan Keputusan Menteri yang bidang tugasnya meliputi urusan Kewarganegaraan, Berita Acara Pengucapan Sumpah atau Pernyataan Janji Setia kepada NKRI, Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang Dimiliki, Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia dari Perwakilan RI, Petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang Perubahan Status Kewarganegaraan, Sertifikat Bukti Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas dari Imigrasi/Perwakilan RI dan Surat Bukti Penyerahan Dokumen Kewarganegaraan dan Keimigrasian; Dokumen Hasil Layanan Pewarganegaraan berupa: Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan, Catatan Pinggir Perubahan Status Kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI pada Register Akta Pencatatan Sipil, Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan RI di Luar Wilayah NKRI, Catatan Pinggir Perubahan Status Kewarganegaraan dari WNI menjadi WNA pada Register Akta Pencatatan Sipil, Catatan Pinggir Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas yang Telah Mendapatkan Sertifikat Bukti Pendaftaran/Telah Memilih Kewarganegaraan/Tidak Memilih Kewarganegaraan pada Register Akta Kelahiran; Laporan pelaksanaan kegiatan fasilitasi pencatatan Pewarganegaraan

01.09 Surat Keterangan Pencatatan Sipil Lainnya

Naskah terkait Dokumen Pengajuan Layanan Surat Keterangan Pencatatan Sipil Lainnya berupa: Surat Pengantar Lurah Belum Pernah Kawin/Belum Kawin Kembali, Surat Pernyataan Belum Pernah Kawin/Belum Kawin Kembali, Kutipan Akta Perceraian/Kematian, Kutipan Akta Pencatatan Sipil, Surat Permohonan Instansi/Lembaga/Badan Hukum/Pribadi yang bersangkutan atau kuasanya dan Surat Pernyataan Melindungi Kerahasiaan dan Tidak Menyalahgunakan Data; Dokumen Hasil Layanan Surat Keterangan Pencatatan Sipil Lainnya berupa: Surat Keterangan Belum Kawin, Surat Keterangan Keabsahan Akta Pencatatan Sipil; Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Pencatatan Sipil Lainnya

01.10 Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi

Naskah terkait Program Kerja Pencatatan Sipil; Laporan Kinerja Pencatatan Sipil

02 Data dan Informasi

02.00 Pemanfaatan Data dan Informasi Kependudukan

Naskah terkait yang meliputi permohonan dan persyaratan serta fasilitasi pelaksanaan pelayanan Pemanfaatan Data dan Informasi Kependudukan

- 02.01 Layanan Konfirmasi Data dan Informasi Kependudukan
Naskah terkait yang meliputi Surat Permohonan serta fasilitasi pelaksanaan pelayanan Layanan konfirmasi dokumen Pencatatan Sipil
- 02.02 Pemanfaatan Akses Data Kependudukan, NIK, KTP-el, dan KIA, dan Sinkronisasi/Pemadanan Data oleh OPD/Lembaga
Naskah terkait yang meliputi surat permohonan dan persyaratan serta fasilitasi pelaksanaan pelayanan Pemanfaatan Akses Data Kependudukan, NIK, KTP-el, dan KIA, dan Sinkronisasi/Pemadanan Data oleh OPD/Lembaga

- 03 Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian
 - 03.00 Layanan Konfirmasi Dokumen Kependudukan yang dimohonkan oleh Lembaga dari Penegak Hukum
Naskah terkait yang meliputi surat permohonan dari Instansi Lembaga Penegak Hukum/surat kuasa dan surat jawaban
 - 03.01 Monitoring Evaluasi dan dokumentasi
Naskah terkait Monitoring Evaluasi dan dokumentasi
 - 03.02 Pengendalian Penduduk
Naskah terkait yang meliputi Bina Kependudukan, Pemanggilan dan pemeriksaan, penyelesaian sengketa kependudukan, bimbingan teknis kependudukan, masalah kependudukan lainnya, yakni Pemeriksaan (Sengketa, Masalah lainnya); Bimtek (Biduk)

VIII. PD. PERDAGANGAN

00 Kebijakan

Kebijakan tentang Perdagangan Dalam Negeri, Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, Perdagangan Luar Negeri, Kerja Sama Perdagangan Internasional, Pengembangan Ekspor Nasional (Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan bidang Perdagangan yang terdiri dari Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan, Penyiapan Kebijakan, Perumusan Kebijakan, serta Masukan dan Dukungan Kebijakan, Termasuk Perumusan Standar)

00.00 Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan

Naskah terkait Pengkajian dan pengusulan kebijakan

00.01 Penyiapan Bahan

Naskah terkait Penyiapan Bahan Kebijakan

00.02 Perumusan Kebijakan

Naskah terkait Perumusan Kebijakan

00.03 Pemberian Masukan dan Dukungan dalam Penyusunan Kebijakan

Naskah terkait Pemberian Masukan dan Dukungan dalam Penyusunan Kebijakan

00.04 Penetapan dalam Bentuk Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria

Naskah terkait Penetapan dalam Bentuk Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria

00.05 Perumusan dan Penerapan Standar

Naskah terkait Perumusan dan Penerapan Standar

01 Perdagangan Dalam Negeri

01.00 Bina Usaha

Naskah terkait Kelembagaan dan Penguatan Usaha; Jasa Perdagangan; Usaha Dagang Asing dan Keagenan; Informasi Perusahaan; Pelaku Pasar

01.01 Dagang Kecil Menengah dan Produk Dalam Negeri

Naskah terkait Iklim Usaha dan Bimbingan Teknis (iklim usaha dagang kecil menengah dalam negeri dan produk dalam negeri mulai dari monitoring ketersediaan bahan baku, stabilisasi harga pasar, dan bimbingan teknis.); Fasilitas Usaha dan Pemasaran (fasilitasi usaha serta pameran dan pemasaran usaha dagang kecil menengah dan produk dalam negeri); Pengembangan Produk Lokal (pengembangan produk lokal daerah, mulai dari penelaahan potensi produk hingga fasilitasi dalam rangka pengembangan dan penguatan produk.); Pencitraan Produk Dalam Negeri (pencitraan produk dalam negeri seperti kerja sama peningkatan penggunaan produk dalam negeri maupun peningkatan promosi produk dalam negeri)

01.02 Logistik dan Sarana Distribusi

Naskah terkait Pengembangan Sarana Distribusi (pengembangan sarana distribusi mulai dari perencanaan hingga bimbingan teknis pengembangan sarana distribusi.); Pengelolaan Sarana Distribusi (pengelolaan sarana distribusi mulai dari bimbingan teknis pengelolaan sarana distribusi hingga evaluasi pengelolaan sarana distribusi.); Kerjasama Pengembangan Sistem Logistik; Informasi dan Bimbingan Teknis Penyedia Jasa Logistik

01.03 Bahan Pokok dan Barang Strategis

Naskah terkait Informasi Pasar (informasi pasar berupa harga dan non harga untuk bahan pokok dan barang penting mulai dari pengumpulan, pengolahan data, penyiapan, penyajian informasi, hingga hasil analisis termasuk operasi pasar.); Hasil industri (data dan informasi mengenai hasil industri gula, tepung, minyak goreng, dan garam, mulai dari pengumpulan, pengolahan data, penyiapan, penyajian informasi, hingga

hasil analisis.); Barang Strategis (data dan informasi mengenai barang strategis hasil agro maupun barang strategis hasil industri, mulai dari pengumpulan, pengolahan data, penyiapan, penyajian informasi, hingga hasil analisis.); Bahan Pokok Agro (data dan informasi mengenai bahan pokok agro baik serelia maupun hewan dan non serelia, mulai dari pengumpulan, pengolahan data, penyiapan, penyajian informasi, hingga hasil analisis)

02 Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

02.00 Standarisasi

Naskah terkait Kelembagaan dan informasi standar; Kerjasama Standarisasi; Perumusan dan penerapan standar; Tata Usaha

02.01 Pemberdayaan Konsumen

Naskah terkait Kerjasama, Informasi, dan Publikasi (Kerjasama maupun Informasi dan Publikasi yang terkait dengan Pemberdayaan Konsumen); Analisa Penyelenggara Pelindungan Konsumen; Bimbingan Konsumen dan Pelaku Usaha; Fasilitas Kelembagaan

02.02 Pengawasan Barang Beredar dan Jasa

Naskah terkait Produk Pertambangan dan Aneka Industri; Produk Pertanian, Kimia dan Kehutanan (Pengawasan Jasa yang bersifat Distribusi maupun Bisnis); Jasa (Kerjasama yang dilakukan antara Lembaga Pemerintah maupun Non Pemerintah); Kerjasama

02.03 Metrologi

Naskah terkait Sarana dan Kerjasama; Kelembagaan dan Penilaian; UTP dan Standar Ukuran; Pengawasan; Balai Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU); Balai Pengujian UTP (Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya)

03 Perdagangan Berjangka Komoditi

03.00 Pengkajian Pasar

Naskah terkait Bina Usaha; Pengawasan Transaksi; Pengawasan Keuangan dan Audit

03.01 Analisis Pasar

Naskah Pengkajian Pasar; Pengembangan Pasar; Sistem Informasi

03.02 Pasar Fisik dan Jasa

Naskah terkait Pembinaan Pasar Lelang dan Sistem Resi Gudang; Pengawasan Pasar Lelang; Pengawasan Sistem Resi Gudang

04 Perdagangan Luar Negeri

04.00 Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan

Naskah terkait Ekspor Produk Tanaman Pangan, Perikanan, dan Peternakan; Perkebunan; Hortikultura, Rempah-Rempah dan Tanaman Obat; Kehutanan

04.01 Ekspor Produk Industri dan Pertambangan

Naskah terkait Produk Tekstil dan Produk Tekstil, Aneka dan Jasa; Produk Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika; Produk Industri Agro dan Kimia; Produk Migas dan Pertambangan

04.02 Impor

Naskah terkait Impor Barang Modal; Barang Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan; Barang Aneka Industri dan Bahan Baku Industri; Barang Konsumsi; Barang Kimia, Tambang dan Limbah

04.03 Fasilitasi Ekspor dan Impor

Naskah terkait Kerjasama Internasional; Sumber Pembiayaan dan Sistem Pembayaran; Prosedur dan Dokumen; Penunjang Perdagangan Internasional; Pelayanan Perdagangan

- 04.04 Pengamanan Perdagangan
Naskah terkait Monitoring Hambatan Perdagangan; Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan; Penanganan Tuduhan Dumping, Subsidi, Safeguard
- 05 Kerjasama Perdagangan Internasional
- 05.00 Multilateral
Naskah terkait Akses Pasar Barang Pertanian; Akses Pasar Barang Non Pertanian; Fasilitas dan Aturan Perdagangan; Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Investasi, Lingkungan dan Isu Baru; Ketentuan Perdagangan dan Notifikasi
- 05.01 Association of South East Asia Nation (ASEAN)
Naskah terkait Masyarakat Ekonomi ASEAN I; Masyarakat Ekonomi ASEAN II; ASEAN Mitra Dialog; Kerja Sama Antar dan Sub Regional
- 05.02 Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) dan Organisasi Internasional Lainnya
Naskah terkait Akses Perdagangan dan Investasi APEC; Fasilitas Perdagangan dan Investasi APEC; Badan-Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Non PBB; Organisasi Komoditi Internasional
- 05.03 Bilateral
Naskah terkait Kerja Sama Bilateral dengan berbagai Negara-Negara
- 05.04 Perundingan Perdagangan Jasa
Naskah terkait Jasa Bisnis, Distribusi, Keuangan; Jasa Konstruksi, Pariwisata, Rekreasi Budaya dan Olah Raga, Transportasi; Jasa Pendidikan, Kesehatan; Jasa Komunikasi, Lingkungan dan Jasa Lainnya; Rules, Peraturan Domestik dan Penyusunan Analisis Informasi
- 06 Pengembangan Ekspor Nasional
- 06.00 Pasar dan Informasi Ekspor
Naskah terkait Pengembangan Pasar; Pengembangan Sistem Informasi Ekspor; Pelayanan Informasi Ekspor
- 06.01 Produk Ekspor dan Ekonomi Kreatif
Naskah terkait Hasil Industri Manufaktur; Produk Agro; Jasa; Ekonomi Kreatif
- 06.02 Kerja Sama Pengembangan Ekspor
Naskah terkait Pengembangan Ekspor Luar Negeri; Pengembangan Ekspor Dalam Negeri
- 06.03 Promosi dan Citra
Naskah terkait Promosi; Perencanaan dan Pemantauan Citra; Penerapan Citra
- 07 Bimbingan Teknis
Naskah terkait Bimbingan Teknis pada Urusan Perdagangan
- 08 Evaluasi
Naskah terkait berbagai Evaluasi pada Kebijakan Perdagangan

IX. PK. PENDIDIKAN

00 Kebijakan

00.00 Kebijakan Bidang Pendidikan

Naskah terkait Penetapan Kebijakan (sejak Rancangan Hingga Penetapan), Referensi Kebijakan Provinsi

00.01 Penelitian dan Kajian Kebijakan Pendidikan

Naskah terkait Penetapan Kebijakan Pendidikan (sejak Rancangan Hingga Penetapan), Referensi Kebijakan Provinsi

00.02 Perjanjian Kerjasama

Naskah terkait Perencanaan Hingga Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama

00.03 Sertifikasi Lembaga, Akreditasi Dan Audit

Naskah Terkait Sertifikasi Lembaga, Akreditasi Dan Audit

01 Pembinaan Pendidikan

01.00 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Naskah terkait Taman Kanak-Kanak (berkaitan dengan Lembaga, Menu Generik, Bahan Ajar, Penilaian Perkembangan Anak, Supervisi dan Monitoring, Peserta Didik, Pembelajaran dan Evaluasi); Taman Penitipan Anak (berkaitan dengan Lembaga, Menu Generik, Bahan Ajar, Penilaian Perkembangan Anak, Supervisi dan Monitoring, Peserta Didik, Pembelajaran dan Evaluasi); Kelompok Bermain (berkaitan dengan Lembaga, Menu Generik, Bahan Ajar, Penilaian Perkembangan Anak, Supervisi dan Monitoring, Peserta Didik, Pembelajaran dan Evaluasi); Kemitraan (berkaitan dengan Kemitraan Lembaga Seperti Komunitas Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak Kanak Indonesia, PAUD dan TK Swasta)

01.01 Sekolah Dasar

Naskah terkait Kelembagaan; Kurikulum; Program dan Evaluasi Pembinaan Sekolah Dasar; Penilaian; Peserta Didik; Sumber Belajar meliputi Data Pendidikan, Gambar, Alat Laboratorium dan Buku; Kemitraan meliputi Komunitas Pendidikan SD, SD Swasta dan Madrasah

01.02 Sekolah Menengah Pertama

Naskah terkait Kelembagaan; Kurikulum; Program dan Evaluasi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama; Penilaian; Peserta Didik; Sumber Belajar meliputi Data Pendidikan, Gambar, Alat Laboratorium dan Buku; Kemitraan meliputi Komunitas Pendidikan SMP, SMP Swasta dan Madrasah

01.03 Sekolah Menengah Atas

Naskah terkait Kelembagaan; Kurikulum; Program dan Evaluasi Pembinaan Sekolah Menengah Atas; Penilaian; Peserta Didik; Sumber Belajar meliputi Data Pendidikan, Gambar, Alat Laboratorium dan Buku; Kemitraan meliputi Komunitas Pendidikan SMA, SMA Swasta dan Madrasah

01.04 Sekolah Menengah Kejuruan

Naskah terkait Kelembagaan; Kurikulum; Program dan Evaluasi Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan; Penilaian; Peserta Didik; Sumber Belajar meliputi Data Pendidikan, Gambar, Alat Laboratorium dan Buku; Kemitraan Meliputi Komunitas Pendidikan SMK dan SMK Swasta; Penyelarasan Kejuruan dan Kerjasama Industri

01.05 Pendidikan Masyarakat

Naskah terkait Pendidikan Kesetaraan; Pendidikan Keaksaraan; Pendidikan Berkelanjutan; Pendidikan Keluarga; Pendidikan Masyarakat Lainnya; Kursus dan Pelatihan

- 01.06 Pendidikan Khusus/Layanan Khusus
Naskah terkait Kelembagaan; Kurikulum; Program dan Evaluasi Pembinaan Pendidikan Khusus/Layanan Khusus; Penilaian; Peserta Didik; Sumber Belajar meliputi Data Pendidikan, Gambar, Alat Laboratorium dan Buku; Kemitraan Meliputi Komunitas Pendidikan Khusus/Layanan Khusus

- 02 Guru dan Tenaga Kependidikan
 - 02.00 Guru
Naskah terkait Sertifikasi meliputi Proses Sertifikasi, NSPK, Data Sasaran dan Kelulusan; Kompetensi
 - 02.01 Tenaga Kependidikan
Naskah terkait Tenaga Kependidikan
 - 02.02 Kepala Satuan Pendidikan
Naskah terkait Kepala Satuan Pendidikan

- 03 Bantuan Sosial dan Penghargaan
 - 03.00 Bantuan Sosial Satuan Pendidikan
Naskah terkait Bantuan Sosial Satuan Pendidikan
 - 03.01 Bantuan Sosial Masyarakat
Naskah terkait Bantuan Sosial Masyarakat
 - 03.02 Bantuan Sosial Guru dan Tenaga Kependidikan
Naskah terkait Bantuan Sosial Guru dan Tenaga Kependidikan
 - 03.03 Penghargaan
Naskah terkait Penghargaan

- 04 Data dan Informasi
 - 04.00 Pengolahan Data
Naskah terkait Pengolahan Data
 - 04.01 Informasi dan Statistik
Naskah terkait Informasi dan Statistik
 - 04.02 Perangkat Lunak
Naskah terkait Perangkat Lunak
 - 04.03 Perangkat Keras
Naskah terkait Perangkat Keras

- 05 Prasarana dan Sarana
 - 05.00 Prasarana Pendidikan
Naskah terkait Prasarana Pendidikan
 - 05.01 Sarana Pendidikan
Naskah terkait Sarana Pendidikan

X. KB. KEBUDAYAAN

00 Kebijakan

Naskah terkait Kebijakan dan Program Pemerintah untuk Perlindungan dan Pembinaan Bidang Kebudayaan meliputi Cabang Kesenian (Seni Pewayangan, Seni Tari, Seni Musik, Seni Rupa, dll).

01 Pelestarian Cagar Budaya Dan Permuseuman

01.00 Registrasi Nasional

Naskah terkait Pendataan dan Penetapan; Pengelolaan Data

01.01 Perlindungan

Naskah terkait Perizinan dan Pengamanan; Pemeliharaan dan Pemugaran

01.02 Pengembangan dan Pemanfaatan

Naskah terkait Pengembangan dan Pemanfaatan

01.03 Pembinaan dan Pengawasan

Naskah terkait Pembinaan dan Pengawasan

01.04 Pelayanan dan Promosi

Naskah terkait Pelayanan dan Promosi

01.05 Eksplorasi dan Dokumentasi

Naskah terkait Eksplorasi Cagar Budaya; Dokumentasi Cagar Budaya dan Musium

02 Pembinaan Kesenian Dan Perfilman

02.00 Pembinaan Seni Pertunjukan

Naskah terkait Seni Pertunjukan Tradisional; Seni Pertunjukan Nontradisional

02.01 Pembinaan Seni Rupa

Naskah terkait Seni Rupa Murni; Seni Rupa Terapan

02.02 Pembinaan Seni Literasi dan Apresiasi Film

Naskah Terkait Seni Literasi; Apresiasi Film

02.03 Dokumentasi dan Publikasi

Naskah Terkait Dokumentasi Seni dan Film; Publikasi Seni dan Film

03 Pembinaan Kepercayaan Kepada Tuhan YME

03.00 Kelembagaan dan Kepercayaan

Naskah terkait Pemberdayaan Lembaga; Hubungan Antar Lembaga

03.01 Komunitas Kepercayaan

Naskah terkait Komunitas Adat; Upacara Adat

03.02 Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional

Naskah terkait Pengetahuan Tradisional; Ekspresi Budaya Tradisional

03.03 Lingkungan Budaya dan Pranata Sosial

Naskah terkait Lingkungan Budaya dan Pranata Sosial

04 Sejarah dan Nilai Budaya

04.00 Sejarah

Naskah terkait Penggalian Sumber Sejarah; Penulisan Sejarah

04.01 Pemetaan Nilai

Naskah terkait Pemetaan; Klasifikasi

04.02 Verifikasi dan Perumusan Nilai

Naskah terkait Verifikasi Nilai; Perumusan Nilai

04.03 Dokumentasi dan Publikasi

Naskah terkait Dokumentasi Sejarah dan Nilai Sejarah; Publikasi Sejarah dan Nilai Sejarah

05 Internalisasi Nilai Budaya dan Diplomasi Budaya

05.00 Internalisasi Nilai Budaya

Naskah terkait Pengemasan Nilai Budaya; Penanaman Nilai Budaya

05.01 Kekayaan Budaya

Naskah terkait Kebudayaan Tradisi; Folklore; Kesusastaan

05.02 Warisan Budaya Nasional dan Dunia

Naskah terkait Warisan Budaya Benda; Tak Benda

05.03 Diplomasi Budaya

Naskah terkait Diplomasi Dalam Negeri; Luar Negeri

XI. PH. PERHUBUNGAN

00 Kebijakan

- 00.00 Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan
Naskah terkait Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan
- 00.01 Penyiapan Kebijakan
Naskah terkait Penyiapan Kebijakan
- 00.02 Perumusan dan Penyusunan Kebijakan
Naskah terkait Perumusan Kebijakan
- 00.03 Pemberian Masukan dan Dukungan dalam Penyusunan Kebijakan
Naskah terkait Pemberian Masukan dan Dukungan dalam Penyusunan Kebijakan
- 00.04 Penetapan dalam bentuk NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria)
Naskah terkait Penetapan dalam bentuk NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria)

01 Perhubungan

- 01.00 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Naskah terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 01.01 Jaringan Transportasi Jalan
Naskah terkait Jaringan Transportasi Jalan
- 01.02 Jaringan Prasarana dan Pelayanan
Naskah terkait Penentuan Lokasi Terminal Barang Tipe Pengumpul dan Tipe Penunjang; Penentuan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A, Tipe B dan Tipe C; Penetapan Lokasi Terminal Barang Utama; Standar Pelayanan Minimal Pengoperasian Terminal; Jaringan Trayek Angkutan Antar Kota/Provinsi; Jaringan Lintas pada Jaringan Jalan Primer; Penetapan Sarana dan Pelayanan Kelas Jalan Primer Nasional dan Lokal Kecuali Sarana JPO yang ada di Jalan nasional yang ditetapkan oleh nasional; Kualifikasi Teknis Petugas Terminal; Jaringan Transportasi Jalan Sekunder (Jalan Lingkungan)

02 Pengembangan Transportasi Jalan

- 02.00 Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan
Naskah terkait Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan
- 02.01 Pengembangan Transportasi Jalan
Naskah terkait Pengembangan Transportasi Jalan

03 Sarana Angkutan Jalan

- 03.00 Pengujian Kendaraan Bermotor
Naskah terkait Pengesahan Hasil Uji Tipe Kendaraan Bermotor; Sertifikasi Uji Tipe Kendaraan Bermotor; Sertifikasi Tenaga Penguji Kendaraan Bermotor; Akreditasi Unit Pengujian Kendaraan Bermotor
- 03.01 Teknologi Kendaraan Bermotor
Naskah terkait sertifikasi rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor; Pelaksanaan Kalibrasi Peralatan Uji Kendaraan Bermotor; Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor; Harmonisasi dan Standardisasi Regulasi Kendaraan Bermotor

04 Lalu Lintas Jalan

- 04.00 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
Naskah terkait Analisa Dampak Lalu Lintas Jalan Provinsi, Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan; Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Provinsi, Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan

04.01 Perlengkapan Jalan

Naskah terkait Pedoman teknis perlengkapan jalan; Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan di Jalan Provinsi; Pengembangan Jalur Khusus Pesepeda; Pengembangan Sarana Jalan Electronic Road Pricing (ERP); Pengembangan Sistem dan Sarana Pengendalian Lalu Lintas

05 Angkutan Jalan

05.00 Angkutan Penumpang

Naskah terkait Tarif Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi; Izin Trayek Angkutan Penumpang Untuk Trayek Dalam Kota; Izin Trayek Antar Kota Antar Provinsi; Izin Operasi Angkutan Pariwisata dan Angkutan Penumpang Tidak Dalam Trayek yang Wilayah Pelayanannya Dalam Kota & Antar Kota/Provinsi; Penilaian Kinerja Perusahaan Angkutan Umum; Pemberian Subsidi Angkutan Umum; Angkutan Perintis; Moda Transportasi Transjakarta Busway; Angkutan Umum Jak Lingko; Penghargaan Perusahaan Angkutan Umum; Pengemudi Teladan

05.01 Angkutan Barang

Naskah terkait Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Tarif Angkutan Barang; Izin Operasi Angkutan Barang Tertentu; Pembinaan Angkutan Barang

06 Pengendalian Operasional

06.00 Monitoring Operasional

Naskah terkait Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Pengawasan, Penertiban dan Pemberian Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Operasional Kendaraan Angkutan Umum Yang Menjadi Kewenangan

06.01 Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Naskah terkait Pedoman Teknis; Penyidikan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); Bimtek PPNS; Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

07 Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

07.00 Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan

Naskah terkait Analisa dan Evaluasi Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan; Pengembangan Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan

07.01 Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Naskah terkait Rancang Bangun Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan; Bimbingan Perawatan Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

07.02 Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Naskah terkait Rancang Bangun Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan; Bimbingan Pengelolaan Pelabuhan

07.03 Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan

Naskah terkait Manajemen Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan; Alur dan Perambuan Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan

07.04 Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Naskah terkait Bimbingan Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan; Tarif dan Keperintisan

08 Bina Sistem Transportasi Perkotaan

08.00 Jaringan Transportasi Perkotaan

Naskah terkait Transportasi Perkotaan Yang Berbasis Jalan, Jalan Rel dan Perairan Daratan; Transportasi Perkotaan untuk Kawasan Perkotaan Yang Melebihi Satu Wilayah Administrasi Provinsi; Sistem Informasi Manajemen (SIM) Jaringan Transportasi Perkotaan

08.01 Lalu Lintas Perkotaan

Naskah terkait Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Perkotaan; Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Perkotaan di Jalan Nasional Dalam Kawasan Perkotaan; Penanganan Lalu Lintas Perkotaan Berbasis Teknologi di Wilayah

08.02 Angkutan Perkotaan

Naskah terkait Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan Dalam Trayek; Jaringan Trayek Perkotaan; Penentuan dan Pemenuhan Alokasi Kebutuhan Angkutan Perkotaan Dalam Trayek Yang Wilayah Pelayanannya Melebihi Satu Wilayah Administrasi Provinsi

08.03 Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan

Naskah terkait Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan Tidak Dalam Trayek untuk Angkutan Penumpang dan/atau Barang; Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan Yang Menghubungkan Antar Simpul (Bandara, Pelabuhan, Stasiun, dan Terminal) di Kawasan Perkotaan Yang Melebihi Satu Wilayah Administrasi Provinsi; Penentuan dan Pemenuhan Alokasi Kebutuhan Angkutan Perkotaan Tidak Dalam Trayek Yang Wilayah Pelayanannya Melebihi Satu Wilayah Administrasi Provinsi

08.04 Dampak Transportasi Perkotaan

Naskah terkait Penyelenggaraan Transportasi Perkotaan Berwawasan Lingkungan; Penanganan Dampak Transportasi di Kawasan Perkotaan; Masterplan Pengembangan Teknologi Transportasi Ramah Lingkungan; Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan Nasional Dalam Kawasan Kota; Rekomendasi Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan Nasional Dalam Kawasan Perkotaan; Masterplan Transportasi Perkotaan

09 Keselamatan Transportasi Darat

09.00 Manajemen Keselamatan

Naskah terkait Monitoring dan Evaluasi Manajemen Keselamatan; Pengembangan Keselamatan;

09.01 Promosi dan Kemitraan Keselamatan

Naskah terkait Promosi Keselamatan: Penyuluhan, Publikasi dan Deseminasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan; Kemitraan Keselamatan Antar Lembaga dan Masyarakat di bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan

09.02 Bina Keselamatan Angkutan Umum

Naskah terkait Keselamatan Pengusahaan Angkutan Umum; Keselamatan Awak Angkutan Umum dan Awak Kapal Sungai dan Danau

09.03 Audit dan Inspeksi Keselamatan

Naskah terkait Audit Keselamatan; Inspeksi Keselamatan

10 Perkeretaapian

10.00 Perkeretaapian Perkotaan

Naskah terkait Moda Raya Terpadu (MRT); Lintas Raya Terpadu (LRT); Kereta Rel Listrik (KRL); Kereta Cepat

- 10.01 Penataan Jaringan Perkeretaapian
Naskah terkait Integrasi Antar Moda; Pengembangan Transit Oriented Development (TOD); Sarana dan Prasarana Perkeretaapian
- 10.02 Pembiayaan Perkeretaapian
Naskah terkait Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU); Subsidi Perkeretaapian; Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ)

- 11 Perparkiran
 - 11.00 Parkir Ruang Milik Jalan (RMJ)
Naskah terkait Parkir Ruang Milik Jalan (RMJ)
 - 11.01 Tarif Parkir
Naskah terkait Tarif Parkir
 - 11.02 Gedung Parkir
Naskah terkait Gedung Parkir
 - 11.03 Park And Ride
Naskah terkait Park and Ride
 - 11.04 Perjanjian Kerja Sama (PKS) Perparkiran
Naskah terkait Perjanjian Kerja Sama (PKS) Perparkiran
 - 11.05 Sarana dan Prasarana Perparkiran
Naskah terkait Sarana dan Prasarana Perparkiran
 - 11.06 Pelayanan dan Penertiban Penyelenggaraan Parkir
Naskah terkait Pelayanan dan Penertiban Penyelenggaraan Parkir

- 12 Pelayaran
 - 12.00 Kepelabuhanan
Naskah terkait Kepelabuhanan
 - 12.00 Angkutan Pelayaran
Naskah terkait Regulasi dan Kebijakan Teknis Terkait Urusan Angkutan Pelayaran;Regulasi Perizinan Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha Yang Berdomisili Dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Daerah Provinsi; Regulasi Perizinan Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Yang Berdomisili dan Yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Daerah Provinsi, Pelabuhan Antar Provinsi, dan Pelabuhan Internasional; Regulasi Perizinan Jasa terkait Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Kepelabuhanan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut/Jasa terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Daerah Provinsi; Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Antar Daerah Kabupaten/Kota Dalam Daerah Provinsi yang terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Penyeberangan Provinsi; Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota Dalam Daerah Provinsi

XII. KH. KEHUTANAN

00 Kebijakan

- 00.00 Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan
Naskah terkait Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan
- 00.01 Penyiapan Kebijakan
Naskah terkait Penyiapan Kebijakan
- 00.02 Perumusan Kebijakan
Naskah terkait Perumusan Kebijakan
- 00.03 Masukan dan Dukungan Kebijakan
Naskah terkait Masukan dan Dukungan Kebijakan
- 00.04 Penetapan NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria)
Naskah terkait Penetapan NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria)

01 Penyuluhan

- 01.00 Program Kerja Penyuluhan
Naskah terkait Program Kerja Penyuluhan
- 01.01 Materi Penyuluhan
Naskah terkait Materi Penyuluhan
- 01.02 Program Penyuluhan
Naskah terkait Program Penyuluhan
- 01.03 Sarana Penyuluhan
Naskah terkait Sarana Penyuluhan
- 01.04 Pengembangan Tenaga Penyuluhan
Naskah terkait Pengembangan Tenaga Penyuluhan
- 01.05 Pemberdayaan Masyarakat
Naskah terkait Pemberdayaan Masyarakat
- 01.06 Pelaksanaan Penyuluhan
Naskah terkait Pelaksanaan Penyuluhan
- 01.07 Diseminasi
Naskah terkait Diseminasi
- 01.08 Evaluasi dan Laporan
Naskah terkait Evaluasi dan Laporan

02 Planologi Kehutanan

- 02.00 Perencanaan Kawasan Hutan
Naskah terkait Perencanaan Makro Kawasan Hutan; Penataan Ruang Kawasan Hutan; Statistik dan Jaringan Komunikasi Data Kehutanan
- 02.01 Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan
Naskah terkait Pengukuhan Kawasan Hutan; Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan; Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan
- 02.02 Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
Naskah terkait Inventarisasi Sumber Daya Hutan; Pemantauan Sumber Daya Hutan; Pemetaan Sumber Daya Hutan; Jaringan Data Spasial
- 02.03 Penggunaan Kawasan Hutan
Naskah terkait Penggunaan Kawasan Hutan; Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan; Informasi Penggunaan Kawasan Hutan
- 02.04 Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan
Naskah terkait Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan; Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan; Informasi Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan

03 Bina Usaha Kehutanan

03.00 HPH/HTI/IUPHHK

Naskah terkait Data Areal HPH/HTI/IUPHHK; SK HPH/HTI/IUPHHK; Kerjasama; Pembatalan/Penolakan; Perpanjangan

03.01 Modal dan Peralatan

Naskah terkait Investasi Industri; Peralatan; Tenaga Kerja; Pemegang Saham; Neraca Perusahaan

03.02 Rencana Karya

Naskah terkait Rencana Karya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP); Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH); Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan (RKT); Rencana Karya Lima Tahun Pengusahaan Hutan (RKL)

03.03 Produksi

Naskah terkait Target Produksi RKT dan Bagan Kerja; Produksi Kayu; Produksi Non Kayu

03.04 Industri

Naskah terkait Industri Kayu HPH/HTI/IUPHHK; Industri Kayu Non HPH/HTI/IUPHHK; Industri Non Kayu

03.05 Pembangunan Hutan Tanaman Industri

Naskah terkait Hutan Tanaman Industri Pulp; Hutan Tanaman Industri Pertukangan

03.06 Pelanggaran dan Sanksi

Naskah terkait Pemblokiran; Denda; Pencabutan Areal HPH/HTI/IUPHHK

03.07 Pemanfaatan Hutan Produksi

Naskah terkait Pola Pemanfaatan Hutan Produksi; Penataan Pemanfaatan Hutan Produksi; Informasi Sumber Daya Hutan Produksi; Pengembangan Investasi Usaha

03.08 Pengembangan Hutan Alam

Naskah terkait Penyiapan Pemanfaatan Hutan Alam; Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam/Rencana Kerja Usaha Produksi Hasil Hutan Kayu Hutan Alam; Produksi Hutan Alam; Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Alam

03.09 Pengembangan Hutan Tanaman

Naskah terkait Hutan Tanaman Industri; Hutan Tanaman Rakyat; Rencana Kerja dan Produksi Hutan Tanaman/Rencana Kerja Usaha Produksi Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman I; Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman; Pembiayaan Hutan Tanaman

03.10 Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan

Naskah terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak; Peredaran Hasil Hutan; Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan; Penertiban Peredaran Hasil Hutan

03.11 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

Naskah terkait Pemolaan Pengolahan Hasil Hutan; Pengendalian Bahan Baku dan Industri Primer Hasil Hutan; Penilaian Kinerja Industri dan Pemasaran Hasil Hutan

03.12 Pembinaan Hutan

Naskah terkait Pembinaan HPH/HTI/IUPHHK; Pembinaan TPTI/TPTJ/Silvikultur

04 Standardisasi dan Lingkungan

04.00 Standardisasi

Naskah terkait Kayu; Non Kayu; Produk; Proses

04.01 Sarana Pengujian Hasil Hutan

Naskah terkait Sarana Pengujian Hasil Hutan

- 04.02 Pengembangan
Naskah terkait Pengembangan Perusahaan; Pengembangan Pemasaran
- 04.03 Pemasaran Hasil Hutan
Naskah terkait Pemasaran Hasil Hutan
- 04.04 Pengendalian Lingkungan
Naskah terkait Forum Amdal di Dalam Kawasan Hutan; Amdal di Luar Kawasan Hutan
- 04.05 Angkutan Hasil Hutan
Naskah terkait Sarana dan Prasarana (Armada Angkutan, Kerjasama Angkutan, Tempat Pemuatan Hasil Hutan, Tempat Pengumpulan Log Pond dan Pengangkutan); Pembinaan dan Peningkatan Daya Hutan (Angkutan dan Bongkar Muat)
- 04.06 Tata Usaha Hasil Hutan
Naskah terkait Tanda Pengenal Perusahaan; Legalitas; Palu Tok Kualitas; Pass Angkutan; Sertifikat Ekspor Hasil Hutan

- 05 Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam
- 05.00 Konservasi Jenis dan Genetik
Naskah terkait Flora dan Fauna yang Dilindungi; Flora dan Fauna yang Tidak Dilindungi; Lembaga Konservasi/Kebun Binatang; Konvensi Keanekaragaman Hayati
- 05.01 Kawasan Konservasi
Naskah terkait Cagar Alam; Suaka Margasatwa; Taman Wisata; Taman Buru; Taman Nasional; Taman Hutan Raya; Hutan Lindung dan Suaka Alam; Lahan Basah dan Konservasi Laut; Gua/Karst
- 05.02 Pengamanan Hutan
Naskah terkait Pelanggaran; Bencana Alam; Kebakaran Hutan; Sengketa Hutan; Hama dan Penyakit
- 05.03 Penyidikan dan Perlindungan Hutan
Naskah terkait Program dan Evaluasi Penyidikan dan Perlindungan; Penyidikan dan Perlindungan Wilayah; Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
- 05.04 Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam
Naskah terkait Pengembangan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam; Pemanfaatan Jasa Lingkungan; Pemanfaatan Wisata Alam
- 05.05 Bina Cinta Alam
Naskah terkait Cinta Alam; Kader Konservasi Sumber Daya Alam; Data organisasi pencinta alam dan kader konservasi SDA

- 06 Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Perhutanan Sosial
- 06.00 Perbenihan
Naskah terkait Pemolaan Benih; Kebun Benih; Tegakan Benih; Pengadaan Benih; Pengujian dan Penyimpanan Benih; Lalu Lintas Angkutan Benih; Pembibitan; Pengembangan Sumber Benih; Pengembangan Usaha Perbenihan; Pengendalian Peredaran Benih
- 06.01 Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Naskah terkait Pemolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan; Rehabilitasi Hutan; Rehabilitasi Lahan; Pengelolaan Hutan Mangrove, Hutan Pantai, Rawa dan Gambut; Reklamasi Hutan dan Konservasi Tanah
- 06.02 Tanaman Reboisasi
Naskah terkait Reboisasi Lahan Kritis; Reboisasi Areal HPH
- 06.03 Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
Naskah terkait Pemolaan Pengelolaan DAS; Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS; Teknik Pengelolaan DAS; Evaluasi Pengelolaan DAS

06.04 Perhutanan Sosial

Naskah terkait Pemolaan; Pengembangan Hutan Kemasyarakatan; Pengembangan Hutan Desa; Pengembangan Hutan Hak dan Kemitraan; Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial; Hasil Hutan Bukan Kayu/Aneka Usaha Kehutanan (HHBK/AUK)

06.05 Pengendalian Perladangan

Naskah terkait Penentuan Lokasi; Pemupukan Lokasi; Pengelolaan Tanah; Pemindahan Penduduk; Pembuatan Sarana

07 Penelitian Dan Pengembangan Kehutanan

07.01 Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Kehutanan

Naskah terkait Perencanaan Program Penelitian : Penyusunan Rencana Anggaran Penelitian dan Pengembangan, Penyusunan Rencana Kegiatan Penelitian dan Pengembangan; Pelaksanaan Penelitian: Ijin Penelitian Data Penelitian, Data Mentah Hasil Penelitian, Hasil Penelitian, Analisis Hasil Penelitian, Laporan Hasil Penelitian

07.02 Monitoring dan Evaluasi Penelitian

Naskah terkait Monitoring Penelitian; Evaluasi Penelitian; Rekomendasi Penelitian

07.03 Diseminasi

Naskah terkait Gelar Teknologi; Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan

XIII. PI. PERINDUSTRIAN

00 Kebijakan

00.00 Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan

Naskah terkait Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan

00.01 Penyiapan Kebijakan

Naskah terkait Penyiapan Kebijakan

00.02 Perumusan dan Penyusunan Bahan

Naskah terkait Perumusan dan Penyusunan Bahan

00.03 Pemberian Masukan dan Dukungan dalam Penyusunan Kebijakan

Naskah terkait Pemberian Masukan dan Dukungan dalam Penyusunan Kebijakan

00.04 Penetapan dalam bentuk NSPK

Naskah terkait Penetapan dalam bentuk NSPK

01 Iklim Usaha dan Kerja Sama

01.00 Industri Manufaktur

Naskah terkait Industri Material Dasar Logam: Logam Besi, Logam Bukan Besi, Logam Lainnya

01.01 Industri Agro

Naskah terkait Industri Hasil Hutan dan Perkebunan; Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan; Industri Minuman dan Tembakau

01.02 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi

Naskah terkait Alat Transportasi Darat; Industri Maritime, Kedirgantaraan, dan Alat Pertahanan; Elektronika dan Telematika; Permesinan dan Alat Mesin Pertanian

01.03 Industri Kecil dan Menengah

Naskah terkait Industri Pangan, Kimia dan Bahan Bangunan; Industri Kerajinan dan Sandang; Industri Produk Logam, Alat Angkut dan Kreatif Telematika

02 Promosi Industri

02.00 Industri Manufaktur

Naskah terkait Industri Material Dasar Logam: Logam Besi, Logam Bukan Besi, Logam Lainnya

02.01 Industri Agro

Naskah terkait Industri Hasil Hutan dan Perkebunan; Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan; Industri Minuman dan Tembakau

02.02 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi

Naskah terkait Alat Transportasi Darat; Industri Maritime, Kedirgantaraan, dan Alat Pertahanan; Elektronika dan Telematika; Permesinan dan Alat Mesin Pertanian

02.03 Industri Kecil dan Menengah

Naskah terkait Industri Pangan, Kimia dan Bahan Bangunan; Industri Kerajinan dan Sandang; Industri Produk Logam, Alat Angkut dan Kreatif Telematika

03 Standarisasi dan Teknologi

03.00 Industri Manufaktur

Naskah terkait Industri Material Dasar Logam: Logam Besi, Logam Bukan Besi, Logam Lainnya

03.01 Industri Agro

Naskah terkait Industri Hasil Hutan dan Perkebunan; Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan; Industri Minuman dan Tembakau

- 03.02 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
Naskah terkait Alat Transportasi Darat; Industri Maritime, Kedirgantaraan, dan Alat Pertahanan; Elektronika dan Telematika; Permesinan dan Alat Mesin Pertanian
- 03.03 Industri Kecil dan Menengah
Naskah terkait Industri Pangan, Kimia dan Bahan Bangunan; Industri Kerajinan dan Sandang; Industri Produk Logam, Alat Angkut dan Kreatif Telematika

- 04 Hak Kekayaan Intelektual
- 04.00 Industri Manufaktur
Naskah terkait Industri Material Dasar Logam: Logam Besi, Logam Bukan Besi, Logam Lainnya
- 04.01 Industri Agro
Naskah terkait Industri Hasil Hutan dan Perkebunan; Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan; Industri Minuman dan Tembakau
- 04.02 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
Naskah terkait Alat Transportasi Darat; Industri Maritime, Kedirgantaraan, dan Alat Pertahanan; Elektronika dan Telematika; Permesinan dan Alat Mesin Pertanian
- 04.03 Industri Kecil dan Menengah
Naskah terkait Industri Pangan, Kimia dan Bahan Bangunan; Industri Kerajinan dan Sandang; Industri Produk Logam, Alat Angkut Dan Kreatif Telematika

- 05 Industri Hijau
- 05.00 Industri Manufaktur
Naskah terkait Industri Material Dasar Logam: Logam Besi, Logam Bukan Besi, Logam Lainnya
- 05.01 Industri Agro
Naskah terkait Industri Hasil Hutan dan Perkebunan; Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan; Industri Minuman dan Tembakau
- 05.02 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
Naskah terkait Alat Transportasi Darat; Industri Maritime, Kedirgantaraan, dan Alat Pertahanan; Elektronika dan Telematika; Permesinan dan Alat Mesin Pertanian
- 05.03 Industri Kecil dan Menengah
Naskah terkait Industri Pangan, Kimia dan Bahan Bangunan; Industri Kerajinan dan Sandang; Industri Produk Logam, Alat Angkut dan Kreatif Telematika

- 06 Analisis Industri Unggulan
Naskah terkait Kerjasama Industri Unggulan Provinsi Wilayah Industri I, II, III

- 07 Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Inti Industri (Provinsi dan Kota/Kabupaten)
Naskah terkait Analisis Kerja Sama Industri Unggulan Kota

- 08 Pengembangan Infrastruktur Pendukung
Naskah terkait Analisis Kerjasama Industri Unggulan Kota; Kawasan Industri Wilayah Industri I, II, III

- 09 Fasilitas Pengembangan Kawasan Industri
Naskah terkait Analisis Kerjasama Industri Unggulan Kota; Kawasan Industri Wilayah Industri I, II, III

- 10 Kerja Sama Industri Internasional
 - 10.00 Analisis Kerjasama Industri Unggulan Kota
Naskah terkait Analisis Kerja Sama Industri Unggulan Kota
 - 10.01 Kerja Sama Industri Internasional Wilayah Asia Timur, Asia Barat, Asia Selatan, Pasifik, Australia, Afrika, dan Fora Regional
Naskah terkait Kerja Sama Industri Internasional Wilayah Asia Timur, Asia Barat, Asia Selatan, Pasifik, Australia, Afrika, dan Fora Regional
 - 10.02 Ketahanan Industri
Naskah terkait Ketahanan Industri

- 11 Standarisasi
 - 11.00 Standar
Naskah terkait Standar Industri Manufaktur; Standar Industri Agro dan Teknologi Tinggi
 - 11.01 Penyiapan Penerapan
Naskah terkait Penyiapan Penerapan Standar; Kerja Sama Standarisasi
 - 11.02 Infrastruktur Standar
Naskah terkait Infrastruktur Standar; Pengawasan Lembaga Penilaian Kesuaian

- 12 Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri
 - 12.00 Kebijakan Industri
Naskah terkait Kebijakan Sektoral; Kebijakan Kewilayahan
 - 12.01 Perpajakan dan Tarif
Naskah terkait Perpajakan; Tarif dan Non Tarif
 - 12.02 Pengembangan Model Industrial
Naskah terkait Pemrograman Model; Aplikasi Model

- 13 Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup
 - 13.00 Industri Hijau
Naskah terkait Pengembangan Industri Hijau; Kerja Sama Industri Hijau
 - 13.01 Lingkungan Hidup
Naskah terkait Lingkungan Global; Pengendalian Lingkungan Hidup
 - 13.02 Energi
Naskah terkait Konservasi Energi; Diversifikasi Energi

- 14 Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual
 - 14.00 Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri
Naskah terkait Pengkajian Kebijakan Teknologi Industri; Penerapan Kebijakan Teknologi Industri
 - 14.01 Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri
Naskah terkait Pengkajian Inovasi Teknologi Industri; Pengkajian Inovasi Teknologi Industri
 - 14.02 Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual
Naskah terkait Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual; Komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual

XIV. KP. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

00 Kebijakan

- 00.00 Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan
Naskah terkait Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan
- 00.01 Penyiapan Kebijakan
Naskah terkait Penyiapan Kebijakan
- 00.02 Perumusan Kebijakan
Naskah terkait Perumusan Kebijakan
- 00.03 Masukan dan Dukungan Kebijakan
Naskah terkait Masukan dan Dukungan Kebijakan
- 00.04 Penetapan NSPK
Naskah Terkait Penetapan NSPK

01 Pengendalian Penduduk

- 01.00 Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk
Naskah terkait Analisis Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk;
Fasilitas Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk;
- 01.01 Perencanaan Pengendalian Penduduk
Naskah Terkait Profil dan Proyeksi Penduduk; Penetapan Parameter
Pengendalian Penduduk; Pemanfaatan Perencanaan Pengendalian
Penduduk
- 01.02 Kerja Sama Pendidikan Kependudukan
Naskah terkait Pengembangan Sistem; Pengembangan Materi;
Monitoring dan Evaluasi
- 01.03 Analisis Dampak Kependudukan
Naskah Terkait Analisis Sosial; Analisis Ekonomi; Analisis Dampak
Politik, Pertahanan Dan Keamanan; Analisis Daya Dukung Dan Daya
Tampung Lingkungan

02 Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

- 02.00 Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Pemerintah
Naskah terkait Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik
Pemerintah; Jaminan Pelayanan dan Penyediaan Sarana Keluarga
Berencana; Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Pemerintah
- 02.01 Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Swasta
Naskah terkait Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik
Swasta; Jaminan dan Ketersediaan Sarana Keluarga Berencana Swasta;
Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Swasta
- 02.02 Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus
Naskah terkait Akses dan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Jalur
Wilayah Tertinggal, Terpencil dan Perbatasan; Akses dan Kualitas
Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Miskin Perkotaan; Kesertaan
Keluarga Berencana Pria
- 02.03 Kesehatan Reproduksi
Naskah terkait Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi, dan Anak; Pencegahan
PMS dan HIV/AIDS; Pencegahan Kanker Alat Reproduksi dan
Penanggulangan Infertilitas

03 Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga

- 03.00 Bina Keluarga Balita dan Anak
Naskah terkait Pelembagaan Bina Keluarga Balita dan Anak; Monitoring
dan Evaluasi Bina Keluarga Balita dan Anak
- 03.01 Bina Ketahanan Remaja
Naskah terkait Pelembagaan Bina Ketahanan Remaja; Monitoring dan
Evaluasi Bina Ketahanan Remaja

- 03.02 Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
Naskah terkait Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan; Pelembagaan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan; Monitoring dan Evaluasi Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
 - 03.03 Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
Naskah terkait Pengembangan Program Usaha Ekonomi Keluarga; Peningkatan Teknologi dan Permodalan Usaha Ekonomi Keluarga; Peningkatan Manajemen Usaha Ekonomi Keluarga; Monitoring dan Evaluasi Usaha Ekonomi Keluarga
 - 03.04 Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
Naskah terkait Pengembangan Program Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera; Pelembagaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera; Monitoring dan Evaluasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
- 04 Advokasi dan Informasi
- 04.00 Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi
Naskah terkait Pengembangan Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi; Advokasi dan Pencitraan; Komunikasi, Informasi dan Edukasi
 - 04.01 Bina Hubungan Antar Lembaga
Naskah terkait Hubungan dengan Lembaga Pemerintah Pusat dan Provinsi; Hubungan dengan Lembaga Pemerintah Kabupaten dan Kota; Hubungan dengan Lembaga Non Pemerintah
 - 04.02 Bina Lini Lapangan
Naskah terkait Tenaga Lini Lapangan; Institusi Masyarakat Perkotaan; Mekanisme Operasional Lini Lapangan
 - 04.03 Pelaporan dan Statistik
Naskah Terkait Pengembangan Sistem Pencatatan dan Pelaporan; Pengumpulan dan Pengolahan Data; Analisis Dan Evaluasi
 - 04.04 Teknologi Informasi dan Dokumentasi
Naskah terkait Sistem Aplikasi dan Bank Data; Infrastruktur Teknologi Informasi; Dokumentasi dan Penyebarluasan Informasi

XV. KU. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

00 Kebijakan

- 00.00 Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan
Naskah terkait Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan
- 00.01 Penyiapan Kebijakan
Naskah terkait Penyiapan Kebijakan
- 00.02 Perumusan Kebijakan
Naskah terkait Perumusan Kebijakan
- 00.03 Pemberian Masukan dan Dukungan Kebijakan
Naskah terkait Pemberian Masukan dan Dukungan Kebijakan
- 00.04 Penetapan dalam bentuk NSPK
Naskah terkait Penetapan Dalam Bentuk NSPK

01 Monitoring dan Evaluasi

- 01.00 Kelembagaan Koperasi dan UKM
Naskah terkait Kelembagaan Koperasi dan UKM
- 01.01 Peraturan Perundang-Undangan
Naskah terkait Peraturan Perundang-Undangan
- 01.02 Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan
Naskah terkait Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan
- 01.03 Tatalaksana Koperasi dan UKM
Naskah terkait Tatalaksana Koperasi dan UKM
- 01.04 Pengendalian dan Akuntabilitas
Naskah terkait Pengendalian dan Akuntabilitas

02 Produksi

- 02.00 Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Naskah terkait Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
- 02.01 Hortikultura
Naskah terkait Hortikultura
- 02.02 Sarana
Naskah terkait Sarana
- 02.03 Kehutanan dan Perkebunan
Naskah terkait Kehutanan dan Perkebunan
- 02.04 Sarana
Naskah terkait Sarana
- 02.05 Perikanan dan Peternakan
Naskah terkait Perikanan dan Peternakan
- 02.06 Peternakan
Naskah terkait Peternakan
- 02.07 Sarana
Naskah terkait Sarana
- 02.08 Industri Kerajinan dan Pertambangan
Naskah terkait Industri Kerajinan dan Pertambangan
- 02.09 Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha
Naskah terkait Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha

03 Pembiayaan

- 03.00 Program Pendanaan
Naskah terkait Program Pendanaan
- 03.01 Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam
Naskah terkait Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam
- 03.02 Urusan Permodalan
Naskah terkait Urusan Permodalan

- 03.03 Asuransi dan Jasa Keuangan
Naskah terkait Asuransi dan Jasa Keuangan
- 03.04 Pembiayaan dan Penjaminan Kredit
Naskah terkait Pembiayaan dan Penjaminan Kredit
- 03.05 Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM (LPDB)
Naskah terkait Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM (LPDB)

- 04 Pemasaran dan Jaringan Usaha
- 04.00 Perdagangan Dalam Negeri
Naskah terkait Pengadaan; Distribusi; Pengembangan
- 04.01 Ekspor dan Impor
Naskah terkait Ekspor; Impor; Hubungan Perdagangan Internasional
- 04.02 Sarana dan Prasarana Pemasaran
Naskah terkait Sarana; Prasarana; Pengembangan Potensi Pemasaran
- 04.03 Kemitraan dan Jaringan Usaha
Naskah terkait Kemitraan; Jaringan Usaha; Pengembangan Kerjasama Kelembagaan
- 04.04 Informasi dan Publikasi Bisnis
Naskah terkait Pengumpulan Informasi; Pengolahan Informasi; Publikasi dan Promosi
- 04.05 Lembaga Layanan Pemasaran LLP Koperasi dan UKM
Naskah terkait Lembaga Layanan Pemasaran LLP Koperasi dan UKM

- 05 Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 05.00 Pengembangan Kewirausahaan
Naskah terkait Lembaga Kewirausahaan; Penumbuhan Kewirausahaan; Sosialisasi Kewirausahaan
- 05.01 Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM
Naskah terkait Diklat Formal dan Informal; Diklat Non Formal; Kerjasama Lembaga Diklat
- 05.02 Peran Serta Masyarakat
Naskah terkait Peningkatan Dukungan Media Massa terhadap Koperasi dan UKM; Peningkatan Dukungan LSM Terhadap Koperasi dan UKM; Peningkatan Dukungan Organisasi Profesi
- 05.03 Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM
Naskah terkait Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM; Monitoring dan Evaluasi Diklat Formal dan Informal; Monitoring dan Evaluasi Lembaga Diklat
- 05.04 Advokasi
Naskah terkait Advokasi Organisasi dan Manajemen; Advokasi Kemitraan dan Teknologi; Advokasi Peraturan Perundang-Undangan

- 06 Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha
- 06.00 Produktifitas dan Mutu
Naskah terkait Produktifitas; Peningkatan Mutu; Sertifikasi Produk
- 06.01 Restrukturisasi Usaha
Naskah terkait Restrukturisasi Manajemen; Restrukturisasi Pendanaan; Restrukturisasi Kelembagaan
- 06.02 Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB)
Naskah terkait Kelembagaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB); Pengembangan Bisnis LPB; Pengembangan Jaringan LPB
- 06.03 Fasilitasi Investasi UKMK
Naskah terkait Investasi Klaster UKMK; Pengembangan Kerjasama Investasi Usaha; Fasilitas Investasi Aneka Usaha UKMK

- 06.04 Pengembangan Sistem Bisnis
Naskah terkait Fasilitasi Transaksi; Kerjasama Usaha; Jaringan Komunikasi Bisnis

- 07 Pengkajian Sumber Daya KUMK
 - 07.00 Penelitian Koperasi
Naskah terkait Perencanaan dan Pengendalian; Penyelenggaraan; Tata Laksana Penelitian;
 - 07.01 Penelitian UKM
Naskah terkait Perencanaan dan Pengendalian; Penyelenggaraan; Tata Laksana Penelitian
 - 07.02 Penelitian Sumber Daya
Naskah terkait Perencanaan dan Pengendalian; Penyelenggaraan; Tata Laksana Penelitian
 - 07.03 Pengembangan Perkaderan UMK
Naskah terkait Penyuluhan; Perkaderan; Kerja Sama dan Jaringan

- 08 Kerja Sama Internasional dan Hubungan Antar Lembaga
 - 08.00 Peraturan Perundang-Undangan
Naskah terkait Peraturan Perundang-Undangan
 - 08.01 Sarana dan Prasarana
Naskah terkait Sarana dan Prasarana
 - 08.02 Monitoring dan Evaluasi PKL
Naskah terkait Monitoring dan Evaluasi PKL

XVI. KS. KESEHATAN

00 Kebijakan

00.00 Penetapan Kebijakan Bidang Kesehatan

Naskah terkait Penetapan kebijakan Bidang Kesehatan

00.01 Memorandum of Understanding (MoU)

Naskah terkait Memorandum of Understanding (MoU)

01 Upaya Kesehatan

01.00 Upaya Kesehatan Dasar

Naskah terkait Pelayanan Kedokteran Keluarga; Praktek Klinis Dokter di Yankes Primer; Pelaksanaan Kesehatan Primer; Kesehatan Gigi dan Mulut di Puskesmas; Transfusi Darah; Akreditasi Puskesmas; Puskesmas Berprestasi

01.01 Upaya Kesehatan Rujukan

Naskah terkait Pelayanan Kesehatan Rujukan; Pelayanan Kedokteran, Organisasi profesi; Pelayanan Rumah Sakit Privat; Pelayanan Kesehatan RS Khusus, Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya; Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Pendidikan; Pelayanan Pasien Jaminan Kesehatan; Badan Pengawas Rumah Sakit; Perizinan dan Penetapan Kelas Rumah Sakit; Akreditasi Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Lainnya

01.02 Keperawatan dan Keteknisian Medik

Naskah terkait Pelayanan Keperawatan Dasar; Pelayanan Keperawatan Lanjutan; Pelayanan Kebidanan

01.03 Penunjang Medik Sarana Kesehatan

Naskah terkait Mikrobiologi dan Imunologi; Patologi dan Toksikologi; Radiologi; Perizinan dan Sertifikasi; Sarana dan Prasarana Kesehatan; Perawatan Medis dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan; Aplikasi Sarana Ddan Prasarana Kesehatan

01.04 Kesehatan Jiwa

Naskah terkait Kesehatan Jiwa Non Fasilitas Pelayanan Kesehatan; Kesehatan Jiwa Fasilitas Pelayanan Kesehatan; Pencegahan dan Penanggulangan Narkotika dan Sejenisnya; Etikolegal dan Assesment; Kesehatan Jiwa Kelompok Beresiko

02 Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

02.00 Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra

Naskah terkait Surveilans dan Respon Kejadian Luar Biasa; Imunisasi; Karantina Kesehatan dan Kesehatan di Pelabuhan; Kesehatan Matra

02.01 Pengendalian Penyakit Menular Langsung

Naskah terkait Pengendalian AIDS dan Penyakit Menular Seksual; Pengendalian Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA); Pengendalian Diare dan Infeksi Saluran Pencernaan; Pengendalian Kusta dan Frambusia

02.02 Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang

Naskah terkait Pengendalian Malaria; Pengendalian Arbovirosis; Pengendalian Zoonosis; Pengendalian Filariasis dan Kecacingan

02.03 Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Naskah terkait Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah; Penyakit Kanker; Penyakit Kronis dan Generatif; Gangguan Akibat Kecelakaan dan Tindak Kekerasan

02.04 Penyehatan Lingkungan

Naskah terkait Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar; Pemukiman dan Tempat Umum; Kawasan dan Sanitasi Darurat; Higiene Sanitasi Pangan; Pengamanan Limbah, Udara, Radiasi

- 02.05 Pengembangan dan Penapisan Teknologi Pengendalian Penyakit dan Pengendalian Lingkungan
Naskah terkait Pengembangan dan Teknologi Laboratorium Bidang Kesehatan
- 02.06 Sertifikasi Kesehatan dan Pengujian Kesehatan
Naskah terkait Sertifikasi Kesehatan dan Pengujian Kesehatan
- 02.07 Penelitian Penyakit Menular
Naskah terkait Penelitian Penyakit Menular

- 03 Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
 - 03.00 Gizi
Naskah terkait Gizi Makro dan Mikro; Gizi Klinik dan Dietetik
 - 03.01 Kesehatan Ibu
Naskah terkait Kesehatan Ibu Hamil; Kesehatan Ibu Bersalin dan Nifas; Kesehatan Maternal Dengan Pencegahan Komplikasi; Keluarga Berencana; Perlindungan Kesehatan Reproduksi
 - 03.02 Kesehatan Anak
Naskah terkait Kelangsungan Hidup Bayi; Kelangsungan Anak Balita dan Pra Sekolah; Kewaspadaan Penanganan Balita Beresiko; Kualitas Hidup Anak Usia Sekolah dan Remaja; Perlindungan Kesehatan Anak
 - 03.03 Kesehatan Tradisional Alternatif dan Komplementer
Naskah terkait Kesehatan Tradisional Keterampilan; Kesehatan Tradisional Ramuan; Kesehatan Alternatif; Penapisan dan Kemitraan
 - 03.04 Kesehatan Kerja dan Olah Raga
Naskah terkait Pelayanan Kesehatan Kerja; Lingkungan Kerja; Kemitraan Kesehatan Kerja; Kesehatan Perkotaan; Kesehatan Olahraga

- 04 Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 - 04.00 Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
Naskah terkait Harga Obat Publik; Pengadaan Obat; Perbekalan Kesehatan
 - 04.01 Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan
Naskah terkait Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan
 - 04.02 Kefarmasian
Naskah Terkait Pelayanan Kefarmasian; Farmasi Klinis

- 05 SDM Kesehatan
 - 05.00 Dokter
Naskah terkait Tenaga Dokter
 - 05.01 Apoteker
Naskah terkait Tenaga Apoteker
 - 05.02 Perawat
Naskah terkait Tenaga Perawat
 - 05.03 Bidan
Naskah terkait Tenaga Bidan
 - 05.04 Ahli Gizi
Naskah terkait Tenaga Ahli Gizi
 - 05.05 Analisis Laboratorium
Naskah terkait Analisis Laboratorium
 - 05.06 Penata Rontgent
Naskah terkait Penata Rontgent
 - 05.07 Tenaga Kesehatan Lainnya
Naskah terkait Tenaga Kesehatan Lainnya
 - 05.08 Poliklinik (Rawat Jalan)
Naskah terkait Poliklinik Umum; Bedah; Kandungan; dsb.

05.09 Rawat Inap

Naskah terkait Rawat Inap

05.10 Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan

Naskah terkait Pembangunan Rumah Sakit; Pembangunan Puskesmas;
Pembangunan sarana kesehatan lainnya

XVII. KT. KETENAGAKERJAAN

00 Kebijakan

- 00.00 Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan
Naskah terkait Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan
- 00.01 Penyiapan Kebijakan
Naskah terkait Penyiapan Kebijakan
- 00.02 Perumusan Kebijakan
Naskah terkait Perumusan Kebijakan
- 00.03 Masukan dan Dukungan Kebijakan
Naskah terkait Masukan dan Dukungan Kebijakan
- 00.04 Penetapan NSPK
Naskah terkait Penetapan NSPK

01 Perencanaan Tenaga Kerja

- 01.00 Perencanaan Tenaga Kerja Makro
Naskah terkait Perencanaan Tenaga Kerja Makro
- 01.01 Perencanaan Tenaga Kerja Mikro
Naskah terkait Perencanaan Tenaga Kerja Mikro

02 Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja

- 02.00 Pengembangan Pasar Kerja
Naskah terkait Pengembangan Pasar Kerja
- 02.01 Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri
Naskah terkait Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri
- 02.02 Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri
Naskah terkait Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri
- 02.03 Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal
Naskah terkait Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal

03 Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

- 03.00 Persyaratan Kerja, dan Kesejahteraan Pekerja
Naskah terkait Persyaratan Kerja, dan Kesejahteraan Pekerja
- 03.01 Kelembagaan dan Pemasarakatan Hubungan Industrial
Naskah terkait Kelembagaan dan Pemasarakatan Hubungan Industrial
- 03.02 Pelaksanaan Penetapan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta
Naskah terkait Pelaksanaan Penetapan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta
- 03.03 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Naskah terkait Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

04 Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan

- 04.00 Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Naskah terkait Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- 04.01 Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak
Naskah terkait Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak
- 04.02 Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Naskah terkait Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- 04.03 Laporan Hasil Pengawasan Ketenagakerjaan
Naskah terkait Laporan Hasil Pengawasan Ketenagakerjaan
- 04.04 Bina Penegakan Hukum
Naskah terkait Bina Penegakan Hukum

05 Keselamatan dan Kesehatan Kerja

05.00 Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Naskah terkait Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

05.01 Pengembangan SDM dan Kompetensi K3

Naskah terkait Pengembangan SDM dan Kompetensi K3

05.02 Kompetensi K3

Naskah terkait Kompetensi K3

XVIII. TR. TRANSMIGRASI

00 Kebijakan

- 00.00 Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan
Naskah terkait Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan
- 00.01 Penyiapan Kebijakan
Naskah terkait Penyiapan Kebijakan
- 00.02 Perumusan Kebijakan
Naskah terkait Perumusan Kebijakan
- 00.03 Masukan dan Dukungan Kebijakan
Naskah terkait Masukan dan Dukungan Kebijakan
- 00.04 Penetapan NSPK
Naskah terkait Penyiapan Kebijakan

01 Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi

- 01.00 Perencanaan Teknis
Naskah terkait Perencanaan Kawasan Pengembangan; Perencanaan Permukiman; Perencanaan Sarana dan Prasarana Kawasan; Perencanaan Pengembangan Masyarakat
- 01.01 Penyediaan Tanah Transmigrasi
Naskah terkait Fasilitasi Pencadangan Tanah; Identifikasi dan Penataan Tanah; Pengelolaan Tanah; Dokumentasi Penyediaan Tanah
- 01.02 Pembangunan Permukiman Transmigrasi
Naskah terkait Penyiapan dan Evaluasi Lahan Permukiman; Penyiapan dan Evaluasi Sarana Permukiman; Penyiapan dan Evaluasi Prasarana Permukiman; Kelayakan Permukiman
- 01.03 Bina Potensi Kawasan Transmigrasi
Naskah terkait Identifikasi dan Informasi Potensi Kawasan; Advokasi Kawasan; Perencanaan Kawasan; Fasilitasi Penetapan Kawasan; Mediasi dan Kerja Sama Antar Daerah
- 01.04 Penataan Persebaran Penduduk
Naskah terkait Penyiapan Perpindahan; Penyiapan Calon Transmigran dan Penduduk Setempat; Pelayanan Perpindahan; Penataan dan Adaptasi

02 Pembinaan Pengembangan Masyarakat Dan Kawasan Transmigrasi

- 02.00 Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan
Naskah terkait Bina Sistem Informasi; Sistem Informasi Permukiman; Sistem Informasi Kawasan
- 02.01 Perencanaan Pengembangan Kawasan
Naskah terkait Penataan Ruang dan Infrastruktur Kawasan; Pengembangan Sosial dan Ekonomi
- 02.02 Perencanaan Pengembangan Masyarakat
Naskah terkait Pengembangan Usaha Ekonomi; Pengembangan Sosial Budaya
- 02.03 Perencanaan Pengembangan Pusat Pertumbuhan
Naskah terkait Penataan Ruang dan Infrastruktur Pusat Pertumbuhan; Pengelolaan Kelembagaan Sosial dan Ekonomi

03 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat

- 03.00 Bantuan Pangan dan Kesehatan
Naskah terkait Penyediaan Bantuan Pangan; Bantuan Pangan dan Kesehatan; Penyediaan Bantuan Kesehatan
- 03.01 Fasilitas Sosial Budaya
Naskah terkait Pendidikan dan Seni Budaya; Mental Spiritual

- 03.02 Pengembangan Kelembagaan
Naskah terkait Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat; Pengembangan Partisipasi Masyarakat Kawasan Transmigrasi
- 03.03 Bina Pendampingan Masyarakat Transmigrasi
Naskah terkait Penyediaan Tenaga Pendamping Non PNS; Bimbingan Teknis Tenaga Pendamping Non PNS
- 03.04 Promosi dan Kemitraan
Naskah terkait Promosi dan Publikasi; Kemitraan Badan Usaha; Kemitraan Masyarakat; Kemitraan Kelembagaan Pemerintah
- 03.05 Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi
Naskah terkait Pembangunan dan Pengembangan Sarana Permukiman dan Kawasan; Pembangunan dan Pengembangan Prasarana Permukiman dan Kawasan; Penyerasian Lingkungan; Evaluasi Perkembangan Permukiman dan Kawasan; Standardisasi Sarana dan Prasarana
- 03.06 Pengembangan Usaha Transmigrasi
Naskah terkait Kewirausahaan; Produksi; Pengolahan hasil dan pemasaran; Lembaga ekonomi dan permodalan
- 03.07 Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi
Naskah terkait Pangan dan Kesehatan; Fasilitasi Pendidikan; Fasilitasi Mental Spiritual dan Seni Budaya; Bina Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat
- 03.08 Pelayanan Pertanahan Transmigrasi
Naskah terkait Pengukuran Bidang Tanah; Pengurusan Hak atas Tanah; Advokasi Pertanahan; Dokumentasi dan Pelayanan Informasi Pertanahan Transmigrasi : 1) Pengolahan Data, 2) Database Pengolahan Transmigrasi, 3) Penyajian Informasi dan Pelaporan

XIX. LH. LINGKUNGAN HIDUP

00 Kebijakan

00.00 Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan

Naskah terkait Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan

00.01 Penyiapan Bahan

Naskah terkait Penyiapan Bahan

00.02 Pemberian Masukan dan Dukungan dalam Penyusunan Kebijakan

Naskah terkait Pemberian Masukan dan Dukungan dalam Penyusunan Kebijakan

00.03 Pengumpulan Pengolahan Data

Naskah terkait Pengumpulan dan Pengolahan Data

00.04 Penetapan Dalam Bentuk Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria

Naskah terkait Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria

01 Tata Lingkungan

01.00 Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Naskah terkait Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

01.01 Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sektor

Naskah terkait Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sektor

01.02 Ekonomi Lingkungan

Naskah terkait Ekonomi Lingkungan

01.03 Dampak Lingkungan

Naskah terkait Dampak Lingkungan

02 Pengendalian Pencemaran Lingkungan

02.00 Pemantauan dan Pengawasan

Naskah terkait Pemantauan dan Pengawasan

02.01 Evaluasi dan Pengembangan

Naskah terkait Evaluasi dan Pengembangan

03 Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim

03.00 Keanekaragaman Hayati dan Pengendalian Kerusakan Lahan

Naskah terkait Keanekaragaman Hayati dan Pengendalian Kerusakan Lahan

03.01 Kerusakan Ekosistem Perairan Darat

Naskah terkait Kerusakan Ekosistem Perairan Darat

03.02 Pengendalian Kerusakan Pesisir dan Laut

Naskah terkait Pengendalian Kerusakan Pesisir dan Laut

03.03 Mitigasi dan Pelestarian Fungsi Atmosfer

Naskah terkait Mitigasi dan Pelestarian Fungsi Atmosfer

00.04 Adaptasi Perubahan Iklim

Naskah terkait Adaptasi Perubahan Iklim

04 Pengelolaan B3, Limbah, dan Sampah

04.00 Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun

Naskah terkait Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun

04.01 Verifikasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Naskah terkait Verifikasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

04.02 Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3

Naskah terkait Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3

04.03 Pengelolaan Sampah

Naskah terkait Pengelolaan Sampah

05 Hukum Lingkungan

05.00 Hukum Administrasi Lingkungan

Naskah terkait Hukum Administrasi Lingkungan

05.01 Penyelesaian Sengketa Lingkungan

Naskah terkait Penyelesaian Sengketa Lingkungan

05.02 Penegakan Hukum Pidana Lingkungan

Naskah terkait Penegakan Hukum Pidana Lingkungan

05.03 Perjanjian Internasional Lingkungan

Naskah terkait Perjanjian Internasional Lingkungan

06 Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat

06.00 Komunikasi Lingkungan

Naskah terkait Komunikasi Lingkungan

06.01 Penguatan Inisiatif Masyarakat

Naskah terkait Penguatan Inisiatif Masyarakat

06.02 Peningkatan Peran Masyarakat

Naskah terkait Peningkatan Peran Masyarakat

06.03 Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan

Naskah terkait Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan

07 Pembinaan Sarana Teknis Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas

07.00 Data dan Informasi Lingkungan

Naskah terkait Data dan Informasi Lingkungan

07.01 Kelembagaan Lingkungan

Naskah terkait Kelembagaan Lingkungan

07.02 Standarisasi dan Teknologi

Naskah terkait Standarisasi dan Teknologi

07.03 Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan

Naskah terkait Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan

08 Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

08.00 Penyuluhan

Naskah terkait Penyuluhan

08.01 Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Naskah terkait Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

09 Pengelolaan Kebersihan

09.00 Perencanaan Pengelolaan Kebersihan

Naskah terkait Perencanaan Pengelolaan Kebersihan

09.01 Penyelenggaraan Pengelolaan Kebersihan

Naskah terkait Penyelenggaraan Pengelolaan Kebersihan

09.02 Pengelolaan Sistem Informasi Kebersihan

Naskah terkait Pengelolaan Sistem Informasi Kebersihan

09.03 Pengembangan Teknologi Persampahan

Naskah terkait Pengembangan teknologi persampahan

09.04 Pendidikan, Pelatihan, Bimbingan Teknis, Konsultasi, dan Sosialisasi Kebersihan

Naskah terkait Pendidikan, Pelatihan, Bimbingan Teknis, Konsultasi, dan Sosialisasi Kebersihan

09.05 Pengelolaan Limbah B3 Rumah Tangga

Naskah terkait Pengelolaan Limbah B3 Rumah Tangga

09.06 Pengelolaan Sampah

Naskah terkait Pengelolaan Sampah

09.07 Pengelolaan Kebersihan

Naskah terkait Pengelolaan Kebersihan

- 09.08 Pelayanan Toilet Berjalan untuk penanganan Event-event di Provinsi DKI Jakarta
Naskah terkait Pelayanan Toilet Berjalan untuk penanganan Event-event di Provinsi DKI Jakarta nyuluhan
- 09.09 Bantuan Angkutan Sampah Dinas
Naskah terkait Bantuan Angkutan Sampah Dinas
- 10 Pengelolaan Sampah Terpadu
- 10.00 Kerjasama dengan SKPD/UKPD dan Instansi terkait Pengelolaan dan/atau Pengolahan Sampah Terpadu
Naskah terkait Kerjasama dengan SKPD/UKPD dan Instansi terkait Pengelolaan dan/atau Pengolahan Sampah Terpadu
- 10.01 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan dan/atau Pengolahan Sampah Terpadu dengan SKPD /UKPD dan Instansi terkait
Naskah terkait Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan dan/atau Pengolahan Sampah Terpadu dengan SKPD /UKPD dan Instansi terkait
- 10.02 Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dan/atau Pengolahan Sampah Terpadu
Naskah terkait Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dan/atau Pengolahan Sampah Terpadu
- 10.03 Pelaporan dan Pertanggungjawaban Retribusi Sampah pada Area Pengelolaan dan/atau Pengolahan Sampah Terpadu
Naskah terkait Pelaporan dan Pertanggungjawaban Retribusi Sampah pada Area Pengelolaan dan/atau Pengolahan Sampah Terpadu
- 10.04 Data Wajib Retribusi Sampah pada Area Pengelolaan dan/atau Pengolahan Sampah Terpadu
Naskah terkait Data Wajib Retribusi Sampah pada Area Pengelolaan dan/atau Pengolahan Sampah Terpadu
- 11 Pengelolaan Kawasan Mandiri
- 11.00 Kerjasama dengan SKPD/UKPD dan Instansi terkait Pengelolaan Kawasan Mandiri
Naskah terkait Kerjasama dengan SKPD/UKPD dan Instansi terkait Pengelolaan Kawasan Mandiri
- 11.01 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Kawasan Mandiri dengan SKPD /UKPD dan Instansi terkait
Naskah terkait Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Kawasan Mandiri dengan SKPD /UKPD dan Instansi terkait
- 11.02 Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Mandiri dan Instansi Pemerintah dan/atau Swasta
Naskah terkait Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Mandiri dan Instansi Pemerintah dan/atau Swasta
- 11.03 Penerimaan, Pemungutan, Penatausahaan, Penyetoran, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Retribusi Sampah pada Area Pengelolaan Kawasan Mandiri
Naskah terkait Penerimaan, Pemungutan, Penatausahaan, Penyetoran, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Retribusi Sampah pada Area Pengelolaan Kawasan Mandiri
- 11.04 Data Wajib Retribusi Sampah Pada Area Kawasan Mandiri
Naskah terkait Data Wajib Retribusi Sampah pada Area Kawasan Mandiri
- 12 Penyelenggaraan ITF
- 12.00 Dokumen Perjanjian Kerjasama ITF
Naskah terkait Dokumen Perjanjian Kerjasama ITF

- 12.01 Dokumen Penawaran Teknologi Pengolahan Sampah
Naskah terkait Dokumen Penawaran Teknologi Pengolahan Sampah
 - 12.02 Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Jasa Pendampingan Penyelenggaraan ITF
Naskah terkait Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Jasa Pendampingan Penyelenggaraan ITF
 - 12.03 Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan ITF dengan SKPD/UKPD dan Instansi terkait
Naskah terkait Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan ITF dengan SKPD/UKPD dan Instansi terkait
 - 12.04 Kerjasama dengan SKPD/UKPD dan Instansi terkait Penyelenggaraan ITF
Naskah terkait Kerjasama dengan SKPD/UKPD dan Instansi terkait Penyelenggaraan ITF
 - 12.05 Pelaksanaan Koordinasi dan Kerjasama dengan SKPD/UKPD dan Instansi terkait dalam rangka Pelaksanaan Pengelolaan dan/atau Pengolahan Sampah Terpadu
Naskah terkait Pelaksanaan Koordinasi dan Kerjasama dengan SKPD/UKPD dan Instansi terkait dalam rangka Pelaksanaan Pengelolaan dan/atau Pengolahan Sampah Terpadu
 - 12.06 Penyusunan Pedoman, Standar dan Prosedur Teknis Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air
Naskah terkait Penyusunan Pedoman, Standar dan Prosedur Teknis Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air
 - 12.07 Sistem Informasi dan Teknologi Informasi Pengelolaan Sampah Badan Air
Naskah terkait Sistem Informasi dan Teknologi Informasi Pengelolaan Sampah Badan Air
 - 12.08 Penyediaan Prasarana dan Sarana Kerja Teknis Kebersihan
Naskah terkait Penyediaan Prasarana dan Sarana Kerja Teknis Kebersihan
 - 12.09 Pemeliharaan dan Perawatan Prasarana dan Sarana Kerja Teknis Kebersihan
Naskah terkait Pemeliharaan dan Perawatan Prasarana dan Sarana Kerja Teknis Kebersihan
 - 12.10 Publikasi Kegiatan dan Pengaturan Acara Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air
Naskah terkait Publikasi kegiatan dan pengaturan acara Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air
- 13 Pengawasan Saluran PHB dan Buih di Badan Air
 - 13.00 Laporan Hasil Penanganan Saluran PHB
Naskah terkait Laporan Hasil Penanganan Saluran PHB
 - 13.01 Laporan Pengawasan Buih di UPK Badan Air
Naskah terkait Laporan Pengawasan Buih di UPK Badan Air
 - 13.02 Laporan Hasil Penanganan Buih di UPK Badan Air
Naskah terkait Laporan Hasil Penanganan Buih di UPK Badan Air
- 14 Penanganan Sampah di Badan Air
 - 14.00 Surat Tugas Penanganan Sampah di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat
Naskah terkait Surat Tugas Penanganan Sampah di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat

- 14.01 Surat Tugas Penanganan Sampah di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara
Naskah terkait Surat Tugas Penanganan Sampah di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara
- 14.02 Surat Tugas Penanganan Sampah di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat
Naskah terkait Surat Tugas Penanganan Sampah di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat
- 14.03 Surat Tugas Penanganan Sampah di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan
Naskah terkait Surat Tugas Penanganan Sampah di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan
- 14.04 Surat Tugas Penanganan Sampah di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur
Naskah terkait Surat Tugas Penanganan Sampah di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur
- 14.05 Kerjasama Dengan SKPD/UKPD Dan Instansi Terkait Pengelolaan Pengelolaan Sampah Badan Air
Naskah Terkait Kerjasama Dengan SKPD/UKPD Dan Instansi Terkait Pengelolaan Pengelolaan Sampah Badan Air
- 14.06 Pengawasan Dan Pengendalian Pengelolaan Dengan SKPD /UKPD Dan Instansi Terkait
Naskah Terkait Pengawasan Dan Pengendalian Pengelolaan Dengan SKPD /UKPD Dan Instansi Terkait
- 14.07 Laporan Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Sampah Badan Air
Naskah Terkait Laporan Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Sampah Badan Air

XX. LI. KELAUTAN DAN PERIKANAN

00 Kebijakan

00.00 Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan

Naskah terkait Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan

00.01 Penyiapan Bahan

Naskah terkait Penyiapan Bahan

00.02 Perumusan Kebijakan

Naskah terkait Perumusan Kebijakan

00.03 Pemberian Masukan dan Dukungan dalam Penyusunan Kebijakan

Naskah terkait Pemberian Masukan dan Dukungan Dalam Penyusunan Kebijakan

00.04 Penetapan Kebijakan

Naskah terkait Penetapan Kebijakan

01 Perikanan Tangkap

01.00 Sumber Daya Ikan

Naskah terkait Data dan Statistik Perikanan Tangkap; Sumberdaya Ikan Perairan Umum; Sumberdaya Ikan laut Teritorial dan Perairan Kepulauan; Sumber daya ikan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Laut Lepas; Evaluasi Pengelolaan Sumberdaya Ikan

01.01 Pendaftaran Kapal Perikanan

Naskah terkait Pendaftaran Kapal Perikanan

01.02 Pengawakan Kapal dan Ketenagakerjaan Perikanan

Naskah terkait Pengawakan Kapal dan Ketenagakerjaan Perikanan

01.03 Pemantuan dan Evaluasi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Naskah terkait Pemantuan dan Evaluasi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

01.04 Alokasi Usaha Penangkapan Ikan

Naskah terkait Alokasi Usaha Penangkapan Ikan

01.05 Tata Pengusahaan Penangkapan Ikan

Naskah terkait Tata Pengusahaan Penangkapan Ikan

01.06 Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan

Naskah terkait Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan

01.07 Pelayanan Dokumen Penangkapan Ikan

Naskah terkait Pelayanan Dokumen Penangkapan Ikan

01.08 Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan

Naskah terkait Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan

01.09 Kelembagaan Usaha Penangkapan

Naskah terkait Kelembagaan Usaha Penangkapan

01.10 Investasi dan Pemodalán Usaha

Naskah terkait Investasi dan Pemodalán Usaha

01.11 Kenelayanan

Naskah terkait Kenelayanan

01.12 Pembinaan Pengelolaan Usaha

Naskah terkait Pembinaan Pengelolaan Usaha

01.13 Pemantauan dan Evaluasi Usaha Penangkapan Ikan

Naskah terkait Pemantauan dan Evaluasi Usaha Penangkapan Ikan

02 Pelabuhan Perikanan

02.00 Identifikasi dan Penyiapan Pelabuhan Perikanan

Naskah terkait Identifikasi dan Penyiapan Pelabuhan Perikanan

02.01 Tata Operasional Pelabuhan Perikanan

Naskah terkait Tata Operasional Pelabuhan Perikanan

- 02.02 Pengendalian Pembangunan Pelabuhan Perikanan
Naskah terkait Pengendalian Pembangunan Pelabuhan Perikanan
- 02.03 Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan
Naskah terkait Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan
- 02.04 Pemantauan dan Evaluasi Pelabuhan Perikanan
Naskah terkait Pemantauan dan Evaluasi Pelabuhan Perikanan

- 03 Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan
 - 03.00 Rancang Bangun dan Kelaikan Kapal Perikanan
Naskah terkait Rancang Bangun dan Kelaikan Kapal Perikanan
 - 03.01 Rancang Bangun dan Kelaikan Alat Penangkapan Ikan
Naskah terkait Rancang Bangun dan Kelaikan Alat Penangkapan Ikan
 - 03.02 Pendaftaran Kapal Perikanan
Naskah terkait Pendaftaran Kapal Perikanan
 - 03.03 Pengawakan Kapal dan Ketenagakerjaan Perikanan
Naskah terkait Pengawakan Kapal dan Ketenagakerjaan Perikanan
 - 03.04 Pemantauan dan Evaluasi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
Naskah terkait Pemantauan dan Evaluasi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

- 04 Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan
 - 04.00 Alokasi Usaha Penangkapan Ikan
Naskah terkait Alokasi Usaha Penangkapan Ikan
 - 04.01 Tata Pengusahaan Penangkapan Ikan
Naskah terkait Tata Pengusahaan Penangkapan Ikan
 - 04.02 Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan
Naskah terkait Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan
 - 04.03 Pelayanan Dokumen Penangkapan Ikan
Naskah terkait Pelayanan Dokumen Penangkapan Ikan
 - 04.04 Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan
Naskah terkait Pemantauan dan evaluasi Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan

- 05 Pengembangan Usaha Penangkapan
 - 05.00 Kelembagaan Usaha
Naskah terkait Kelembagaan Usaha
 - 05.01 Investasi dan Pemodalan Usaha
Naskah terkait Investasi dan Pemodalan Usaha
 - 05.02 Kenelayanan
Naskah terkait Kenelayanan
 - 05.03 Pembinaan Pengelolaan Usaha
Naskah terkait Pembinaan Pengelolaan Usaha
 - 05.04 Pemantauan dan Evaluasi Usaha Penangkapan Ikan
Naskah terkait Pemantauan dan Evaluasi Usaha Penangkapan Ikan

- 06 Perikanan Budidaya
 - 06.00 Prasarana dan Sarana Budidaya
Naskah terkait Prasarana dan Sarana Budidaya
 - 06.01 Perbenihan
Naskah terkait Perbenihan

- 07 Produksi
 - 07.00 Budidaya Air Tawar
Naskah terkait Budidaya Air Tawar
 - 07.01 Budidaya Air Payau dan Laut
Naskah terkait Budidaya Air Payau dan Laut

- 07.02 Budidaya Ikan Hias
Naskah terkait Budidaya Ikan Hias
- 07.03 Sertifikasi
Naskah terkait Sertifikasi
- 07.04 Data dan Statistik Perikanan Budidaya
Naskah terkait Data dan Statistik Perikanan Budidaya

- 08 Kesehatan Ikan dan Lingkungan
- 08.00 Hama dan Penyakit Ikan
Naskah terkait Hama dan Penyakit Ikan
- 08.01 Perlindungan Lingkungan Budidaya
Naskah terkait Perlindungan Lingkungan Budidaya
- 08.02 Standarisasi dan Kesehatan dan Lingkungan
Naskah terkait Standarisasi dan Kesehatan dan Lingkungan
- 08.03 Obat Ikan, Kimia, dan Bahan Biologi
Naskah terkait Obat Ikan, Kkimia, dan Bahan Biologi
- 08.04 Pengendalian Residu Naskah terkait Pengendalian residu

- 09 Usaha Budidaya
- 09.00 Investasi dan Permodalan
Naskah terkait Investasi dan Permodalan
- 09.01 Kewirausahaan
Naskah terkait Kewirausahaan
- 09.02 Pelayanan Usaha
Naskah terkait Pelayanan Usaha
- 09.03 Kelembagaan dan Ketenagakerjaan
Naskah terkait Kelembagaan dan Ketenagakerjaan
- 09.04 Infomasi Usaha dan Promosi
Naskah terkait Infomasi Usaha dan Promosi

- 10 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- 10.00 Pengolahan Hasil
Naskah terkait Pengolahan Hasil
- 10.01 Pengembangan Produksi Non Konsumsi
Naskah terkait Pengembangan Produksi Non Konsumsi
- 10.02 Pemasaran Dalam Negeri
Naskah terkait Pemasaran Dalam Negeri
- 10.03 Pemasaran Luar Negeri
Naskah terkait Pemasaran Luar Negeri

- 11 Usaha dan Investasi
- 11.00 Pelayanan Usaha
Naskah terkait Pelayanan Usaha
- 11.01 Kemitraan Usaha
Naskah terkait Kemitraan Usaha
- 11.02 Ketenagakerjaan Pengolahan dan Pemasaran
Naskah terkait Ketenagakerjaan Pengolahan dan Pemasaran
- 11.03 Investasi dan Permodalan
Naskah terkait Investasi dan Permodalan
- 11.04 Informasi dan Promosi
Naskah terkait Informasi dan Promosi

- 12 Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- 12.00 Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Naskah terkait Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

- 12.01 Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan
Naskah terkait Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan
- 12.02 Pesisir dan Lautan
Naskah terkait Pesisir dan Lautan
- 12.03 Pendayagunaan Pulau-Pulau Terkecil
Naskah terkait Pendayagunaan Pulau-Pulau Terkecil
- 12.04 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha
Naskah terkait Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha
- 12.05 Prasarana dan Sarana Budidaya Air Payau
Naskah terkait Prasarana dan Sarana Budidaya Air Payau
- 12.06 Prasarana dan Sarana Budidaya Air Laut
Naskah terkait Prasarana dan Sarana Budidaya Air Laut
- 12.07 Minapolitan Budidaya
Naskah terkait Minapolitan Budidaya
- 12.08 Pengelolaan Induk
Naskah terkait Pengelolaan Induk
- 12.09 Perbenihan Skala Kecil
Naskah terkait Perbenihan Skala Kecil
- 12.10 Perbenihan Skala Besar
Naskah terkait Perbenihan Skala Besar
- 12.11 Standarisasi dan Sertifikasi Perbenihan
Naskah terkait Standarisasi dan Sertifikasi Perbenihan
- 12.12 Informasi dan Distribusi Perbenihan
Naskah terkait Informasi dan Distribusi Perbenihan
- 12.13 Budidaya Air Tawar
Naskah terkait Budidaya Air Tawar
- 12.14 Budidaya Air Payau dan Laut
Naskah terkait Budidaya Air Payau dan Laut
- 12.15 Budidaya Ikan Hias
Naskah terkait Budidaya Ikan Hias
- 12.16 Sertifikasi Budidaya Perikanan
Naskah terkait Sertifikasi Budidaya Perikanan
- 12.17 Data dan Statistik Perikanan Budidaya
Naskah terkait Data dan Statistik Perikanan Budidaya
- 12.18 Hama dan Penyakit Ikan
Naskah terkait Hama dan Penyakit Ikan
- 12.19 Perlindungan Lingkungan Budidaya
Naskah terkait Perlindungan Lingkungan Budidaya
- 12.20 Standarisasi Kesehatan dan Lingkungan
Naskah terkait Standarisasi Kesehatan dan Lingkungan
- 12.21 Obat Ikan, Kimia, dan Bahan Biologi
Naskah terkait Obat Ikan, Kimia, dan Bahan Biologi
- 12.22 Pengendalian Residu
Naskah terkait Pengendalian Residu
- 12.23 Investasi dan Permodalan Usaha Budidaya
Naskah terkait Investasi dan Permodalan Usaha Budidaya
- 12.24 Kewirausahaan Budidaya
Naskah terkait Kewirausahaan Budidaya
- 12.25 Pelayanan Usaha Budidaya
Naskah terkait Pelayanan Usaha Budidaya
- 12.26 Kelembagaan dan Ketenagakerjaan
Naskah terkait Kelembagaan dan Ketenagakerjaan
- 12.27 Informasi Usaha dan Promosi
Naskah terkait Informasi Usaha dan Promosi

- 13 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
 - 13.00 Pengawasan Sumber Daya Perikanan
 - Naskah terkait Pengawasan Sumber Daya Perikanan
 - 13.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan
 - Naskah terkait Pengawasan Sumber Daya Kelautan
 - 13.02 Pengawasan Pencemaran Perairan
 - Naskah terkait Pengawasan Pencemaran Perairan
 - 13.03 Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Terkecil
 - Naskah terkait Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Terkecil
 - 13.04 Pengawasan Jasa Kelautan dan Daya Non Hayati
 - Naskah terkait Pengawasan Jasa Kelautan dan Daya Non Hayati

- 14 Kapal Pengawas
 - 14.00 Logistik dan Operasional Wilayah Barat
 - Naskah terkait Logistik dan Operasional Wilayah Barat
 - 14.01 Logistik Operasional Wilayah Timur
 - Naskah terkait Logistik Operasional Wilayah Timur
 - 14.02 Perawatan Kapal Pengawas
 - Naskah terkait Perawatan Kapal Pengawas
 - 14.03 Pengawakan Kapal Pengawas
 - Naskah terkait Pengawakan Kapal Pengawas

- 15 Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan
 - 15.00 Sistem Pemantauan
 - Naskah terkait Sistem Pemantauan
 - 15.01 Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan
 - Naskah terkait Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan
 - 15.02 Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan
 - Naskah terkait Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan
 - 15.03 Pengembangan Infrastruktur Pengawasan
 - Naskah terkait Pengembangan Infrastruktur Pengawasan

- 16 Penanganan Pelanggaran
 - 16.00 Penyidikan
 - Naskah terkait Penyidikan
 - 16.01 Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal
 - Naskah terkait Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal
 - 16.02 Kerjasama Penegakan Hukum dan Fasilitas PPNS Perikanan
 - Naskah terkait Kerjasama Penegakan Hukum Dan Fasilitas PPNS Perikanan
 - 16.03 Pemantauan dan Evaluasi
 - Naskah terkait Pemantauan dan Evaluasi

XXI. BP. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

00 Kebijakan

00.00 Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan

Naskah terkait Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan

00.01 Penyiapan Kebijakan

Naskah terkait Penyiapan Kebijakan

00.02 Perumusan Kebijakan

Naskah terkait Perumusan Kebijakan

00.03 Masukan dan Dukungan Kebijakan

Naskah terkait Masukan dan Dukungan Kebijakan

00.04 Penetapan NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria)

Naskah terkait Penetapan NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria)

01 Pengarusutamaan Gender Ekonomi, Politik Sosial dan Hukum

01.00 Data Gender

Naskah terkait Data Gender

01.01 Advokasi dan Fasilitasi

Naskah terkait Advokasi dan Fasilitasi

01.02 Monitoring, Evaluasi dan Analisa Kebijakan Gender

Naskah terkait Monitoring, Evaluasi dan Analisa Kebijakan Gender

02 Perlindungan Perempuan (Kekerasan, Masalah Sosial, Tenaga Kerja, Korban Perdagangan)

02.00 Data Perlindungan Perempuan

Naskah terkait Data Perlindungan Perempuan

02.01 Advokasi dan Fasilitasi

Naskah terkait Advokasi dan Fasilitasi

02.02 Monitoring, Evaluasi dan Analisa Kebijakan Perlindungan Perempuan

Naskah terkait Monitoring, Evaluasi dan Analisa Kebijakan Perlindungan Perempuan

02.03 Sistem Aplikasi dan Jaringan Informasi Gender

Naskah terkait Sistem Aplikasi dan Jaringan Informasi Gender

02.04 Analisis dan Penyajian Informasi Gender

Naskah terkait Analisis dan Penyajian Informasi Gender

02.05 Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Ibu

Naskah terkait Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Ibu

03 Perlindungan Anak (Hak Sipil, Masalah Sosial, Kekerasan Terhadap Anak, Anak Berkebutuhan Khusus, Anak Berhadapan Dengan Hukum)

03.00 Data Perlindungan Anak

Naskah terkait Data Perlindungan Anak

03.01 Advokasi dan Fasilitasi

Naskah terkait Advokasi dan Fasilitasi

03.02 Monitoring, Evaluasi dan Analisa Kebijakan Perlindungan Anak

Naskah terkait Monitoring, Evaluasi dan Analisa Kebijakan Perlindungan Anak

03.03 Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Anak

Naskah terkait Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Anak

04 Tumbuh Kembang Anak (Pendidikan, Kesehatan, Partisipasi, Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur, Pengembangan Kota Layak Anak)

04.00 Data Tumbuh Kembang Anak

Naskah terkait Data Tumbuh Kembang Anak

- 04.01 Advokasi dan Fasilitasi
Naskah terkait Advokasi dan Fasilitasi
- 04.02 Monitoring, Evaluasi dan Analisa Kebijakan Tumbuh Kembang Anak
Naskah terkait Monitoring, Evaluasi dan Analisa Kebijakan Tumbuh Kembang Anak
- 04.03 Penyelenggaraan Parenting Pola Pengasuhan Anak
Naskah terkait Penyelenggaraan Parenting Pola Pengasuhan Anak

- 05 Penghargaan terkait Gender (Anugerah Parahita Ekapraya/APE)
Naskah terkait Data APE

- 06 Hibah
- 06.00 Pengkajian dan Pengusulan Hibah
Naskah terkait Pengkajian dan Pengusulan Hibah
- 06.01 Penyiapan Hibah
Naskah terkait Penyiapan Hibah
- 06.02 Monitoring, Evaluasi dan Analisa Hibah
Naskah terkait Monitoring, Evaluasi dan Analisa Hibah

- 07 Pemberdayaan dan Penggerakan Masyarakat
- 07.00 Mengordinasikan dan Memfasilitasi Kemitraan Pemberdayaan dan Penggerakan Masyarakat
Naskah terkait Mengordinasikan dan Memfasilitasi Kemitraan Pemberdayaan dan Penggerakan Masyarakat
- 07.01 Monitoring, Supervisi, Evaluasi dan Penguatan Pemberdayaan dan Penggerakan Masyarakat
Naskah terkait Monitoring, Supervisi, Evaluasi dan Penguatan Pemberdayaan dan Penggerakan Masyarakat
- 07.02 Koordinasi dan Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan
Naskah terkait Koordinasi dan Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan

- 08 Partisipasi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna
- 08.00 Monitoring, Supervisi, Evaluasi dan Penguatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna
Naskah terkait Monitoring, Supervisi, Evaluasi dan Penguatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna
- 08.01 Menghimpun, Mengolah, Memelihara, Menyajikan, Mengembangkan Data dan Informasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna
Naskah terkait Menghimpun, Mengolah, Memelihara, Menyajikan, Mengembangkan Data dan Informasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna
- 08.02 Publikasi dan Promosi Partisipasi dan Teknologi Tepat Guna
Naskah terkait Publikasi dan Promosi Partisipasi dan Teknologi Tepat Guna

- 09 Pengelolaan dan Kemitraan RPTRA
- 09.00 Monitoring, Supervisi, Evaluasi dan Penguatan Pengelolaan dan Kemitraan RPTRA
Naskah terkait Monitoring, Supervisi, Evaluasi dan Penguatan Pengelolaan dan Kemitraan RPTRA
- 09.01 Menghimpun, Mengolah, Memelihara, Menyajikan, Mengembangkan Data dan Informasi Pengelolaan dan Kemitraan RPTRA
Naskah terkait Menghimpun, Mengolah, Memelihara, Menyajikan, Mengembangkan Data dan Informasi Pengelolaan dan Kemitraan RPTRA

- 09.02 Publikasi dan Promosi Pengelolaan Kemitraan dan RPTRA
Naskah terkait Publikasi dan Promosi Pengelolaan Kemitraan dan RPTRA
- 09.03 Mengkoordinasi Kebutuhan Sarana dan Prsarana dan SDM Pengelola RPTRA
Naskah terkait Mengkoordinasi Kebutuhan Sarana dan Prsarana dan SDM Pengelola RPTRA
- 10 Pengendalian Penduduk
Naskah terkait Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk
- 11 Analisis Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk
 - 11.00 Pengumpulan dan Pengolahan
Naskah terkait Pengumpulan dan Pengolahan
 - 11.01 Evaluasi dan Pelaporan
Naskah terkait Evaluasi dan Pelaporan
- 12 Fasilitas Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk
 - 12.00 Penyiapan Fasilitas
Naskah terkait Penyiapan Fasilitas
 - 12.01 Evaluasi dan Pelaporan
Naskah terkait Evaluasi dan Pelaporan
- 13 Perencanaan pengendalian penduduk
 - 13.00 Profil dan Proyeksi Penduduk
Naskah terkait Profil dan Proyeksi Penduduk
 - 13.01 Penetapan Parameter Pengendalian Penduduk
Naskah terkait Penetapan Parameter Pengendalian Penduduk
 - 13.02 Pemanfaatan Perencanaan Pengendalian Penduduk
Naskah terkait Pemanfaatan Perencanaan Pengendalian Penduduk
- 14 Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Pemerintah
 - 14.00 Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah
Naskah terkait Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah
 - 14.01 Jaminan Pelayanan dan Penyediaan Sarana Keluarga Berencana
Naskah terkait Jaminan Pelayanan dan Penyediaan Sarana Keluarga Berencana
 - 14.02 Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Pemerintah
Naskah terkait Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Pemerintah
 - 14.03 Standarisasi Pelayanan Keluarga Berencana Pemerintah
Naskah terkait Standarisasi Pelayanan Keluarga Berencana Pemerintah
 - 14.04 Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Keluarga Berencana Pemerintah
Naskah Terkait Monitoring Dan Evaluasi Pelayanan Keluarga Berencana Pemerintah
- 15 Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Swasta
 - 15.00 Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Swasta
Naskah terkait Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Swasta
 - 15.01 Jaminan dan Ketersediaan Sarana Keluarga Berencana Swasta
Naskah terkait Jaminan dan Ketersediaan Sarana Keluarga Berencana Swasta
 - 15.02 Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Swasta
Naskah terkait Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Swasta

- 15.03 Standarisasi Pelayanan Keluarga Berencana Swasta
Naskah terkait Standarisasi Pelayanan Keluarga Berencana Swasta
- 15.04 Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Keluarga Berencana Swasta
Naskah terkait Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Keluarga Berencana Swasta
- 16 Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Wilayah dan Sasaran khusus
- 16.00 Akses Dan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Jalur Wilayah Tertinggal, Terpencil Dan Perbatasan
Naskah Terkait Akses Dan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Jalur Wilayah Tertinggal, Terpencil Dan Perbatasan
- 16.01 Peningkatan Akses Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Tertinggal, Terpencil, Dan Perbatasan
Naskah Terkait Peningkatan Akses Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Tertinggal, Terpencil, Dan Perbatasan
- 16.02 Peningkatan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Tertinggal, Terpencil, Dan Perbatasan
Naskah Terkait Peningkatan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Tertinggal, Terpencil, Dan Perbatasan
- 16.03 Akses Dan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Miskin Perkotaan
Naskah terkait Akses Dan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Miskin Perkotaan
- 16.04 Peningkatan Akses Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Miskin Perkotaan
Naskah terkait Peningkatan Akses Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Miskin Perkotaan
- 16.05 Peningkatan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Miskin Perkotaan
Naskah terkait Peningkatan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Miskin Perkotaan
- 16.06 Kesertaan Keluarga Berencana Pria
Naskah terkait Kesertaan Keluarga Berencana Pria
- 16.07 Peningkatan Akses Keluarga Berencana Pria
Naskah terkait Peningkatan Akses Keluarga Berencana Pria
- 16.08 Peningkatan Partisipasi Keluarga Berencana Pria
Naskah terkait Peningkatan Partisipasi Keluarga Berencana Pria
- 17 Kesehatan Reproduksi
- 17.00 Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi, dan Anak
Naskah terkait Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi, dan Anak
- 17.01 Pencegahan PMS dan HIV/AIDS
Naskah terkait Pencegahan PMS dan HIV/AIDS
- 17.02 Pencegahan Kanker Alat Reproduksi dan Penanggulangan Infertilitas
Naskah terkait Pencegahan Kanker Alat Reproduksi dan Penanggulangan Infertilitas

XXII. TM. PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

00 Kebijakan

00.00 Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan

Naskah terkait Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan

00.01 Penyiapan Kebijakan

Naskah terkait Penyiapan Kebijakan

00.02 Perumusan Kebijakan

Naskah terkait Perumusan Kebijakan

00.03 Masukan dan Dukungan Kebijakan

Naskah terkait Standarisasi Masukan dan Dukungan Kebijakan

00.04 Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria

Naskah terkait Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria

01 Pengembangan Iklim Penanaman Modal

01.00 Deregulasi Penanaman Modal

Naskah terkait Deregulasi Sektor Primer (Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Energi, Sumber Daya Mineral dan Kehutanan); Sekunder (Industri Logam, Mesin, Transportasi dan Telematika, Industri Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka); tersier (Pariwisata, Perdagangan dan Telekomunikasi, Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Jasa Lainnya)

01.01 Pengembangan Potensi Daerah

Naskah terkait Potensi Daerah Sektor Primer (Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Energi, Sumber Daya Mineral dan Kehutanan); Sekunder (Industri Logam, Mesin, Transportasi dan Telematika, Industri Agro, Kimia, Tekstil Dan Aneka); Tersier (Pariwisata, Perdagangan dan Telekomunikasi, Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Jasa Lainnya)

01.02 Pemberdayaan Usaha

Naskah terkait Pembinaan dan Penyuluhan; Kemitraan Usaha; Pelayanan Usaha

02 Promosi Penanaman Modal

02.00 Pengembangan Promosi

Naskah terkait Analisis Strategi Promosi; Fasilitasi Promosi Luar Negeri

02.01 Promosi Sektoral

Naskah terkait Promosi Industri Sumber Daya Alam, Jasa dan Kawasan; Promosi Industri Manufaktur; Promosi Infrastruktur

02.02 Fasilitasi Promosi Daerah

Naskah terkait Fasilitasi Promosi Daerah

02.03 Pameran dan Sarana Promosi

Naskah terkait Pameran; Media Cetak; Media Elektronik

03 Pelayanan Penanaman Modal

03.00 Pelayanan Aplikasi

Naskah terkait Pelayanan Aplikasi Sektor Primer; Sekunder; Tersier

03.01 Pelayanan Perizinan

Naskah terkait Pelayanan Perizinan Sektor Primer; Sekunder; Tersier

03.02 Pelayanan Fasilitas

Naskah terkait Pelayanan Fasilitas Sektor Primer; Sekunder; Tersier

04 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

04.00 Pemantauan Penanaman Modal

Naskah terkait Pemantauan Penanaman Modal

04.01 Bimbingan Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal

Naskah terkait Bimbingan Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal

- 04.02 Fasilitasi Penyelesaian Masalah
Naskah terkait Fasilitasi Penyelesaian Masalah
- 04.03 Pengawasan Penanaman Modal
Naskah terkait Pengawasan Penanaman Modal
- 04.04 Pencabutan/Pembatalan Perizinan Penanaman Modal
Naskah terkait Pencabutan/Pembatalan Perizinan Penanaman Modal
- 04.05 Kualifikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal
Naskah terkait Kualifikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal

- 05 Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
 - 05.00 Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal
Naskah terkait Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal
 - 05.01 Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan di bidang Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal
Naskah terkait Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan di bidang Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal
 - 05.02 Penetapan Norma, Standar dan Prosedur Pelaksanaan Kegiatan di bidang Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal
Naskah terkait Penetapan Norma, Standar dan Prosedur Pelaksanaan Kegiatan di bidang Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal
 - 05.03 Pemuktahiran Data dan Informasi Penanaman Modal
Naskah terkait Pemuktahiran Data dan Informasi Penanaman Modal
 - 05.04 Perumusan dan Penyusunan Tata Cara Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal
Naskah terkait Perumusan dan Penyusunan Tata Cara Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal
 - 05.05 Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Sistem Informasi Penanaman Modal
Naskah terkait Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Sistem Informasi Penanaman Modal

- 06 Perencanaan Penanaman Modal
 - 06.00 Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam
Naskah terkait Perencanaan Industri Agribisnis; Energi; Sumber Daya Mineral
 - 06.01 Perencanaan Industri Manufaktur
Naskah terkait Perencanaan Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka; Kimia; Industri Alat Transportasi dan Telematika
 - 06.02 Perencanaan Jasa dan Kawasan
Naskah terkait Perencanaan Jasa Perdagangan dan Pariwisata; Jasa Kesehatan, Pendidikan, Ketenagakerjaan, dan Jasa Lainnya; Kawasan Ekonomi
 - 06.03 Perencanaan Infrastruktur
Naskah terkait Perencanaan Infrastruktur Transportasi Darat, Jalan, dan Jembatan; Infrastruktur Energi dan Sumber Daya Air; Infrastruktur Transportasi Laut, Udara, dan Infrastruktur

- 07 Kerja Sama Penanaman Modal
 - 07.00 Kerja Sama Bilateral dan Multilateral
Naskah terkait Kerja Sama Bilateral Wilayah Amerika dan Eropa; Kerja Sama Bilateral Wilayah Asia, Pasifik, dan Afrika; Kerja Sama Multilateral

- 07.01 Kerja Sama Regional
Naskah terkait Kerja Sama Regional ASEAN; Kerja Sama Sub Regional ASEAN; Kerja Sama Intra Kawasan
- 07.02 Kerja Sama Dunia Usaha Internasional
Naskah terkait Asosiasi dan Lembaga Bisnis; Lembaga Keuangan

- 08 Izin Bidang Pendidikan
 - 08.00 Izin Prinsip TK
 - 08.01 Izin Operasional TK
 - 08.02 Izin Perpanjangan TK
 - 08.03 Izin Prinsip SD
 - 08.04 Izin Operasional SD
 - 08.05 Izin Perpanjangan SD
 - 08.06 Izin Prinsip PLB/Izin Prinsip Pendidikan Inklusi
 - 08.07 Izin Operasional PLB/Izin Prinsip Pendidikan Inklusi
 - 08.08 Izin Perpanjangan PLB/Izin Prinsip Pendidikan Inklusi
 - 08.09 Izin Prinsip SMP
 - 08.10 Izin Operasional SMP
 - 08.11 Izin Perpanjangan SMP
 - 08.12 Izin Prinsip SMA
 - 08.13 Izin Operasional SMA
 - 08.14 Izin Perpanjangan SMA
 - 08.15 Izin Prinsip SMK
 - 08.16 Izin Operasional SMK
 - 08.17 Izin Perpanjangan SMK
 - 08.18 Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
 - 08.19 Izin Operasional PAUD
 - 08.20 Izin Operasional PKBM
 - 08.21 Izin Operasional Lembaga Pendidikan Informal
 - 08.22 Izin Prinsip Satuan PAUD Sejenis
 - 08.23 Izin Operasional Satuan PAUD Sejenis
 - 08.24 Izin Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus
 - 08.25 Rekomendasi Satuan Pendidikan Kerjasama TK
 - 08.26 Rekomendasi Satuan Pendidikan Kerjasama Sekolah Dasar
 - 08.27 Rekomendasi Satuan Pendidikan Kerjasama Sekolah Menengah Atas
 - 08.28 Izin Pendirian Taman Kanak-kanak
 - 08.29 Izin Pendirian Sekolah (SD/SMP/SMA/SMK)
 - 08.30 Rekomendasi Satuan Pendidikan Kerjasama (TK/SD/SMP/SMA/SMK)
 - 08.31 Izin Penyelenggaraan Pendidikan Khusus
 - 08.32 Izin Pendirian Satuan PAUD

- 09 Bidang Kesehatan
 - 09.00 Izin Operasional Perusahaan Pengendalian Hama/Pest Control
 - 09.01 Izin Usaha Optik/Izin Penyelenggaraan Optikal
 - 09.02 Izin mendirikan RS Tipe B Non Pendidikan, Izin mendirikan RS Tipe C, Izin mendirikan RS Tipe D
 - 09.03 Izin Operasional Sementara RS Tipe B Non Pendidikan, Izin Operasional Sementara RS Tipe C, Izin Operasional Sementara RS tipe D
 - 09.04 Izin Operasional Tetap RS Tipe B Non Pendidikan/Izin Operasional RS Kelas B Non Pendidikan, Izin Operasional Tetap RS Tipe C/Izin Operasional RS Kelas C, Izin Operasional Tetap RS Tipe D/Izin Operasional RS Kelas D
 - 09.05 Izin Klinik Utama, Izin Klinik Pratama
 - 09.06 Izin Laboratorium Klinik Madya/Izin Laboratorium Klinik Swasta Tipe Madya, Izin Laboratorium Klinik Pratama/Izin Laboratorium Klinik Swasta Tipe Pratama

- 09.07 Izin Institusi Penguji Kalibrasi Alat Kesehatan
- 09.08 Izin Pengobatan Tradisional/Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional (Praktek Perorangan)
- 09.09 Izin Rontgen
- 09.10 Izin Upaya Pelayanan Hemodialisa/Izin Sarana Upaya Pelayanan Hemodialisa di Dalam Rumah Sakit
- 09.11 Izin Mendirikan Sarana Upaya Hemodialisa
- 09.12 Izin Pendirian Cabang Pedagang Besar Farmasi, Izin Pendirian Cabang Penyalur Kesehatan
- 09.13 Izin Usaha Kecil Obat Tradisionai (UKOT)
- 09.14 Izin Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian
- 09.15 Izin Apotek
- 09.16 Izin Usaha Mikro Obat Tradisional
- 09.17 Izin Toko Obat/Izin Pedagang Eceran Obat
- 09.18 Izin Praktek Dokter Umum/Izin Praktek Dokter Umum (Praktik Perorangan), Izin Praktek Dokter Gigi/Izin Praktik Dokter Gigi (Praktik Perorangan), Izin Praktek Dokter Spesialis/Izin Praktik Dokter Spesialis (Praktik Perorangan)
- 09.19 Izin Kerja
Naskah terkait Izin Kerja Perawat (SIK)/Izin Praktik Perawat (Praktik Perorangan); Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK)/Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (di Fasilitas Kesehatan); Apoteker (SIKA)/Izin Praktik Apoteker/Surat Izin Praktik Apoteker; Refraksionis Optician/Izin Praktik Refraksionis Optisien (di Fasilitas Kesehatan)/Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien; Fisioterapis/Izin Praktik Fisioterapis (di Fasilitas Kesehatan)/Surat Izin Kerja
- 09.20 Izin Praktek Bidan/Izin Praktik Bidang (Praktik Perorangan)
- 09.21 Izin Pengelola Apotek (SIPA)
- 09.22 Izin Praktek Okupasi Terapi
- 09.23 Izin Dokter Gigi Spesialis/Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis (di Fasilitas Kesehatan)
- 09.24 Izin Sanitarian/Izin Praktik Sanitarian (di Fasilitas Kesehatan)/Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian
- 09.25 Izin Ahli Kesehatan Masyarakat/Izin Praktik Ahli Kesehatan Masyarakat/Surat Izin Praktik Ahli Kesehatan Masyarakat
- 09.26 Izin Tenaga Gizi/Izin Praktik Tenaga Gizi (di Fasilitas Kesehatan)/Surat Izin Praktik Tenaga Gizi
- 09.27 Izin Teknisi Gigi/Izin Praktik Teknisi Gigi (di Fasilitas Kesehatan)/Surat Izin Kerja Teknisi Gigi
- 09.28 Izin Teknisi Ejektromedis/Izin Praktik Teknisi Elektromedis (di Fasilitas Kesehatan)/Surat Izin Praktik Elektromedis
- 09.29 Izin Ortotik Prostetik
- 09.30 Izin Perekam Medis/Izin Praktik Perekam Medis (di Fasilitas Kesehatan)/Surat Izin Kerja Perekam Medis
- 09.31 Izin Fisika Medik Indonesia/Izin Praktik Fisika Medik (di Fasilitas Kesehatan)/Surat Izin Praktik Fisika Medik
- 09.32 Izin Puskesmas Kecamatan, Izin Puskesmas Kelurahan
- 09.33 Izin Klinik Kecantikan & Estetika (KKE)
- 09.34 Izin Panti Pengobatan Tradisional
- 09.35 Izin Ahli Kecantikan/Surat Izin Ahli Kecantikan
- 09.36 Izin Akupunturis
- 09.37 Izin Salon Kecantikan
- 09.38 Tanda Daftar Pengobatan Tradisional (TDPT)/Tanda Daftar Penyehat Tradisional (Praktik Perorangan)
- 09.39 Izin Industri kecil obat Tradisional (IKOT), Izin Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)

- 09.40 Izin Praktek Dokter Gigi Spesialis/Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis (Praktik Perorangan)
- 09.41 Rekomendasi
Naskah terkait Rekomendasi UKL UPL Fasilitas Pelayanan Kesehatan; Mendirikan RS Tipe A/Rekomendasi Izin Operasional Rumah Sakit Kelas A; Laboratorium Klinik Utama/Rekomendasi Laboratorium Klinik Swasta Tipe Utama; Penetapan Kelas Rumah Sakit; Industri Farmasi; Industri Obat Tradisional; Produksi Kosmetik; Produksi Alat Kesehatan; Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT); Pedagang Besar Farmasi; Penyalur Alat Kesehatan; Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi
- 09.42 Surat Persetujuan UKL-UPL Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- 09.43 Izin Cabang Pedagang Besar Farmasi/Izin Cabang Pedagang Besar Farmasi (Pengakuan Pedagang Besar Farmasi Cabang)
- 09.44 Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan
- 09.45 Izin Penelitian Bidang Kesehatan
- 09.46 Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT)
- 09.47 Sertifikat Laik Sehat Penyehatan Makanan bagi Usaha Jasa Boga, Sertifikat Laik Sehat bagi Usaha Depo Air Minum, Sertifikat Laik Sehat bagi Usaha Hotel, Restoran, dan Rumah Makan
- 09.48 Izin Ambulans
- 09.49 Surat Izin Praktik (SIP) Perawat/Izin Praktik Perawat (di Fasilitas Kesehatan), Surat Izin Praktik (SIP) Fisioterapis, Surat Izin Praktik (SIP) Terapi Wicara
- 09.50 Surat Izin Kerja (SIK) Bidan/Izin Praktik Bidan (di Fasilitas Kesehatan), Surat Izin Kerja (SIK) Okupasi Terapis/Izin Praktik Okupasi Terapi (di Fasilitas Kesehatan)/Surat Izin Praktik Okupasi Terapi, Surat Izin Kerja (SIK) Ortotik Prostetik/Izin Praktik Ortotik Prostetik (di Fasilitas Kesehatan)
- 09.51 Izin Apotek Rakyat/Izin Apotek Rakyat
- 09.52 Izin Pelayanan Kesehatan Sehat Pakai Air (SPA)
- 09.53 Sertifikat Laik Sehat Usaha Hotel
- 09.54 Izin Operasional Perusahaan Termite Control, Izin Operasional Perusahaan Fumigasi
- 09.55 Surat Izin Praktik (SIP) Tenaga Gizi, Surat Izin Praktik (SIP) Pengobatan Komplementer Alternatif, Surat Izin Praktik (SIP) Perawat Gigi
- 09.56 Izin Klinik Fisioterapi
- 09.57 Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional (di Fasilitas Kesehatan), Izin Praktik Dokter Umum (di Fasilitas Kesehatan), Izin Praktik Dokter Gigi (di Fasilitas Kesehatan), Izin Praktik Dokter Spesialis (di Fasilitas Kesehatan)
- 09.58 Tanda Daftar Penyehat Tradisional (di Fasilitas Kesehatan)/Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (Praktik Perorangan/Fasilitas Pelayanan Kesehatan)
- 09.59 Rekomendasi Pedagang Besar Farmasi yang Mendistribusikan Psikotropika
- 09.60 Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Tradisional
- 09.61 Izin Tukang Gigi
- 09.62 Izin Penambahan Jenis Produksi Alat Kesehatan
- 09.63 Izin Toko Alat Kesehatan
- 09.64 Surat Keterangan Laik Sehat Usaha Pangan Rumah Tangga
- 09.65 Izin Operasional RS
- 09.66 Izin Pendirian RS
- 09.67 Izin Pendirian Penyelenggaraan Bank Sel Punca Darah Tali Pusat

- 09.68 Izin Klinik (Utama dan Pratama)
- 09.69 Izin Laboratorium Klinik (Madya dan Pratama)
- 09.70 Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional
- 09.71 Izin Penyelenggaraan Unit Pelayanan Dialisis di Rumah Sakit
- 09.72 Izin Penyelenggaraan Klinik Pelayanan Hemodialisis
- 09.73 Izin Usaha Obat Tradisional (Kecil dan Mikro)
- 09.74 Surat Izin Praktik
Naskah terkait Praktik Dokter Umum/Dokter Gigi; Dokter Spesialis/Gigi Spesialis; Praktik Perawat; Bidan; Tenaga Teknis Kefarmasian (di Fasilitas Kefarmasian); Perawat Gigi; Ahli Teknologi Laboratorium Medik
- 09.75 Surat Izin Kerja Ortosis Prostetis, Surat Izin Kerja Optometris
- 09.76 Izin Puskesmas (Kecamatan/Kelurahan)
- 09.77 Izin Panti Sehat (Pengobatan Tradisional / Pijat Tuna Netra)
- 09.78 Rekomendasi Izin Pendirian Rumah Sakit Kelas A, Rekomendasi Laboratorium Klinik Umum Tipe Utama
- 09.79 Izin Penambahan Jenis Produksi Alat Kesehatan
- 09.80 Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler, Surat Izin Praktik Teknisi Pelayanan Darah

- 10 Izin Bidang Pekerjaan Umum
- 10.00 Izin Pelaksanaan Storing Jaringan Utilitas
- 10.01 Izin Pelaksanaan Penempatan Bangunan Pelengkap
- 10.02 Izin Pelaksanaan Penempatan Jaringan Utilitas (IPPJU) Storing/Perbaikan
- 10.03 Izin Membangun Prasarana (IMP)
- 10.04 Rekomendasi Membangun Prasarana (RMP) Inrit
- 10.05 Rekomendasi Peil Lantai Bangunan (PLB)/Izin Peil Lantai Bangunan
- 10.06 Izin Usaha Pelayanan Angkutan di Bidang Kebersihan
- 10.07 Izin Usaha Pengelolaan Air Limbah Domestik
- 10.08 Izin Usaha Pengelolaan Sampah
- 10.09 Izin Pemakaian Lokasi Taman dan Jalur Hijau untuk Shooting Film/Izin Pemakaian Lokasi Taman dan Jalur Hijau untuk Shooting Film, Bazar, Perlombaan, dan Kegiatan Lain
- 10.10 Izin Pemakaian Lokasi Taman dan Jalur Hijau untuk Bazar, Perlombaan, Sarasehan, Pameran, Acara Ritual dan Kegiatan lainnya
- 10.11 Izin Pemakaian Lokasi Taman dan Jalur Hijau untuk Perkemahan
- 10.12 Izin Pemakaian Lokasi Taman dan Jalur Hijau untuk bedeng proyek (Direksi Keet), dan sejenisnya/Izin Pemakaian Lokasi Taman dan Jalur Hijau untuk Bedeng Proyek (Direksi Keet), Material dan sejenisnya
- 10.13 Izin Pemakaian Lokasi Taman dan Jalur Hijau untuk material Pekerjaan Proyek
- 10.14 Izin Pemakaian Lokasi Taman dan Jalur Hijau untuk titik lubang tiang umbul-umbul
- 10.15 Izin Penebangan Pohon Pelindung (Milik Pemda dengan Izin dan Milik Sendiri dengan Izin)/Izin Penebangan Pohon Pelindung
- 10.16 Izin Penggunaan Bangunan di lokasi Taman dan Jalur Hijau
- 10.17 Izin Pemakaian lokasi kebun bibit Dinas Pertamanan dan Pemakaman/Izin Pemakaian Lokasi Kebun Bibit Dinas Kehutanan
- 10.18 Izin Pemakaian Lokasi Taman Pemakaman untuk shooting film
- 10.19 Izin mengangkut Jenazah ke Luar Negeri
- 10.20 Izin Mengangkut Jenazah ke Luar Wilayah Provinsi DKI Jakarta

- 10.21 Izin Tahan Jenazah
 - 10.22 Izin Pengabuan Jenazah/Kerangka
 - 10.23 Izin Usaha Jasa Pelayanan Pemakaman
 - 10.24 Izin Usaha Angkutan Jenazah
 - 10.25 Izin Usaha Yayasan Rumah Abu
 - 10.26 Izin Usaha/Yayasan Rumah Duka
 - 10.27 Izin Usaha Krematorium (Pengabuan)
 - 10.28 Izin Penggunaan Tanah Makam
 - 10.29 Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Makam
 - 10.30 Izin Penggunaan Tanah Makam Tumpangan
 - 10.31 Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Makam Tumpangan
 - 10.32 Izin Pemasangan Plaket
 - 10.33 Izin Penggalian dan Pemindahan Jenazah/Kerangka Jenazah
 - 10.34 Izin Pembangunan Prasarana Reklamasi
 - 10.35 Izin Pemanfaatan Air Permukaan
 - 10.36 Izin Usaha Pemusnahan/Pemanfaatan Sampah dan Air kotor
 - 10.37 Izin Mengangkut Jenazah Ke Luar Negeri/Ke Luar Wilayah Provinsi DKI Jakarta
 - 10.38 Izin Penggunaan Tanah Makam (Makam Baru/Perpanjangan/Tumpangan)
-
- 11 Izin Bidang Perumahan
 - 11.00 Surat Izin Rumah Kost/Izin Rumah Kost
 - 11.01 Perpanjangan Izin Rumah Kost
 - 11.02 Surat Izin Perumahan/Izin Perumahan
 - 11.03 Perpanjangan Surat Izin Perumahan
 - 11.04 Peralihan (Mutasi) Surat Izin Perumahan
 - 11.05 Pembebasan (Penghapusan) Surat Izin Perumahan
 - 11.06 Penerbitan Buku Tanda Pemilikan Perumahan
 - 11.07 Pengesahan Akta Pembentukan PPPSRS
-
- 12 Izin Bidang Penata Ruang
 - 12.00 Pengukuran Situasi Tanah/Peta Situasi Ukur/Pengukuran Lahan
 - 12.01 Ketetapan Rencana Kota
 - 12.02 Ketetapan Rencana Kota Besar/Ketetapan Rencana Kota: Besar Luas tanah > 5000 m², untuk semua jenis bangunan rumah tinggal dan non-rumah tinggal
 - 12.03 Ketetapan Rencana Kota Sedang/Ketetapan Rencana Kota: Sedang Luas tanah > 1000 m² hingga luas tanah berukuran < 5000 m², untuk semua jenis bangunan rumah tinggal dan non-rumah tinggal
 - 12.04 Ketetapan Rencana Kota Kecil/Ketetapan Rencana Kota: Kecil Luas tanah < 1000 m², untuk semua jenis bangunan rumah tinggal dan non-rumah tinggal
 - 12.05 Rencana Tata Letak Bangunan
 - 12.06 Tata Letak Bangunan untuk Bangunan Menara
 - 12.07 Tata Letak Bangunan untuk Bangunan Reklame
 - 12.08 Cetak Ulang Peta/Gambar/Cetak Ulang Peta atau Gambar Ketataruangan
 - 12.09 Survey dan Perencanaan Trace Jalan, Jembatan Saluran atau Utilitas/Persetujuan Prinsip Trase Jalan, Jembatan, Saluran, atau Utilitas

- 12.10 Persetujuan Prinsip/Dispensasi atas penyesuaian dan atas ketinggian bangunan
- 12.11 Izin penunjukan penggunaan tanah
- 12.12 Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi Tanah
- 12.13 Izin Penyelenggaraan Reklame
- 12.14 Izin Penyelenggaraan Reklame Kelas A
- 12.15 Izin Penyelenggaraan Reklame Kelas B
- 12.16 Izin Penyelenggaraan Reklame Kelas C
- 12.17 Persetujuan Prinsip Penyelenggaraan Reklame (untuk kawasan kendali ketat)
- 12.18 Izin Pelaksanaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta
- 12.19 Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
- 12.20 Izin Usaha Jasa Konstruksi Besar
- 12.21 Izin Usaha Jasa Konstruksi Kecil dan Menengah
- 12.22 Perpanjangan Izin Usaha Jasa Konstruksi
- 12.23 Perubahan Data Izin Usaha Jasa Konstruksi
- 12.24 Penutupan Izin Usaha Jasa Konstruksi
- 12.25 Permohonan Leges (Registrasi Ulang Tahun Kedua dan Ketiga)
- 12.26 Persetujuan Prinsip Menara Telekomunikasi (microcell dan macrocell)
- 12.27 Persetujuan Prinsip Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), Persetujuan Prinsip Jembatan Penyeberangan Orang, Jembatan Penyeberangan Multiguna, Terowongan Penyeberangan Orang
- 12.28 Rekomendasi Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT)
- 12.29 Keterangan Domisili
- 12.30 Rekomendasi Pengukuran Lahan
- 12.31 Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR)/KRK/Ketetapan Rencana Kota untuk Konsultasi BKPRD
- 12.32 Perpanjangan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR)/KRK
- 12.33 Izin Pemanfaatan Ruang (IPR)/KRK
- 12.34 Rekomendasi Pemanfaatan Lahan Untuk Pensertifikasi Tanah
- 12.35 Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan/Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan untuk Usaha Jasa Konstruksi
- 12.36 Perpanjangan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan
- 12.37 Perubahan Data Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan
- 12.38 Penutupan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan
- 12.39 Pengesahan Gambar Perencanaan Arsitektur Kelas A
- 12.40 Pengesahan Gambar Perencanaan Arsitektur Kelas B
- 12.41 Persetujuan Prinsip Pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB)
- 12.42 Ketetapan Rencana Kota untuk Konsultasi BKPRD : Ketetapan Rencana Kota Besar Luas tanah $\geq 5000 \text{ m}^2$, untuk semua jenis bangunan rumah tinggal dan non-rumah tinggal
- 12.43 Ketetapan Rencana Kota untuk Konsultasi BKPRD : Ketetapan Rencana Kota Sedang Luas tanah $\geq 1000 \text{ m}^2$ hingga luas tanah berukuran $< 5000 \text{ m}^2$, untuk semua jenis bangunan rumah tinggal dan non-rumah tinggal
- 12.44 Ketetapan Rencana Kota untuk Konsultasi BKPRD : Ketetapan Rencana Kota : Kecil Luas tanah $< 1000 \text{ m}^2$, untuk semua jenis bangunan rumah tinggal dan non-rumah tinggal
- 12.45 Pengesahan Gambar Perencanaan Arsitektur Bangunan Non-Rumah Tinggal jumlah lantai > 8
- 12.46 Pengesahan Gambar Perencanaan Arsitektur Bangunan Non-Rumah Tinggal jumlah lantai < 8
- 12.47 Izin Trase Jalan, Jembatan, Saluran, atau Utilitas

- 12.48 Izin Penyelenggaraan Reklame: Luas Bidang > 24 m², atau memiliki LED, atau berada di Kawasan Kendali Ketat
- 12.49 Izin Penyelenggaraan Reklame: Luas Bidang < 24 m², memiliki TLB BR, atau berada di luar Kawasan Kendali Ketat
- 12.50 Izin Penyelenggaraan Reklame: Tidak memiliki TLB BR (Tata Letak Bangunan, Bangunan Reklame)
- 12.51 Izin Usaha Jasa Konstruksi (Besar/Menengah/Kecil)
- 12.52 Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan untuk Usaha Jasa Konstruksi
- 12.53 Izin Usaha Jasa Konsultan

- 13 Izin Bidang Perhubungan
- 13.00 Rekomendasi pemindahan lokasi perlengkapan jalan
- 13.01 Izin kegiatan penunjang dalam Terminal
- 13.02 Izin Penyelenggaraan Angkutan/Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek/Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Baru/Perpanjangan Dalam Wilayah Provinsi DKI Jakarta
- 13.03 Izin Usaha Penderekan oleh Badan Hukum/badan usaha
- 13.04 Izin Membuat Tanggul/Portal/Jalur Pemisah
- 13.05 Izin Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi
- 13.06 Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Pelabuhan Pengumpan
- 13.07 Izin Kegiatan Pengerukan dan Reklamasi di dalam DLKr (Daerah Lingkungan Kerja) dan DLKp (Daerah Lingkungan Kepentingan) Pelabuhan Pengumpan
- 13.08 Izin Pemanfaatan Perairan di Luar Pelabuhan
- 13.09 Izin Pemanfaatan Wilayah Perairan untuk Kegiatan Industri dan Pemotongan Kapal, Pariwisata, Kepelabuhanan, Floating Repair, Floating Terminal, Floating Storage
- 13.10 Izin Usaha Angkutan Perairan
- 13.11 Izin Usaha Jasa (Usaha Bongkar Muat Barang, Usaha Jasa Pengurusan Transportasi, Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut dan Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Usaha Tally Mandiri, Usaha Depo Peti Kemas, Usaha pembangunan dan perbaikan kapal untuk angkutan laut sampai dengan 7 GT untuk Angkutan Laut dan 35 GT untuk Angkutan Sungai Danau)
- 13.12 Izin Usaha Bongkar Muat Barang
- 13.13 Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi
- 13.14 Izin Usaha Jasa Tally
- 13.15 Izin Usaha Depo Peti Kemas
- 13.16 Izin Usaha Jasa Pengangkutan Transportasi (SIUJPT)
- 13.17 Izin Agen Penjualan Tiket Pesawat Udara
- 13.18 Izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek/Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (baru / perpanjangan Dalam Wilayah Provinsi DKI Jakarta)
- 13.19 Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang
- 13.20 Pertimbangan Teknis Angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP), Pertimbangan Teknis Angkutan Pariwisata
- 13.21 Pertimbangan Teknis Angkutan Antar Kota Antar Propinsi
- 13.22 Pertimbangan Teknis Angkutan Pariwisata
- 13.23 Penetapan Status, Perubahan Status, Peremajaan dan Balik Nama Kendaraan Angkutan Umum

- 13.24 Izin Usaha Pelayaran Rakyat
- 13.25 Pas Kecil dan Sertifikat Kesempurnaan
- 13.26 Rekomendasi Pas Kapal Besar
- 13.27 Rekomendasi KKOP (Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan)
- 13.28 Izin Pool
- 13.29 Persetujuan Analisa Dampak Lalu Lintas
- 13.30 Izin Penyelenggaraan Perparkiran Di Luar Ruang Milik Jalan
- 13.31 Izin Penjualan Tiket dan Pemberangkatan Bus Dari Pool Angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP)
- 13.32 Izin Angkutan Barang Untuk Melewati Jalan-jalan Tertentu
- 13.33 Izin Insidental (Angkutan Lebaran)
- 13.34 Izin Pemasangan Menara Pasang Surut
- 13.35 Izin Usaha Angkutan Penyeberangan
- 13.36 Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan

- 14 Izin Bidang Lingkungan Hidup
- 14.00 Izin Lingkungan (Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan AMDAL)/Izin Lingkungan-Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
- 14.01 Izin Lingkungan (Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan UKL-UPL)
- 14.02 Izin Lingkungan-Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Kelas A (UKL UPL Kelas A)
- 14.03 Izin Lingkungan-Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Kelas B (UKL UPL Kelas B)
- 14.04 Persetujuan KA ANDAL
- 14.05 Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL)
- 14.06 Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)
- 14.07 Izin Pengumpul Skala Provinsi (Kec. Pelumas/Oli Bekas)/Izin Pengumpul Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Skala Provinsi
- 14.08 Perpanjangan Izin Pengumpul Skala Provinsi (Kec.Pelumas/Oli Bekas)
- 14.09 Perpanjangan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3
- 14.10 Rekomendasi Pengumpul Limbah B3 Skala Nasional (Kecuali Pelumas/Oli Bekas)/Rekomendasi Pengumpul Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Skala Nasional
- 14.11 Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL)
- 14.12 Perpanjangan Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL)
- 14.13 Izin pemboran air tanah (SIB)/Izin Pengeboran Air Tanah
- 14.14 Perpanjangan Izin Pemboran Air Tanah (SIB)
- 14.15 Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah Sumur Bor (SIPA Bor Baru)/Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah Sumur Bor
- 14.16 Perpanjangan Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah Sumur Bor (SIPA Bor Perpanjangan)
- 14.17 Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah Sumur Pantek (SIPA Pantek Baru)/Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah Sumur Pantek
- 14.18 Perpanjangan Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah Sumur Pantek (SIPA Pantek perpanjangan)
- 14.19 Izin Kartu Juru Bor Baru/Izin Kartu Juru Bor
- 14.20 Perpanjangan Izin Kartu Juru Bor
- 14.21 Izin Kartu Pengenal Instalasi Bor
- 14.22 Perpanjangan Izin Kartu pengenal installasi bor
- 14.23 Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah

- 14.24 Perpanjangan Izin Perusahaan pengeboran Air Bawah Tanah
 - 14.25 Izin Dewatering
 - 14.26 Perpanjangan Izin Dewatering
 - 14.27 Rekomendasi Persetujuan UKUUP
 - 14.28 Izin Pembuangan Emisi Sumber Tidak Bergerak
 - 14.29 Perpanjangan Izin Pembuangan Emisi Sumber Tidak Bergerak
 - 14.30 Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Izin Lingkungan - Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan
 - 14.31 Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Untuk Pengecer/Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Sebagai Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya (PT-B2)
 - 14.32 Izin Instalasi Pengolahan Air Limbah
 - 14.33 Pengesahan Pemakaian dan Pengolahan Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja
 - 14.34 Izin Usaha Pengeboran Air Bawah Tanah
 - 14.35 Izin Operasional Concrete Batching Plant
 - 14.36 Izin Pemanfaatan Air Baku
 - 14.37 Izin Lingkungan-Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)
 - 14.38 Izin Lingkungan-Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan
 - 14.39 Izin Lingkungan-Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)
 - 14.40 Izin Pengumpul Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
 - 14.41 Izin Pengumpul Limbah Minyak Goreng
-
- 15 Izin Bidang Pertanahan yang Menjadi Kewenangan Daerah
 - 15.00 Izin Mendirikan Bangunan
 - 15.01 Izin Mendirikan Bangunan Kelas A
 - 15.02 Izin Mendirikan Bangunan Kelas B
 - 15.03 Izin Mendirikan Bangunan Kelas C
 - 15.04 Izin Mendirikan Bangunan Kelas D
 - 15.05 Balik Nama IMB
 - 15.06 Pemecahan IMB
 - 15.07 Salinan IMB
 - 15.08 Legalisir IMB
 - 15.09 Pembatalan IMB atas Permintaan Pemohon
 - 15.10 Pencabutan IMB atas Permintaan Pemohon
 - 15.11 Izin Pendahuluan Pondasi
 - 15.12 Izin Pendahuluan Struktur Menyeluruh
 - 15.13 Izin Pendahuluan Menyeluruh
 - 15.14 Sertifikat Layak Fungsi (SLF)
 - 15.15 Sertifikat Layak Fungsi Kelas A
 - 15.16 Sertifikat Layak Fungsi Kelas B
 - 15.17 Sertifikat Layak Fungsi Kelas C
 - 15.18 Sertifikat Layak Fungsi Kelas D
 - 15.19 Salinan SLF
 - 15.20 Legalisir SLF
 - 15.21 Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB)
 - 15.22 Perpanjangan IPTB
 - 15.23 Legalisasi IPTB
 - 15.24 Salinan IPTB

- 15.25 Persetujuan Rencana Teknis Bongkar (PRTB)
- 15.26 Izin Loading Test
- 15.27 Izin Ground Breaking
- 15.28 Rekomendasi Perolehan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atau Hak Lainnya di Atas bidang tanah Hak Pengelolaan
- 15.29 Rekomendasi Peralihan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atau Hak Lainnya di Atas bidang tanah Hak Pengelolaan
- 15.30 Penjaminan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atau Hak Lainnya di Atas bidang tanah Hak Pengelolaan Lahan
- 15.31 Permohonan Hak di Atas bidang Tanah Eks Desa atau Tanah Eks Kota Praja
- 15.32 Izin Mendirikan Bangunan: Bangunan Non-rumah tinggal jumlah lantai > 8 lantai; IMB Pondasi
- 15.33 Izin Mendirikan Bangunan: Bangunan Non-rumah tinggal jumlah lantai < 8 lantai; Rumah Tinggal Pemugaran Cagar Budaya Golongan A; IMB Reklame; IMB Menara
- 15.34 Izin Mendirikan Bangunan: Bangunan Rumah Tinggal luas tanah ≥ 100 m², kondisi tanah tidak harus kosong, dan jumlah lantai s.d. 3 lantai termasuk Cluster/Town House; Pemugaran Cagar Budaya Golongan B dan C; IMB Gudang dengan luas tanah < 1500 m² dan jumlah lantai maksimal 2 Lantai; IMB Non-Rumah Tinggal yang tidak mengubah konstruksi namun mengubah fungsi (Non-Industri)
- 15.35 Izin Mendirikan Bangunan: Bangunan Rumah Tinggal luas tanah < 100 m², kondisi tanah kosong atau di atasnya terdapat bangunan tua yang akan dibongkar, dan jumlah lantai s.d 2 lantai
- 15.36 Sertifikat Layak Fungsi: Bangunan Non-rumah tinggal jumlah lantai > 8 lantai
- 15.37 Sertifikat Layak Fungsi: Bangunan Non-rumah tinggal jumlah lantai \leq 8 Lantai; Rumah Tinggal Pemugaran Cagar Budaya Golongan A
- 15.38 Sertifikat Layak Fungsi: Bangunan Rumah tinggal luas tanah > 100 m² dan jumlah lantai s.d 3 lantai termasuk Cluster/Town House, Pemugaran Cagar Budaya Golongan B dan C; Bangunan Gudang luas tanah < 1500 m² dan jumlah lantai maksimal 2 lantai; Bangunan Non-Rumah tinggal yang tidak mengubah konstruksi namun mengubah fungsi (Non-Industri)
- 15.39 Sertifikat Layak Fungsi: Bangunan Rumah tinggal luas tanah < 100 m² dan jumlah lantai s.d 2 lantai
- 15.40 Rekomendasi Loading Test
- 15.41 Izin Lokasi
- 15.42 Rekomendasi Perolehan/Peralihan/Penjaminan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atau Hak Lainnya di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan

16 Izin Bidang Pemberdayaan Perempuan

17 Izin Bidang Sosial

- 17.00 Tanda Daftar Perkumpulan/Organisasi Sosial
- 17.01 Tanda Daftar Yayasan
- 17.02 Izin Kegiatan Yayasan
- 17.03 Izin Pendirian Panti Sosial
- 17.04 Izin Pendirian Panti Non Sosial
- 17.05 Izin Pendirian Pusaka/Izin Pendirian Pusat Santunan Dalam Keluarga
- 17.06 Izin Pendirian Panti Pijat Tuna Netra

- 17.07 Izin Pendirian Taman Anak Sejahtera
- 17.08 Izin Teknis Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing/Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing
- 17.09 Izin Melaksanakan Kegiatan Pengumpulan Uang dan Barang/Izin Kegiatan Pengumpulan Uang dan Barang
- 17.10 Rekomendasi Perizinan Tenaga Kerja Asing di Bidang Kesejahteraan Sosial/Rekomendasi Izin Tenaga Kerja Asing di Bidang Kesejahteraan Sosial
- 17.11 Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah

- 18 Izin Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
- 18.00 Perizinan Penggunaan Pesawat Instalasi, Mesin, Peralatan, Bahan, Barang Dan Produksi Teknis Lainnya
- 18.01 Perizinan dan pendaftaran Lembaga Pelatihan kerja/Izin Lembaga Pelatihan Kerja
- 18.02 Izin kelayakan tempat penampungan calon tenaga kerja Indonesia/Izin Tempat Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia
- 18.03 Izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh
- 18.04 Pengesahan perpanjangan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA)
- 18.05 Perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA)
- 18.06 Izin operasional lembaga pelayanan penempatan tenaga kerja Disabilitas
- 18.07 Izin pembentukan kantor cabang pelaksana penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta/Izin Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta
- 18.08 Izin operasional lembaga penyedia dan penyalur Pramuwisma/Izin Operasional Lembaga Penyedia dan Penyalur Pekerja Rumah Tangga
- 18.09 Rekomendasi untuk penerbitan surat izin usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPPTKS) Antar Kerja Lokal (AKL)/Rekomendasi Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Antar Daerah
- 18.10 Rekomendasi untuk penerbitan surat izin usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPPTKS) Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)/Rekomendasi Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Lokal
- 18.11 Izin pemakaian pesawat uap/Pengesahan Pemakaian Pesawat Uap
- 18.12 Izin pemakaian pesawat lift/Pengesahan Pemakaian Pesawat Lift
- 18.13 Izin pemakaian pesawat angkut dan angkat/Pengesahan Pemakaian Pesawat Angkat dan Angkut
- 18.14 Izin pemakaian Pesawat Tenaga Produksi/Pengesahan Pemakaian Pesawat Tenaga Produksi (genset)
- 18.15 Izin pemakaian instalasi listrik, instalasi penyalur petir dan instalasi alarm kebakaran/Pengesahan Pemakaian Instalasi Listrik
- 18.16 Izin pemakaian mesin
- 18.17 Izin pemakaian bejana tekan/Pengesahan Pemakaian Bejana Tekan
- 18.18 Izin pemakaian bahan berbahaya dan beracun
- 18.19 Penerbitan pengesahan panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3), serta sertifikasi Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kimia (K3 Kimia)
- 18.20 Rekomendasi untuk penerbitan Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI Swasta (SIPPTKIS)
- 18.21 Surat persetujuan pendirian bursa kerja khusus/Persetujuan pendirian bursa kerja khusus

- 18.22 Pembuatan kartu pencari kerja/kartu kuning(AK 1)/Kartu Pencari Kerja (AK 1)
- 18.23 Rekomendasi pembuatan paspor TKI
- 18.24 Izin rekrutmen dan seleksi calon TKI
- 18.25 Pengesahan peraturan perusahaan serta pembuatan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama
- 18.26 Pendaftaran perjanjian penyedia jasa pekerja/buruh
- 18.27 Pendaftaran perjanjian pemborongan pekerjaan
- 18.28 Wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan/Wajib Lapor Ketenagakerjaan
- 18.29 Perizinan dan Pendaftaran Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN)/Izin Lembaga Pelatihan Kerja atau Balai Latihan Kerja Luar Negeri
- 18.30 Laporan Keberadaan Tenaga Kerja Asing
- 18.31 Wajib Lapor Penyelenggaraan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
- 18.32 Rekomendasi Penyelenggaraan Makanan bagi Tenaga Kerja di Perusahaan
- 18.33 Pendaftaran Perjanjian Kerja
- 18.34 Pendaftaran Perjanjian Pemagangan
- 18.35 Lisensi K3 Operator Pesawat Angkat, Angkut, Ketel Uap, dan Pesawat Uap
- 18.36 Lisensi K3 Petugas Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) di Tempat Kerja
- 18.37 Lisensi K3 Teknisi
- 18.38 Pembuatan ID Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
- 18.39 Rekomendasi Untuk Penertiban Surat Izin Pelaksana penempatan TKI Swasta (SIPPTKIS)
- 18.40 Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama
- 18.41 Rekomendasi Kartu Izin Tinggal Terbatas
- 18.42 Pengesahan Pemakaian Instalasi Penyalur Petir
- 18.43 Pengesahan Pemakaian Instalasi Proteksi Kebakaran
- 18.44 Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Lokal

- 19 Izin Bidang Koperasi, Serta Usaha Mikro, Kecil, Menengah
- 19.00 Pengesahan Badan Hukum Koperasi

- 20 Izin Bidang Penanaman Modal
- 20.00 Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
- 20.01 Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
- 20.02 Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
- 20.03 Izin Prinsip Penggabungan (Merger) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)/Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri
- 20.04 Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
- 20.05 Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
- 20.06 Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
- 20.07 Izin Usaha Penggabungan (Merger) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
- 20.08 Izin Pembukaan Kantor Cabang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) / Penanaman Modal Asing (PMA)

- 20.09 Izin Penutupan Kantor Cabang Penanaman Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing
- 21 Izin Bidang Kebudayaan dan Pariwisata
 - 21.00 Tanda Daftar Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami/buatan
 - 21.01 Tanda Daftar Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala, berupa candi, keratin, prasasti, petilasan dan bangunan kuno/Tanda Daftar Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala
 - 21.02 Tanda Daftar Pengelolaan Museum
 - 21.03 Tanda Daftar Pengelolaan Pemukiman dan atau Lingkungan Adat
 - 21.04 Tanda Daftar Pengelolaan Objek Ziarah
 - 21.05 Tanda Daftar Kawasan Pariwisata
 - 21.06 Tanda Daftar Angkutan Kereta Api Wisata
 - 21.07 Tanda Daftar Angkutan Sungai dan Danau Wisata
 - 21.08 Tanda Daftar Angkutan Laut Domestik Wisata
 - 21.09 Tanda Daftar Angkutan Laut Internasional Wisata
 - 21.10 Tanda Daftar Usaha Biro Perjalanan Wisata (BPW)
 - 21.11 Tanda Daftar Usaha Cabang Biro Perjalanan Wisata (CBPW)
 - 21.12 Tanda Daftar Usaha Agen Perialanan Wisata (APW)
 - 21.13 Tanda Daftar Usaha Sales Counter/Gerai Jual
 - 21.14 Tanda Daftar Restoran/Rumah Makan/Cafe(Tanda Daftar Restoran/ Cafe)
 - 21.15 Tanda DaftarRumah Makan
 - 21.16 Tanda Daftar Bar (Rumah Minum)
 - 21.17 Tanda Daftar Pusat Penjualan Makanan (Food Court)
 - 21.18 Tanda Daftar Kedai Kopi (Coffee House)/Tanda Daftar Coffee Shop/ Coffee House/Kedai Kopi
 - 21.19 Tanda Daftar Jasa Boga (Catering)
 - 21.20 Tanda Daftar Kantin I Cafeteria
 - 21.21 Tanda Daftar Bakery
 - 21.22 Tanda Daftar Coffee Shop
 - 21.23 Tanda Daftar Restoran Bergerak (Mobile Restaurant)/Tanda Daftar Restoran Bergerak (Mobile Restaurant/Food Truck)
 - 21.24 Tanda Daftar Restoran Terapung
 - 21.25 Tanda Daftar Hotel Bintang
 - 21.26 Tanda Daftar Hotel Melati/Tanda Daftar Hotel Melati 1
 - 21.27 Tanda Daftar Hotel Melati 2
 - 21.28 Tanda Daftar Hotel Melati 3
 - 21.29 Tanda Daftar Pondok Wisata (Cottage)
 - 21.30 Tanda Daftar Resort Wisata
 - 21.31 Tanda Daftar Motel
 - 21.32 Tanda Daftar Hunian Wisata (Service Apartment)
 - 21.33 Tanda Daftar Hotel Terapung
 - 21.34 Tanda Daftar Bumi Perkemahan
 - 21.35 Tanda Daftar Persinggahan Karavan
 - 21.36 Tanda Daftar Penginapan Remaja (Graha Wisata)
 - 21.37 Tanda Daftar Wisma
 - 21.38 Tanda Daftar Gelanggang Olahraga Lapangan Golf
 - 21.39 Tanda Daftar Gelanggang Olahraga Bola Sodok (Billiard)
 - 21.40 Tanda Daftar Gelanggang Olahraga Lapangan Tennis

- 21.41 Tanda Daftar Gelanggang Olahraga Bola Gelinding (Bowling)
 - 21.42 Tanda Daftar Gelanggang Olahraga Renang
 - 21.43 Tanda Daftar Pusat Olahraga (Sport Center)
 - 21.44 Tanda Daftar Pusat Kesegaran Jasmani
 - 21.45 Tanda Daftar Arena Latihan Golf
 - 21.46 Tanda Daftar Gelanggang Olahraga Seluncur
 - 21.47 Tanda Daftar Kolam Pemancingan
 - 21.48 Tanda Daftar Pangkas Rambut atau Barbershop
 - 21.49 Tanda Daftar Bioskop
 - 21.50 Tanda Daftar Sanggar Seni
 - 21.51 Tanda Daftar Galeri Seni
 - 21.52 Tanda Daftar Gedung Pertunjukan Seni
 - 21.53 Tanda Daftar Permainan Ketangkasan (Permainan Manual/Mekanik/
Elektronik) untuk Orang Dewasa/Tanda Daftar Permainan
Ketangkasan untuk orang dewasa
 - 21.54 Tanda Daftar Sarana Rekreasi Keluarga (Permainan Manual/Mekanik/
Eletranik) untuk Anak-anak dan/atau Keluarga/Tanda Daftar Sarana
Rekreasi Keluarga untuk Anak-anak dan Keluarga
 - 21.55 Tanda Daftar Hiburan Kelab Malam
 - 21.56 Tanda Daftar Diskotik
 - 21.57 Tanda Daftar Musik Hidup
 - 21.58 Tanda Daftar Pub
 - 21.59 Tanda Daftar Griya Pijat
 - 21.60 Tanda Daftar Panti Mandi Uap
 - 21.61 Tanda Daftar Taman Margasatwa
 - 21.62 Tanda Daftar Taman Rekreasi
 - 21.63 Tanda Daftar Taman Bertema
 - 21.64 Tanda Daftar Karaoke
 - 21.65 Tanda Daftar Jasa Impresariat/Promotor
 - 21.66 Tanda Daftar Pertunjukan Temporer
 - 21.67 Tanda Daftar Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, perjalanan, insentif,
konferensi dan Pameran
 - 21.68 Tanda Daftar Jasa Fasilitas Theater
 - 21.69 Tanda Daftar Jasa Fasilitas Konvensi dan Pameran
 - 21.70 Tanda Daftar Jasa Ruang Pertemuan Eksekutif
 - 21.71 Tanda Daftar Jasa Informasi Pariwisata
 - 21.72 Tanda Daftar Jasa Manajemen Hotel
 - 21.73 Tanda Daftar Wisata Selam
 - 21.74 Tanda Daftar Wisata Perahu Layar
 - 21.75 Tanda Daftar Wisata Memancing
 - 21.76 Tanda Daftar Wisata Selancar
 - 21.77 Tanda Daftar Dermaga Bahari
 - 21.78 Tanda Daftar Wisata Sungai Danau atau Waduk untuk jenis Wisata
Dayung
 - 21.79 Surat Rekomendasi Izin Temporer (Konser, Festival, Bazar, Film)
 - 21.80 Rekomendasi Penyelenggaraan Perjalanan Haji dan Umrah
 - 21.81 Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
- 22 Izin Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan
- 22.00 Rekomendasi Penyelenggaraan Kegiatan Keolahragaan dan
Kepemudaan/Izin Penyelenggaraan Kegiatan Keolahragaan dan

Kepemudaan

- 22.01 Rekomendasi Operasional Prasarana dan Sarana Olahraga
- 22.02 Izin Operasional Prasarana dan Sarana Olahraga Edukasi
- 22.03 Izin Operasional Prasarana dan Sarana Olahraga Prestasi
- 22.04 Izin Operasional Prasarana dan Sarana Olahraga Rekreasi
- 22.05 Izin Operasional Prasarana dan Sarana Olahraga (Edukasi/Prestasi/Rekreasi)

- 23 Izin Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri
 - 23.00 Rekomendasi Riset Penelitian (Izin Riset/Penelitian)
 - 23.01 Perpanjangan Rekomendasi Riset Penelitian
 - 23.02 Rekomendasi Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga kerja Asing
 - 23.03 Izin Penelitian
 - 23.04 Rekomendasi Penelitian

- 24 Izin Bidang Perpustakaan

- 25 Izin Bidang Komunikasi dan Informatika
 - 25.00 Rekomendasi Jasa Titipan /Rekomendasi Penyelenggaraan Pos
 - 25.01 Rekomendasi Radio Siaran
 - 25.02 Rekomendasi Televisi Siaran
 - 25.03 Izin Jasa Titipan (Kantor Cabang)
 - 25.04 Izin Penempatan Perangkat Telekomunikasi
 - 25.05 Izin Jasa Titipan (Kantor Agen)
 - 25.06 Izin Warung Telekomunikasi dan Internet/Izin Warung Internet
 - 25.07 Izin Warung Telekomunikasi
 - 25.08 Surat Keterangan Instalasi Penyalur Petir pada Menara Telekomunikasi/Keterangan Instalasi Genset dan Penyalur Petir Pada Menara Telekomunikasi
 - 25.09 Surat Keterangan Instalasi Genset pada Menara Telekomunikasi
 - 25.10 Izin Penggelaran Kabel Telekomunikasi
 - 25.11 Pendidikan pengusaha ahli perposan dan atau jasa titipan
 - 25.12 Izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi
 - 25.13 Rekomendasi Zona Menara Telekomunikasi
 - 25.14 Rekomendasi Administrasi dan Teknis untuk Radio/Televisi Siaran Komunitas
 - 25.15 Rekomendasi Administrasi dan Teknis untuk Radio/Televisi Siaran Swasta
 - 25.16 Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Macrocell
 - 25.17 Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Microcell
 - 25.18 Izin Mendirikan Menara Telekomunikasi
 - 25.19 Surat Kelayakan Konstruksi Menara
 - 25.20 Izin Base Tranceiver Station Mobile

- 26 Izin Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan

- 27 Izin Bidang Kehutanan
 - 27.00 Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
 - 27.01 Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK)
 - 27.02 Industri Pengolahan Kayu Lanjutan (IPKL)

- 27.03 Tempal Penampungan Terdaftar (TPT)
- 27.04 Penetapan Nomor Seri Faktur Kayu Olahan (FA-KO)
- 27.05 Penetapan Petugas Penerbit Faktur Kayu Olahan
- 27.06 Industri Pengolahan Kayu Terpadu (IPKT)
- 27.07 Tempat Penimbunan Kayu Antara (TPK Antara)
- 27.08 Surat Keterangan Asal-Usul Kayu (SKAU)
- 27.09 Rekomendasi Pengajuan Pengakuan Sebagai ETPIK (Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan)
- 27.10 Izin Usaha Pengumpul/Pengedar Sarang Burung Walet
- 27.11 Izin Pengedar/Penampung TSL (Tumbuhan dan Satwa Liar) yang tidak Dilindungi dan Non Appendix CITES
- 27.12 Rekomendasi Permohonan Izin dan Perpanjangan Izin Lembaga Konservasi/Rekomendasi Izin Lembaga Konservasi
- 27.13 Rekomendasi Permohonan Izin Penggunaan Kawasan Hutan/Rekomendasi Izin Penggunaan Kawasan Hutan
- 27.14 Rekomendasi Calon Lahan Kompensasi Penggunaan Kawasan Hutan
- 27.15 Izin Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak di Lindungi dan Non Appendix Cites ke Dalam/Luar Negeri
- 27.16 Izin Usaha Penampung/Pengedar Tumbuhan/Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi Undang-Undang dan Non Appendix CITES ke Dalam Negeri/Luar Negeri (Izin Pengedar/Penampung Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan Non Appendix CITES)
- 27.17 Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan Fasilitas Umum Non Komersial dengan Luas paling banyak 5 (lima) Ha/Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan Fasilitas Umum Non Komersial
- 27.18 Izin Perluasan IPHHK Kapasitas sampai dengan 6000 M3/Tahun
- 27.19 Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
- 27.20 Izin Perubahan Komposisi Produksi IPHH dan IPHHBK
- 27.21 Persetujuan Penurunan Kapasitas Produksi IPHHK dan IPHHBK
- 27.22 Persetujuan Peremajaan Mesin (RE Engineering) IPHHK dan IPHHBK
- 27.23 Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan (Kayu /Bukan Kayu)
- 27.24 Industri Pengolahan Kayu (Lanjutan/Terpadu)

- 28 Izin Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- 28.00 Izin Pengusahaan SPBU/SPBG/SPB Industril SPB Liquid-Propane-Gas/ SPB Nelayan/SPB Bunker
- 28.01 Izin Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum
- 28.02 Izin Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas
- 28.03 Izin Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Industri
- 28.04 Izin Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Liquid Propane Gas
- 28.05 Izin Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan
- 28.06 Izin Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker
- 28.07 Izin Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Mobile Refueling Unit
- 28.08 Izin Pembukaan Kantor Perwakilan Asing (KPA) bidang Migas
- 28.09 Izin Usaha Jasa Penunjang Migas (IUJPM)
- 28.10 Izin Pembangkit Genset (Izin Usaha Kepentingan Umum/Izin Usaha Kepentingan Sendiri (IUKU/IUKS)/Izin Operasional Penyediaan Tenaga Listrik (Genset)/Izin Operasional Penyediaan Tenaga Listrik
- 28.11 Tanda Daftar Genset/Tanda Daftar Penyediaan Tenaga Listrik (Genset)/Tanda Daftar Penyediaan Tenaga Listrik

- 28.12 Izin Usaha Jasa Penunjang Listrik (IUJPL)/Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
- 28.13 Izin Operasi (IO)
- 28.14 Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)
- 28.15 Izin Usaha Agen LPG dan Minyak Tanah
- 28.16 Rekomendasi Teknis Pelaksanaan Pemasangan Peralatan dan Instalasi SPBU/SPBG/SPBLPG
- 28.17 Sertifikat Laik Operasi (SLO)/Sertifikat Laik Operasi Pembangkitan dan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik (Genset)
- 28.18 Rekomendasi Pengujian Tangki dan Jalur Pipa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum
- 28.19 Izin Usaha Depo Lokal

29 Izin Bidang Kelautan dan Perikanan

- 29.00 Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)/Izin Penangkapan Ikan 5-30 GT
- 29.01 Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)/Izin Kapal Pengangkut Ikan < 30 GT
- 29.02 Kartu Tanda Pengenal Nelayan Andon (KTPNA)/Izin Penangkapan Ikan Andon
- 29.03 Tanda Daftar Usaha Perikanan (TDUP)
- 29.04 Rekomendasi Impor Hasil Perikanan
- 29.05 Rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)/Rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan Perikanan
- 29.06 Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Budidaya/Izin Usaha Perikanan Budidaya
- 29.07 Rekomendasi Impor Ikan Hias dan Tanaman Air
- 29.08 Rekomendasi Impor Benih ikan
- 29.09 Rekomendasi Impor Pakan ikan/Rekomendasi Impor Pakan dan Obat Ikan
- 29.10 Rekomendasi Impor Induk Ikan
- 29.11 Rekomendasi Impor lkan hidup
- 29.12 Tanda Pencatatan Kapal Perikanan (TPKP) di bawah 10 GT/Tanda Pencatatan Kapal Penangkap Ikan <5 GT
- 29.13 Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) 10-30 GT
- 29.14 Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) 5-10 GT
- 29.15 Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) 10-30 GT
- 29.16 Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) 5-10 GT
- 29.17 Rekomendasi SIPI Kapal Perikanan > 30 GT
- 29.18 Izin Usaha Penangkapan Ikan
- 29.19 Rekomendasi Surat Izin Penangkapan Ikan > 30 GT
- 29.20 Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Ikan >30 GT
- 29.21 Izin Usaha Penangkapan Ikan < 30 GT

30 Izin Bidang Peternakan

- 30.00 Izin Praktek Dokter Hewan/Izin Praktik Dokter Hewan (Praktik Perorangan)
- 30.01 Tanda Izin Usaha Klinik Hewan/Izin Usaha Klinik Hewan
- 30.02 Izin Distributor Obat Hewan
- 30.03 Rekomendasi Izin Usaha sebagai Importir, Produsen dan, Eksortir Obat Hewan

- 30.04 Izin Tempat Sementara Penampungan Hewan
- 30.05 Rekomendasi Instalasi Karantina Hewan Sementara (IKHS)
- 30.06 Izin Pemasukan Ternak
- 30.07 Rekomendasi Pemasukan/Pengeluaran Hewan Kesayangan dan Eksotik dari dan ke luar negeri
- 30.08 Rekomendasi Pemasukan/Pengeluaran Unggas dari dan ke luar negeri
- 30.09 Surat Keterangan Pemasukan/Pengeluaran hewan kesayangan, unggas dan eksotik (Izin Pemasukan/Pengeluaran hewan kesayangan, unggas dan eksotik)
- 30.10 Sertifikat Veteriner Untuk Hewan/SKKH (Surat Keterangan Kesehatan Hewan)
- 30.11 Izin Depo/Petshop Obat Hewan/Izin Depo Obat Hewan
- 30.12 Izin Toko Obat Hewan
- 30.13 Izin Pemasukan/Pengeluaran Daging
- 30.14 Izin Distributor Daging/Izin Toko Daging/Swalayan yang menjual daging
- 30.15 Izin Toko Daging/Swalayan
- 30.16 Izin Usaha Pengolahan Daging
- 30.17 Kartu Tanda Berjualan Daging
- 30.18 Izin Usaha Pematangan Ternak
- 30.19 Izin Pengangkutan Daging
- 30.20 Izin Usaha Persusuan
- 30.21 Rekomendasi Import Produk Hewan
- 30.22 Rekomendasi Teknis Kesmavet/Rekomendasi Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
- 30.23 Rekomendasi Instalasi Karantina Produk Hewan Sementara
- 30.24 Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner
- 30.25 Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan
- 30.26 Rekomendasi Import Bahan Baku Pakan Ternak
- 30.27 Rekomendasi Import Pakan Hewan Kesayangan
- 30.28 Rekomendasi Usaha Pengolahan Tulang dan Bulu Ayam
- 30.29 Rekomendasi Instalasi Karantina Pakan Hewan Sementara
- 30.30 Rekomendasi Pendaftaran Pakan Ternak
- 30.31 Izin Distributor Pakan Hewan Kesayangan
- 30.32 Izin Pemasukan Produk Hewan
- 30.33 Izin Pengeluaran Produk Hewan
- 30.34 Izin Petshop
- 30.35 Izin Praktik Dokter Hewan (di Fasilitas Kesehatan)
- 30.36 Izin Praktik Dokter Hewan
- 30.37 Rekomendasi Pemasukan / Pengeluaran Hewan
- 30.38 Izin Pemasukan/Pengeluaran hewan dan produk hewan (domestik)
- 30.39 Izin Depo / Toko Obat Hewan
- 30.40 Rekomendasi Impor.

- 31 Izin Bidang Perdagangan
- 31.00 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar/Izin Usaha Perdagangan Besar
- 31.01 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah/Izin Usaha Perdagangan Menengah
- 31.02 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil/Izin Usaha Perdagangan

Keci

- 31.03 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro/Izin Usaha Perdagangan Mikro
- 31.04 Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUPMB)/Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol untuk Pengecer
- 31.05 Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT/Tanda Daftar Perusahaan
- 31.06 Tanda Daftar Perusahaan (TDP) CV
- 31.07 Tanda Daftar Perusahaan (TDP) FIRMA
- 31.08 Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Koperasi
- 31.09 Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perorangan
- 31.10 Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Bentuk Usaha Lainnya
- 31.11 Tanda Daftar Gudang (TDG)
- 31.12 Angka Pengenal Importir (API)
- 31.13 Surat Keterangan Asal (SKA)
- 31.14 Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)/Surat Tanda Pendaftaran Waralaba untuk Pemberi Waralaba/Surat Tanda Pendaftaran Waralaba untuk Pemberi Waralaba Lanjutan/Surat Tanda Pendaftaran Waralaba untuk Penerima Waralaba/Surat Tanda Pendaftaran Waralaba untuk Penerima Waralaba Lanjutan/Surat Tanda Pendaftaran Waralaba untuk Pemberi Waralaba (Baru/Lanjutan)/Surat Tanda Pendaftaran Waralaba untuk Penerima Waralaba (Baru/Lanjutan)
- 31.15 Izin Penyelenggaraan Usaha Perpasaran Swasta
- 31.16 Izin Usaha Toko Swalayan untuk Minimarket
- 31.17 Izin Usaha Toko Swalayan untuk Supermarket
- 31.18 Izin Usaha Toko Swalayan untuk Hypermarket
- 31.19 Izin Usaha Toko Swalayan untuk Perkulakan
- 31.20 Izin Usaha Toko Swalayan untuk Department Store
- 31.21 Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Usaha Perpasaran Swasta
- 31.22 Izin Perpanjangan Waktu Perdagangan (Midnight Sale)
- 31.23 Izin Usaha Pusat Perbelanjaan untuk Pertokoan
- 31.24 Izin Usaha Pusat Perbelanjaan untuk Pusat Perdagangan
- 31.25 Izin Usaha Pusat Perbelanjaan untuk Mall
- 31.26 Izin Usaha Pusat Perbelanjaan untuk Plaza
- 31.27 Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat Untuk Pengelolaan Pasar Tradisional
- 31.28 Izin Usaha Rumah Tangga
- 31.29 Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)
- 31.30 Surat Izin Usaha Perdagangan
- 31.31 Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol untuk Pengecer, Penjual Langsung dan TBB Sebagai Pengecer
- 31.32 Tanda Daftar Perusahaan
- 31.33 Tanda Daftar Gudang
- 31.34 Angka Pengenal Importir
- 31.35 Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS)
- 31.36 Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
- 31.37 Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Sebagai Distributor Terdaftar (DT-B2)
- 31.38 Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Untuk Distributor

32 Izin Bidang Perindustrian

- 32.00 Izin Usaha Industri (IUI)/Izin Usaha Industri Besar/Izin Usaha Industri Menengah
- 32.01 Penggantian Izin Usaha Industri (IUI)
- 32.02 Perubahan Alamat , Penanggung Jawab Izin Usaha Industri (IUI)
- 32.03 Tanda Daftar Industri (TDI)
- 32.04 Perubahan Alamat , Penanggung Jawab Tanda Daftar Industri (TDI)
- 32.05 Penggantian Tanda Daftar Industri (TDI)
- 32.06 Izin Perluasan
- 32.07 Persetujuan Prinsip
- 32.08 Surat Keterangan Industri Rumah Tangga
- 32.09 Persetujuan Prinsip Industri untuk Industri di Luar Kawasan Industri/Kawasan Berikat
- 32.10 Izin Usaha Kawasan Industri
- 32.11 Izin Perluasan Kawasan Industri

33 Izin Bidang Pembangunan

- 33.00 Izin Tempat Usaha berdasarkan Undang-undang Gangguan Luas Lahan/Izin Gangguan - Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan
- 33.01 Izin Gangguan - Tempat Usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan Kelas A
- 33.02 Izin Gangguan - Tempat Usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan Kelas B
- 33.03 Izin Gangguan - Tempat Usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan Kelas C
- 33.04 Izin Gangguan - Tempat Usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan Kelas D
- 33.05 Daftar ulang Izin tempat Usaha berdasarkan Undang-undang Gangguan Luas Lahan
- 33.06 Izin perluasan tempat usaha berdasarkan undang-undang gangguan
- 33.07 Penggantian Surat Izin Tempat Usaha berdasarkan Undang-undang Gangguan Karena Hilang/Rusak
- 33.08 Balik nama/Ganti Merk Surat Izin Tempat Usaha berdasarkan Undang-undang Gangguan
- 33.09 Sertifikat Keselamatan Kebakaran
- 33.10 Rekomendasi Keselamatan Kebakaran
- 33.11 Izin Perubahan Potensi Bahaya Kebakaran
- 33.12 Izin Instalatur Peralatan Proteksi Kebakaran
- 33.13 Izin Instalasi Sistem Proteksi Kebakaran
- 33.14 Izin Produsen Peralatan Proteksi Kebakaran
- 33.15 Izin Distributor Peralatan Proteksi Kebakaran
- 33.16 Izin Produk Peralatan Proteksi Kebakaran
- 33.17 Tanda Daftar Keahlian Keselamatan Kebakaran

34 Izin Bidang Pelayanan Administrasi

- 34.00 Pelayanan Administrasi PTSP Kecamatan
- 34.01 Pelayanan Administrasi PTSP Kelurahan

XXIII. PO. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

00 Kebijakan

00.00 Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan

Naskah terkait Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan

00.01 Penyiapan Kebijakan

Naskah terkait Penyiapan Kebijakan

00.02 Perumusan dan Penyusunan Bahan

Naskah terkait Perumusan dan Penyusunan Bahan

00.03 Pemberian Masukan dan Dukungan dalam Penyusunan Kebijakan

Naskah terkait Pemberian Masukan dan Dukungan dalam Penyusunan Kebijakan

01 Pemberdayaan Pemuda

01.00 Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda

Naskah terkait Penelusuran (Duta Kepemudaan); Pengkajian (Rekomendasi Kepemudaan melalui forum kepemudaan); Pengembangan

01.01 Peningkatan Wawasan Pemuda

Naskah terkait Wawasan Kebangsaan: Program, Evaluasi; Wawasan Lingkungan: Program, Evaluasi; Wawasan Sosial dan Hukum: Program, Evaluasi

01.02 Peningkatan Kapasitas Pemuda

Naskah terkait Kapasitas Iman dan Taqwa: Program, Evaluasi; Kapasitas IPTEK: Program, Evaluasi; Pemanfaatan IPTEK: Program, Evaluasi

01.03 Peningkatan Kreativitas Pemuda (Pemetaan Kreativitas/seni kepemudaan)

Naskah terkait Pengkajian: Program, Evaluasi; Pengembangan: Program, Evaluasi; Pendayagunaan (fasilitasi): Program, Evaluasi

02 Pengembangan Pemuda

02.00 Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda

Naskah terkait Kepemimpinan: Penelusuran, Pengaderan, Pendayagunaan: Program, Evaluasi; Kepeloporan Pemuda: Kesukarelawanan. Pengembangan kepedulian, pendampingan: Program, Evaluasi

02.01 Kewirausahaan

Naskah terkait Kelembagaan: Program, Evaluasi; Pengaderan: Program, Evaluasi; Perintisan: Program, Evaluasi

02.02 Organisasi Kepemudaan Dan Pengawasan Kepramukaan

Naskah terkait Organisasi Kepemudaan: Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan: Kelembagaan dan Sumberdaya (Program dan Evaluasi); Pemberdayaan Organisasi Kemahasiswaan: Kelembagaan dan Sumberdaya (Program dan Evaluasi); Pemberdayaan Organisasi Kepelajaran: Kelembagaan dan Sumberdaya (Program dan Evaluasi); Pengawasan Kepramukaan: Kelembagaan, Program dan Sumberdaya: Pengkajian, Pengembangan

02.03 Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda

Naskah terkait Standardisasi: Organisasi Kepemudaan, Prasarana dan Sarana Kepemudaan, Infrastruktur; Infrastruktur Pemuda: Prasarana Kepemudaan, Sarana Kepemudaan

02.04 Kemitraan dan Penghargaan Pemuda

Naskah terkait Kemitraan: Lintas Sektoral, Daerah, Luar Negeri; Penghargaan Pemuda: Pengembangan Penghargaan Kepemudaan, Pengembangan Promosi Kepemudaan

03 Pembudayaan Olahraga

03.00 Pengelolaan Olahraga Pendidikan

Naskah terkait Olahraga Pendidikan Dasar dan Menengah: Pengembangan, Evaluasi; Olahraga Pendidikan Tinggi : Pengembangan, Evaluasi; Olahraga Pendidikan Nonformal dan Informal: Pengembangan, Evaluasi

03.01 Pengelolaan Olahraga Rekreasi

Naskah terkait Olahraga Massal: Pengembangan, Evaluasi; Olahraga Tradisional: Pengembangan, Evaluasi; Olahraga Petualangan, Tantangan dan Wisata: Pengembangan, Evaluasi

03.02 Pengelolaan Pembinaan Sentra dan sekolah Khusus Olahraga

Naskah terkait Sentra Olahraga: Olahraga Pendidikan (Pengembangan, Evaluasi), Olahraga Rekreasi (Pengembangan, Evaluasi), Olahraga Prestasi (Pengembangan, Evaluasi); Sekolah Khusus Olahraga: Provinsi (Pengembangan, Evaluasi), Nasional (Pengembangan, Evaluasi)

03.03 Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus

Naskah terkait Olahraga Tradisional: Lokal, Nasional; Layanan Khusus: Olahraga Usia Dini dan Lansia, Olahraga Penyandang Cacat

03.04 Kemitraan dan Penghargaan Olahraga

Naskah terkait Kemitraan Keolahragaan: Lintas Sektoral, Daerah, Luar Negeri; Penghargaan Olahraga: Penelusuran, Penyelenggaraan

04 Peningkatan Prestasi Olah Raga

04.00 Pembibitan dan IPTEK Olahraga

Naskah terkait Pembibitan Olahraga: Pemandu Bakat (Penelusuran Bakat, Penelaahan Bakat), Pengembangan Olahragawan Berbakat (Program, Evaluasi), Kompetisi (Nasional, Internasional); IPTEK Olahraga: Penerapan (Identifikasi dan Kajian, Pendayagunaan, Evaluasi dan Diseminasi), Pengembangan

04.01 Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan

Naskah terkait Tenaga Keolahragaan: Pengembangan Pelatih dan Instruktur (Nasional, Internasional), Pengembangan Wasit dan Juri (Nasional, Internasional), Pengembangan Tenaga Pendidik dan Pendukung; Organisasi Keolahragaan: Pendidikan dan Rekreasi, Olahraga Prestasi (Kelembagaan, Sumberdaya), Olahraga Fungsional dan Profesional

04.02 Industri dan Promosi Olahraga

Naskah terkait Industri Olahraga: Jasa Olahraga, Produk Olahraga, Manajemen Industri Olahraga; Promosi Olahraga: Penelusuran, Penyelenggaraan

04.03 Olahraga Prestasi

Naskah terkait Daerah: Pengembangan, Pekan dan Kejuaraan Olahraga; Nasional: Pengembangan, Pekan dan Kejuaraan Olahraga; Internasional: Pengembangan, Olympic Games

04.04 Standardisasi dan infrastruktur Olahraga

Naskah terkait Standardisasi Keolahragaan: Olahraga Prestasi, Olahraga Pendidikan dan Rekreasi; Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan: Olahraga Prestasi, Olahraga Pendidikan dan Rekreasi; Infrastruktur Olahraga: Prasarana dan sarana Olahraga Pendidikan, Prasarana dan sarana Olahraga Rekreasi, Prasarana dan sarana Olahraga Prestasi

XXIV. KR. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

00 Kebijakan

00.00 Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan

Naskah terkait pengkajian dan pengusulan kebijakan

00.01 Penyiapan Kebijakan

Naskah terkait Perumusan kebijakan dan dukungan; Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan; Penetapan dalam bentuk NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria)

01 Sumber Daya Air

01.00 Bina Penatagunaan Sumber Daya Air

Naskah terkait Perencanaan Wilayah Sungai, Pengaturan dan Pemantauan (Arsip yang berkaitan dengan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang sumber daya air, termasuk pelaksanaan bimbingan teknis), pemantauan, evaluasi dan koordinasi Lembaga wadah koordinasi, pengelola sumber daya air, badan usaha, dan peran masyarakat di bidang pengelolaan sumber daya air, Pemanfaatan Sumber Daya Air, Hidrologi dan Lingkungan Sumber Daya Air)

01.01 Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air

Naskah terkait Perencanaan Sumber Daya Air (Arsip yang berkaitan dengan perencanaan sumber daya air), pelaksanaan kebijakan strategi pengelolaan dan kelayakan pengembangan pengelolaan sumber daya air, program pengelolaan, dan prioritas pengelolaan sumber daya air), Informasi dan Data Sumber Daya Air, Keterpaduan Pemrograman.

01.02 Sungai dan Pantai

Naskah terkait Arsip pengelolaan sumber daya air pada sungai dan pantai serta pengelolaan drainase perkotaan mulai dari teknis perencanaan termasuk penyusunan dokumen detail desain (Document Engineering Design/DED) konstruksi, inventarisasi bahaya pada sungai dan pantai, pengendalian konstruksi, konservasi fisik, penyelenggaraan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, yakni: Pembinaan pengendalian konstruksi dan pengelolaan, drainase utama perkotaan, Perencanaan sungai dan pantai, Pengelolaan drainase utama perkotaan, Pemantauan, evaluasi dan pelaporan, Hasil audit konstruksi, Dokumen detail desain konstruksi sungai dan pantai, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

01.03 Irigasi dan Rawa

Naskah terkait Arsip pengelolaan sumber daya air pada irigasi dan rawa mulai dari teknis perencanaan termasuk penyusunan dokumen detail desain (Document Engineering Design/DED) konstruksi, inventarisasi bahaya pada irigasi dan rawa, pengendalian konstruksi, konservasi fisik, penyelenggaraan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja), yaitu: Pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, Pembinaan pengelolaan irigasi dan rawa, Dokumen detail desain konstruksi irigasi dan rawa,

01.04 Bendungan, Danau, Situ dan Embung

Naskah terkait Arsip pengelolaan sumber daya air pada bendungan, danau, situ, dan embung mulai dari teknis perencanaan termasuk penyusunan dokumen detail desain (Document Engineering Design/DED) konstruksi, inventarisasi bahaya pada bendungan, danau, situ, dan embung, pengendalian konstruksi, konservasi fisik, penyelenggaraan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja), yakni: Pembinaan pengelolaan bendungan dan konservasi fisik sumber daya air, Penilaian kesiapan pelaksanaan bendungan, danau, situ dan

embung dan konservasi fisik sumber daya air, Kerjasama dengan instansi terkait dan pihak pemilik bendungan, Inventarisasi, registrasi dan klasifikasi bahaya bendungan, Pemantauan, evaluasi dan pelaporan, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

01.05 Air Tanah dan Air Baku

Naskah terkait Arsip pengelolaan sumber daya air pada air tanah dan air baku mulai dari teknis perencanaan termasuk penyusunan dokumen detail desain (Document Engineering Design/DED) konstruksi, inventarisasi bahaya pada air tanah dan air baku, pengendalian konstruksi, konservasi fisik, penyelenggaraan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja), yaitu: Pembinaan pengelolaan bendungan dan konservasi fisik sumber daya air, Penilaian kesiapan pelaksanaan air tanah dan air baku dan konservasi fisik sumber daya air, Pemantauan, evaluasi dan pelaporan, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

01.06 Bina Operasi dan Pemeliharaan

Naskah terkait Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai (Arsip yang berkaitan dengan operasi dan pemeliharaan sumber daya air pada sungai dan pantai mulai dari pengelolaan operasi dan pemeliharaan, penilaian kesiapan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, bimbingan dan bantuan teknik jaringan sumber daya air, pemberdayaan masyarakat), Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa, Operasi dan Pemeliharaan Bendungan dan Danau, Fasilitasi bimbingan dan bantuan teknik jaringan Sumber Daya Air, Operasi dan Pemeliharaan Pengendalian Lumpur)

02 Bina Marga

02.00 Pengembangan Jaringan Jalan

Naskah terkait Perencanaan dan Sistem Jaringan, Program dan anggaran penyelenggaraan jalan, Pengembangan Aplikasi Manajemen Jalan, Lingkungan dan Keselamatan Jalan, Pemantauan dan Evaluasi

02.01 Pembangunan Jalan

Naskah terkait Manajemen Konstruksi, Geometrik, Perkerasan dan Drainase, Geoteknik dan Manajemen Lereng, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Jalan

02.02 Preservasi Jalan

Naskah terkait Perencanaan dan Pemrograman, Teknik Rekonstruksi dan Berkala Jalan, Teknik Pemeliharaan Rutin Jalan, Pemantauan dan Evaluasi

02.03 Jembatan

Naskah terkait Perencanaan dan Pemrograman, Teknik Jembatan, Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus Pemantauan dan Evaluasi

02.04 Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitasi Jalan Daerah

Naskah terkait Manajemen dan Evaluasi Jalan Daerah

02.05 Pengaturan Jalan Tol

Naskah terkait Persiapan perusahaan jalan tol, Pengadaan investasi jalan tol, Pengambilalihan hak perusahaan jalan tol, Pemantauan dan evaluasi, Evaluasi Rencana Teknik Akhir (RTA) dan Detail Engineering Design (DED)

03 Bina Konstruksi

03.00 Bina Investasi Infrastruktur

Naskah terkait Pembinaan Kebijakan Investasi Infrastruktur, Sinkronisasi dan Evaluasi Investasi Infrastruktur, Fasilitasi dan Mitigasi Risiko Investasi Infrastruktur, Pasar Infrastruktur

- 03.01 Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
Naskah terkait Sistem Penyelenggaraan, Kontrak Konstruksi, Konstruksi Berkelanjutan, Manajemen Mutu
- 03.02 Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi
Naskah terkait Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat, Material dan Peralatan Konstruksi, Teknologi Konstruksi dan Produk Dalam Negeri, Usaha Jasa Konstruksi
- 03.03 Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi
Naskah terkait Standar dan Materi Kompetensi, Penerapan Kompetensi, Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi, Produktivitas
- 03.04 Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi
Naskah terkait Kerjasama, Pemberdayaan Wilayah
- 03.05 Jasa Konstruksi oleh masyarakat dan pemerintah di wilayahnya
Naskah terkait Rencana Kerja Pengendalian Mutu, Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Kerja, Pengelolaan Data dan Informasi Sumber Daya, Pelaksanaan Pengendalian Mutu, Pelaporan dan Pengawasan
- 03.06 Penerapan Teknologi Konstruksi
Naskah terkait Rencana Kerja, Koordinasi, Sinkronisasi dan Kerjasama, Fasilitasi Pengembangan dan Penyebarluasan Materi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
- 03.07 Material dan Peralatan Konstruksi
Naskah terkait Rencana Kerja, Koordinasi, Sinkronisasi dan Kerjasama, Pengelolaan Data dan Aset, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

- 04 Pengembangan Infrastruktur Wilayah
- 04.00 Perencanaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Naskah terkait Rencana strategis dan analisa manfaat, Perencanaan infrastruktur
- 04.01 Pemrograman dan evaluasi keterpaduan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang
Naskah terkait Program, Sinkronisasi program dan pembiayaan, Pemantauan dan evaluasi program
- 04.02 Pengembangan kawasan strategis
Naskah terkait Program keterpaduan infrastruktur kawasan dan antarkawasan strategis, Fasilitasi pengadaan tanah
- 04.03 Pengembangan kawasan perkotaan
Naskah terkait Pengembangan infrastruktur kawasan metropolitan, Pengembangan infrastruktur kota besar dan kota baru, Pengembangan infrastruktur kota kecil dan perdesaan

XXV. RR. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

00 Kebijakan

00.00 Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan

Naskah terkait pengkajian dan pengusulan kebijakan

00.01 Penyiapan Kebijakan

Naskah terkait Perumusan kebijakan dan dukungan; Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan; Penetapan dalam bentuk NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria)

01 Cipta Karya

01.00 Keterpaduan Infrastruktur Permukiman

Naskah terkait Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan, Keterpaduan Pembiayaan, Keterpaduan Pelaksanaan, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi, Pemantauan dan Evaluasi

01.01 Pengembangan Kawasan Permukiman

Naskah terkait Perencanaan Teknis, Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan Permukiman Perdesaan, Kawasan Permukiman Khusus, Standarisasi dan Kelembagaan

01.02 Bina Penataan Bangunan

Naskah terkait Perencanaan Teknis, Penataan Bangunan Gedung Umum dan Gedung Negara, Pengelolaan Rumah Negara Daerah, Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus, Standarisasi dan Kelembagaan

01.03 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Naskah terkait Perencanaan Teknis, Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan, Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan, Sistem Penyediaan Air Minum Khusus, Standarisasi dan Kelembagaan, Fasilitasi dan penyebarluasan penerapan teknologi rancang bangun pengolahan sistem penyediaan air minum, Pengelolaan laboratorium dan bengkel kerja bidang air minum

01.04 Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman

Naskah terkait Perencanaan Teknis, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan Persampahan, Penyehatan Lingkungan Permukiman Khusus, Standarisasi dan Kelembagaan, Fasilitasi dan penyebarluasan penerapan teknologi rancang bangun pengolahan sistem penyehatan lingkungan permukiman, Pengelolaan laboratorium dan bengkel kerja bidang penyehatan lingkungan permukiman

01.05 Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum

Naskah terkait Penilaian kinerja penyelenggaraan sistem penyediaan air minum oleh Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, Fasilitasi peningkatan kinerja penyelenggaraan sistem penyediaan air minum oleh Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, Pemberian rekomendasi

02 Penyediaan Perumahan

02.00 Perencanaan Penyediaan Perumahan

Naskah terkait Keterpaduan Perencanaan, Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian, Kemitraan dan kelembagaan, Pengelolaan Data dan Informasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

02.01 Penyediaan Rumah Susun

Naskah terkait Perencanaan Teknik, Pelaksanaan Penyediaan Rumah susun, Perawatan rumah Susun, Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Supervisi, Penghunian dan pengelolaan rumah susun, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

- 02.02 Penyediaan Rumah Khusus
Naskah terkait Perencanaan teknis rumah tapak khusus, Penyediaan Rumah Tapak Khusus dan Rumah Tapak Negara, Pengelolaan Rumah Tapak Khusus, Bimbingan teknis dan supervisi, Pemantauan dan Evaluasi,
- 02.03 Penyediaan Rumah Swadaya
Naskah terkait Rencana Teknik dan Standardisasi, Fasilitasi backlog swadaya dan rumah tidak layak huni, Pelaksanaan dan pendampingan pemberian bantuan stimulan, Pemantauan, evaluasi dan pelaporan
- 02.04 Penyediaan Rumah Umum dan Komersial
Naskah terkait Perencanaan teknik dan evaluasi, Pelaksanaan bimbingan Teknis dan Supervisi, Pemberian bantuan rumah umum, Fasilitasi di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah umum dan komersial
- 03 Pembiayaan Perumahan
- 03.00 Perencanaan Pembiayaan Perumahan
Naskah terkait Koordinasi dan Keterpaduan Perencanaan, Pembiayaan Perumahan dan Analisis Pasar, Kemitraan dan kerja sama, Data dan Dokumentasi, Pemantauan, evaluasi dan pelaporan
- 03.01 Pola Pembiayaan Perumahan
Naskah terkait Perencanaan, Program dan Pelaporan, Pengembangan pola pembiayaan rumah umum dan rumah tapak, Pengembangan pola pembiayaan rumah swadaya, dan mikro perumahan, Pengembangan pola investasi rumah, Fasilitasi kemudahan dan bantuan
- 03.02 Pendayagunaan Sumber Pembiayaan
Naskah terkait Rencana, program, dan pelaporan, Pendayagunaan sumber pembiayaan primer dan sekunder, Pendayagunaan sumber tabungan perumahan dan pembiayaan lainnya
- 03.03 Bina Sistem Pembiayaan Perumahan
Naskah terkait Rencana, Program dan Pelaporan, Bimbingan Teknis dan Supervisi
- 03.04 Evaluasi Bantuan Pembiayaan Perumahan
Naskah terkait Rencana, Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan
- 03.05 Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan
Naskah terkait Layanan Pembiayaan Perumahan, Layanan Pembiayaan Perumahan
- 04 Pengembangan Infrastruktur Wilayah
- 04.00 Perencanaan Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Naskah terkait Rencana strategis dan analisa manfaat, Perencanaan infrastruktur
- 04.01 Pemrograman dan evaluasi keterpaduan infrastruktur perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan perumahan rakyat
Naskah terkait Program, Sinkronisasi program dan pembiayaan, Pemantauan dan evaluasi program
- 04.02 Pengembangan kawasan strategis
Naskah terkait Program keterpaduan infrastruktur kawasan dan antarkawasan strategis, Fasilitasi pengadaan tanah
- 04.03 Pengembangan kawasan perkotaan
Naskah terkait Pengembangan infrastruktur kawasan metropolitan, Pengembangan infrastruktur kota besar dan kota baru, Pengembangan infrastruktur kota kecil dan perdesaan

XXVI. PW. PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

00 Kebijakan

- 00.00 Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan
Naskah terkait pengkajian dan pengusulan kebijakan
- 00.01 Penyiapan Kebijakan
Naskah terkait penyiapan kebijakan
- 00.02 Perumusan dan Penyiapan Bahan
Naskah terkait perumusan dan penyiapan bahan
- 00.03 Pemberian Masukan dan Dukungan Dalam Penyusunan Kebijakan
Naskah terkait pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan
- 00.04 Penetapan dalam bentuk Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
Naskah terkait penetapan dalam bentuk norma, standar, prosedur, dan kriteria

01 Pengembangan Destinasi Pariwisata

- 01.00 Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata
Naskah terkait kawasan ekonomi khusus pariwisata (kawasan strategis pariwisata); kawasan pengembangan destinasi pariwisata (perancangan destinasi pariwisata); pengembangan zona kreatif; investasi pariwisata
- 01.01 Pengembangan Daya Tarik Wisata
Naskah terkait bimtek daya tarik wisata; fasilitasi pengembangan daya tarik wisata; sertifikasi profesi kepariwisataan dan sdm; pengembangan daya tarik wisata kota pusaka; penilaian kelayakan tugas pembantuan; penghargaan pengelolaan daya tarik wisata (cipta award)
- 01.02 Industri Pariwisata
Naskah terkait sarana pariwisata; jasa pariwisata; pengembangan produk dan pelayanan; pembinaan industri pariwisata
- 01.03 Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata
Naskah terkait perancangan dan pemantauan pemberdayaan pariwisata; peningkatan kapasitas masyarakat desa; kemitraan dan kelembagaan masyarakat
- 01.04 Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan Event
Naskah terkait pengembangan wisata kuliner dan belanja; pengembangan rekreasi dan hiburan; pengembangan wisata alam dan budaya; pengembangan wisata konvensi, insentif dan event

02 Pemasaran Pariwisata

- 02.00 Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata
Naskah terkait informasi pasar dalam negeri; informasi pasar luar negeri; hubungan lembaga pariwisata dan widya wisata; perancangan pemasaran pariwisata
- 02.01 Promosi Pariwisata Luar Negeri dan Hubungan International Pariwisata
Naskah terkait wilayah ASEAN; wilayah Asia; wilayah Timur Tengah dan Afrika; wilayah Amerika dan Pasifik; wilayah Eropa
- 02.02 Promosi Pariwisata Dalam Negeri
Naskah terkait promosi pariwisata dalam negeri
- 02.03 Komunikasi dan Media Pariwisata
Naskah terkait komunikasi media cetak, media elektronik dan digital, dan media ruang; sarana dan distribusi media
- 02.04 Pencitraan Indonesia
Naskah terkait strategi pencitraan indonesia; komunikasi media cetak, media elektronik dan digital, dan media ruang; kerjasama dan kemitraan

- 02.05 Promosi Konvensi, Insentif, Event, dan Minat Khusus
Naskah terkait promosi KIE korporasi; promosi KIE pemerintah dan non pemerintah; promosi minat khusus

- 03 Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya
 - 03.00 Pengembangan industri Perfilman
Naskah terkait fasilitasi industri perfilman; festival dan eksibisi film; produksi; pemasaran film
 - 03.01 Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik
Naskah terkait pengembangan seni pertunjukan; pengembangan industri musik; pemasaran seni pertunjukan dan industri musik; infrastruktur dan dokumentasi seni pertunjukan dan industri musik
 - 03.02 Pengembangan Seni Rupa
Naskah terkait pengembangan seni rupa murni, seni rupa terapan, fotografi; pemasaran dan pengembangan apresiasi

- 04 Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Iptek
 - 04.00 Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media
Naskah terkait pengembangan film animasi dan komik; pengembangan tulisan fiksi dan non fiksi; pengembangan karya kreatif audio dan video; pengembangan karya kreatif periklanan
 - 04.01 Desain dan Arsitektur
Naskah terkait arsitektur dan desain interior; komunikasi visual; desain produk dan kemasan; mode
 - 04.02 Kerjasama dan Fasilitasi
Naskah terkait lisensi teknologi; sentra inovasi dan inkubator bisnis; sentra kreatif; akses pembiayaan

- 05 Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - 05.00 Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisata
Naskah terkait program dan evaluasi; data dan publikasi
 - 05.01 Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif
Naskah terkait program dan evaluasi; data dan publikasi
 - 05.02 Pengembangan SDM Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif
Naskah terkait program dan evaluasi; penyelenggaraan dan kerjasama
 - 05.03 Kompetensi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif
Naskah terkait program dan evaluasi; evaluasi dan kerjasama

XXVII. PS. PERSANDIAN

00 Kebijakan

00.00 Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan

Naskah terkait pengkajian dan pengusulan kebijakan

00.01 Penyiapan Kebijakan

Naskah terkait penyiapan kebijakan

00.02 Perumusan Kebijakan

Naskah terkait perumusan kebijakan

00.03 Masukan dan Dukungan Kebijakan

Naskah terkait masukan dan dukungan kebijakan

00.05 Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)

Naskah terkait penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK)

01 Pembinaan dan Pengendalian Persandian

01.00 Sumber Daya Manusia (SDM)

Naskah terkait Data Personel Sandi; Pembinaan Personel Sandi; Pengawasan dan Pengendalian

01.01 Materiil dan jaring komunikasi sandi

Naskah terkait Data Materiil dan JKS; Analisa Kebutuhan Materiil dan Jaringan Komunikasi Sandi

01.02 Akreditasi dan Sertifikasi

Naskah terkait Akreditasi Diklat; Sertifikasi Alat

02 Pengamanan Persandian

02.00 Pengamanan sinyal teknik sandi dan kripto

Naskah terkait Pelaksanaan; Pelaporan

02.01 Analisis sinyal teknis sandi dan kripto

Naskah terkait Pelaksanaan; Pelaporan

02.02 Materi sandi sistem dan peralatan

Naskah terkait Pelaksanaan; Pelaporan

03 Pengkajian persandian: Kriptografi, Peralatan Sandi, Komunikasi Sandi

03.00 Perencanaan Pengkajian

Naskah terkait Perencanaan Pengkajian

03.01 Administrasi Pengkajian

Naskah terkait Administrasi Pengkajian

03.02 Pelaksanaan

Naskah terkait Pelaksanaan

03.03 Pelaporan

Naskah terkait Pelaporan

03.04 Pelatihan/Workshop/Seminar dalam Rangka Mendukung Kegiatan Pengkajian/Pengembangan Persandian

Naskah terkait Pelatihan/Workshop/Seminar dalam Rangka Mendukung Kegiatan Pengkajian / Pengembangan Persandian

04 Keamanan Informasi

04.00 Tata Kelola Keamanan Informasi

Naskah terkait Tata Kelola Keamanan Informasi

04.01 Teknologi Keamanan Informasi

Naskah terkait Infrastruktur; Aplikasi

04.02 Monitoring, Evaluasi, dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi

Naskah terkait Infrastruktur; Aplikasi

XXVIII. SO. SOSIAL

00 Kebijakan

00.00 Penyusunan Rencana Strategis

Naskah terkait penyusunan rencana strategis

00.01 Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan

Naskah terkait pengkajian dan pengusulan kebijakan

00.02 Penyiapan Kebijakan

Naskah terkait penyiapan kebijakan

00.03 Perumusan Kebijakan

Naskah terkait perumusan kebijakan

00.04 Masukan dan Dukungan Kebijakan

Naskah terkait masukan dan dukungan kebijakan

00.05 Penetapan NSPK

Naskah terkait penetapan NSPK

00.06 Pelayanan rekomendasi, pengawasan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi perizinan dan non perizinan di bidang sosial

Naskah terkait pelayanan rekomendasi, pengawasan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi perizinan dan non perizinan di bidang sosial

01 Rehabilitasi Sosial

01.00 Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia

Naskah terkait pelayanan rekomendasi pengangkatan anak dan izin pengasuhan anak; kesejahteraan sosial anak terlantar; kesejahteraan sosial anak berhadapan dengan hukum yang meliputi perlindungan dan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum, pengembangan remaja; registrasi, identifikasi, asistensi dan rehabilitasi sosial anak, remaja dan lanjut usia; kesejahteraan sosial anak dengan kecacatan; rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan tubuh dan bekas penderita penyakit kronis, netra dan rungu wicara, mental yang meliputi dalam panti dan luar panti; kelembagaan dan advokasi sosial; asistensi dan pemeliharaan kesejahteraan sosial; kesejahteraan sosial anak yang membutuhkan perlindungan khusus; pencegahan timbulnya permasalahan sosial anak, remaja dan lanjut usia; pengembangan peran serta masyarakat dalam pelayanan dan rehabilitasi sosial anak, remaja dan lanjut usia

01.01 Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Tindak Kekerasan

Naskah terkait koordinasi pengendalian, penjangkauan, penyaluran dan rujukan PMKS; koordinasi, pembinaan teknis dan rehabilitasi sosial tuna sosial, ODHA, BWBLP dan korban penyalahgunaan NAPZA dan korban tindak kekerasan; pencegahan penyalahgunaan NAPZA dan pengembangan peran masyarakat; rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA (narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain) dalam institusi dan luar institusi; pelayanan sosial lanjut usia; rehabilitasi sosial tuna sosial

01.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

Naskah terkait registrasi, identifikasi, asistensi dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas; pencegahan, permasalahan sosial penyandang disabilitas; koordinasi dan pembinaan teknis pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas; pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelayanan dan rehabilitasi penyandang disabilitas

02 Perlindungan dan Jaminan Sosial

02.00 Pengumpulan dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial

Naskah terkait bimbingan dan standardisasi

- 02.01 Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan pekerja migran
Naskah terkait perlindungan sosial korban tindak kekerasan; perlindungan sosial pekerja migran; evaluasi dan pelaporan
- 02.02 Pemulihan dan Reintegrasi Sosial
Naskah terkait pencegahan timbulnya konflik sosial dan musibah sosial lainnya; pelayanan dukungan psikososial dan pelopor perdamaian; pemulangan orang terlantar ke daerah asal; pemulangan orang terlantar ke daerah asal; koordinasi dan pembinaan teknis pelaksanaan pemulihan dan reintegrasi sosial
- 02.03 Perlindungan Sosial Korban Bencana
Naskah terkait koordinasi, kerja sama, fasilitasi dan penyediaan prasarana dan sarana penampungan sementara dan pemberian bantuan sosial korban bencana; pendataan dan verifikasi data korban bencana; pelatihan tenaga penanggulangan korban bencana dan musibah lainnya; perlindungan sosial korban bencana sosial; perlindungan sosial korban bencana alam; jaminan sosial
- 03 Pemberdayaan
- 03.00 Pemberdayaan keluarga dan kelembagaan Sosial
Naskah terkait ketahanan keluarga meliputi bimbingan kesejahteraan sosial keluarga, konsultasi dan advokasi keluarga; asistensi keluarga dan pemberdayaan perempuan; tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan organisasi sosial; kemitraan dunia usaha meliputi kerjasama, bimbingan sosial; karang taruna meliputi kelembagaan, pengembangan kapasitas
- 03.01 Pemberdayaan komunitas adat terpencil
Naskah terkait persiapan pemberdayaan; pemberdayaan sumber daya manusia; penggalian dan pengembangan potensi; keserasian dan penguatan komunitas adat terpencil; kerja sama kelembagaan
- 03.02 Penanggulangan kemiskinan perkotaan dan Perdesaan
Naskah terkait identifikasi dan analisis; pengembangan kapasitas; penataan sosial lingkungan kumuh; advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas
- 03.03 Pemberdayaan Peran Serta Dunia Usaha dan Bina Undian
Naskah terkait pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang dan/atau barang; peran serta dan kemitraan masyarakat serta dunia usaha; pendataan dan verifikasi data pemberdayaan peran serta dunia usaha dan penyelenggaraan undian gratis berhadiah serta pengumpulan uang dan/atau barang; melaksanakan promosi dan penyuluhan kesejahteraan sosial
- 03.04 Pemberdayaan Tenaga dan Lembaga Kesejahteraan Sosial
Naskah terkait registrasi, identifikasi dan asistensi, tenaga kesejahteraan sosial dan lembaga kesejahteraan sosial; pembinaan tenaga, lembaga kesejahteraan sosial dan lembaga kesejahteraan sosial asing; pemberian dukungan teknis, bantuan usaha, penghargaan dan fasilitasi tenaga dan lembaga kesejahteraan sosial; pengawasan dan pengendalian lembaga kesejahteraan sosial
- 03.05 Kepahlawanan, Keberintisan dan Kesetiakawanan Sosial
Naskah terkait registrasi dan identifikasi data pahlawan, janda pahlawan, perintis kemerdekaan, janda perintis kemerdekaan; penghargaan dan kesejahteraan keluarga pahlawan; pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keberintisan meliputi identifikasi, pendayagunaan; pengembangan kesetiakawanan sosial meliputi penggalian nilai, pelestarian nilai; pemeliharaan taman makan pahlawan nasional provinsi

- 04 Pengembangan Kesejahteraan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
- 04.00 Pengembangan, Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial
Naskah terkait publikasi dan penyebarluasan informasi serta pemeliharaan data maupun informasi bidang social; pengembangan kerjasama serta kemitraan dengan media maupun organisasi kemasyarakatan; pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan serta pengembangan pelayanan, penyebarluasan data maupun informasi bidang sosial
- 04.01 Fasilitas Kesejahteraan Sosial
Naskah terkait penyediaan prasarana dan sarana kesejahteraan social; rehab fasilitas pelayanan penyelenggaraan kesejahteraan social; koordinasi dan kerja sama dalam kegiatan penyediaan, pengembangan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kesejahteraan social; pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan fasilitas kesejahteraan sosial
- 05 Pusat Data Informasi Jaminan Sosial
- 05.00 Pengumpulan dan Pengolahan Data
Naskah terkait pendaftaran penduduk miskin daerah; pemutakhiran data Basis Data Terpadu (BDT); petugas pendata dan pendamping sosial
- 05.01 Layanan dan Pengaduan
Naskah terkait pelayanan dan pengaduan; monitoring dan evaluasi
- 05.02 Pengelolaan Sistem Informasi
Naskah terkait pengembangan dan pengelolaan sistem; tenaga ahli sistem informasi
- 05.03 Sekretariat PPIJ
Naskah terkait pemeliharaan sarana dan prasarana; fasilitasi dan kordinasi kegiatan-kegiatan dengan badan manajemen JIC; pemanfaatan prasarana dan sarana; pengelolaan penggunaan dan pemanfaatan aset gedung untuk kegiatan masyarakat

XXIX. ST. STATISTIK

00 Kebijakan

00.00 Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan

Naskah terkait pengkajian dan pengusulan kebijakan

00.01 Penyiapan Kebijakan

Naskah terkait Penyiapan Kebijakan

00.02 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan

Naskah terkait Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan

00.03 Pengembangan desain dan standarisasi

Naskah terkait Pengembangan desain dan standarisasi

00.04 Penetapan dalam bentuk Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)

Naskah terkait Penetapan dalam bentuk Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)

01 Survei

01.00 Perencanaan

Naskah terkait Master Plan dan Network planing; Perumusan dan penyusunan bahan; Studi pendahuluan (desk study)

01.01 Persiapan

Naskah terkait Penyusunan rancangan organisasi kegiatan sensus; Penyusunan Koesioner; Penyusunan konsep dan definisi; Penyusunan metodologi (cakupan, organisasi, lapangan, ukuran statistik, prosedur); Penyusunan buku pedoman (pencacahan, pengawasan, pengolahan); Penyusunan peta wilayah kerja dan muatan peta wilayah; Penyusunan pedoman sosialisasi; Sosialisasi kegiatan kepada stakeholder dan sumber data (leaflet, poster, pertemuan); Pelaksanaan pertemuan koordinasi (intern dan ekstern); Pelaksanaan pelatihan instruktur (TOT); Pelaksanaan pelatihan petugas; Penyusunan program pengolahan (rule validasi, pemeriksaan data entri, tabulasi); Pelatihan petugas pengolahan; Perancangan table; Pelaksanaan Ujicoba

01.02 Pelaksanaan Lapangan

Naskah terkait Pelaksanaan listing; Pemilihan sampel; Pengumpulan data; Pemeriksaan; Pengawasan Lapangan; Monitoring kualitas

01.03 Pengolahan

Naskah terkait Pengelolaan dokumen (penerimaan/ pengiriman, pengelompokan/Batching); Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing/Coding); Perekaman data (entri, scanner); Tabulasi Data; Pemeriksaan tabulasi; Laporan konsistensi tabulasi

01.04 Analisis dan Penyajian Hasil Survei

Naskah terkait Pembahasan angka hasil pengolahan; Penyusunan angka sementara; Penyusunan angka tetap; Penyusunan/pembahasan draft publikasi; Analisis data; Penyusunan publikasi

01.05 Diseminasi hasil Survei

Naskah terkait Penyusunan bahan diseminasi; Sosialisasi hasil survei melalui berbagai media

02 Konsolidasi Data Statistik

02.00 Kompilasi Data

Naskah terkait Kompilasi Data

02.01 Analisis Data

Naskah terkait Analisis Data

02.02 Penyusunan Publikasi

Naskah terkait Penyusunan Publikasi

03 Evaluasi dan Pelaporan Sensus, Survei, dan Konsolidasi Data Statistik
Naskah terkait Evaluasi dan Pelaporan Sensus, Survei, dan Konsolidasi
Data Statistik

XXX. PT. PERTANIAN

00 Kebijakan

- 00.00 Pengkajian, Pengusulan dan penyiapan
Naskah terkait pengkajian dan pengusulan kebijakan; Penyiapan Bahan
- 00.01 Perumusan Kebijakan
Naskah terkait perumusan kebijakan
- 00.02 Pemberian Masukan dan Dukungan Dalam Penyusunan Kebijakan
Naskah terkait pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan
- 00.03 Penetapan Berbentuk NSPK
Naskah terkait penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria

01 Peternakan dan Kesehatan Hewan

- 01.00 Perbibitan Ternak
Naskah terkait produksi bibit ternak Ruminansia; Produksi Bibit Ternak Non Ruminansia; Penilaian dan Pelepasan Bibit ternak; Mutu Bibit ternak; Pengembangan Bibit Ternak; Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/Pengeluaran Pakan Ternak
- 01.01 Budidaya Ternak
Naskah terkait Ternak Potong ; Ternak Perah; Ternak Unggas dan Aneka Ternak; Usaha dan Kelembagaan
- 01.02 Kesehatan Hewan
Naskah terkait Pengamatan Penyakit Hewan; Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan; Perlindungan Hewan; Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan; Pengawasan Obat Hewan
- 01.03 Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen
Naskah terkait Pascapanen; Higiene Sanitasi; Pengawasan Sanitary dan Keamanan Produk Hewan; Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan; Pengujian dan Sertifikasi Produk Hewan; Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran

02 Perkebunan

- 02.00 Tanaman Semusim
Naskah terkait Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya; Perbenihan; Budidaya; Pemberdayaan dan Kelembagaan
- 02.01 Tanaman Rempah dan Penyegar
Naskah terkait Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya; Perbenihan; Budidaya; Pemberdayaan dan Kelembagaan
- 02.02 Tanaman Tahunan
Naskah terkait Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya; Perbenihan; Budidaya; Pemberdayaan dan Kelembagaan
- 02.03 Perlindungan Perkebunan
Naskah terkait Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim; Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar; Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan tanaman tahunan; Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran
- 02.04 Pascapanen dan Pembinaan Usaha
Naskah terkait Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar; Pascapanen Tanaman Tahunan; Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan; Gangguan Usaha dan Penanganan Konflik

03 Holtikultura

03.00 Perlindungan Holtikultura

Naskah terkait Perlindungan Tanaman Buah; Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat; Perlindungan Tanaman Florikultura; Dampak iklim dan Persyaratan Teknis

03.01 Perbenihan Holtikultura

Naskah terkait Penilaian Varietas; Pengawasan Mutu Benih; Budidaya dan Pascapanen Florikultura

04 Prasarana dan Sarana Pertanian

04.00 Perluasan dan Pengelolaan Lahan

Naskah terkait Basis Data Lahan; Pengendalian Lahan; Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan; Perluasan Kawasan Tanaman Pangan; Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan

04.01 Pengelolaan Air Irigasi

Naskah terkait Pengembangan Sumber Air; Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air; Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup; Kelembagaan

04.02 Pembiayaan Pertanian

Naskah terkait Pembiayaan Program; Pembiayaan Syariah dan Kerja Sama; Pembiayaan Agribisnis; Kelembagaan dan Pemberdayaan Agribisnis

04.03 Pupuk Pestisida

Naskah terkait Pupuk Organik dan Pembenh Tanah; Pupuk Anorganik; Pestisida; Pengawasan Pupuk dan Pestisida

04.04 Alat dan Mesin Pertanian

Naskah terkait Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian; Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian; Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian

05 Tanaman Pangan

05.00 Perbenihan Tanaman Pangan

Naskah terkait Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih; Produksi Benih Serealia; Produksi Benih Aneka Kacang dan Umbi; Kelembagaan Benih

05.01 Budidaya Serelia

Naskah terkait Padi Irigasi dan Rawa; Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering; Jagung; Serealia Lain

05.02 Budidaya Aneka Kacang dan Umbi

Naskah terkait Kedelainya; Ubi Kayu; Aneka Kacang; Aneka Umbi

05.03 Perlindungan Tanaman Pangan

Naskah terkait Pengelolaan Data Organisme Pengganggu Tumbuhan; Dampak Perubahan Iklim; Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan; Pengelolaan Pengendalian Hama Terpadu; Kelembagaan pengelolaan pengendalian hama terpadu, serta analisis mengenai dampak lingkungan.

05.04 Pascapanen Tanaman Pangan

Naskah terkait Padi; Jagung dan Serealia Lain; Kedelai dan Aneka Kacang; Aneka Umbi

06 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian

06.00 Pengolahan Hasil Pertanian

Naskah terkait Tanaman Pangan; Hortikultura; Perkebunan; Peternakan

- 06.01 Mutu dan Standarisasi
Naskah terkait Standardisasi; Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu; Akreditasi dan Kelembagaan; Kerjasama dan Harmonisasi
- 06.02 Pengembangan Usaha dan Investasi
Naskah terkait Kemitraan dan Kewirausahaan; Investasi; Promosi Dalam Negeri; Promosi Luar Negeri
- 06.03 Pemasaran Domestik
Naskah terkait Informasi Pasar; Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga; Sarana dan Kelembagaan Pasar; Jaringan Pemasaran
- 06.04 Pemasaran Internasional
Naskah terkait Analisis dan Pengembangan Ekspor; Pemasaran Bilateral; Pemasaran Regional dan Multilateral; Kerjasama Komoditi

- 07 Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Pertanian
- 07.00 Administrasi
Naskah terkait Administrasi
- 07.01 Hasil Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan
Naskah terkait Hasil Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan
- 07.02 Diseminasi
Naskah terkait Diseminasi
- 07.03 Publikasi Hasil Penelitian/Pengkajian
Naskah terkait Publikasi Hasil Penelitian/ Pengkajian
- 07.04 Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan
Naskah terkait Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan
- 07.05 Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan
Naskah terkait Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan
- 07.06 Data Penelitian dan Pengembangan
Naskah terkait Data Penelitian dan Pengembangan
- 07.07 Evaluasi Penelitian/ Pengkajian dan Pengembangan
Naskah terkait Evaluasi Penelitian/Pengkajian dan Pengembangan

- 08 Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI)
- 08.00 Hak Cipta
Naskah terkait Hak Cipta
- 08.01 Hak Paten Sederhana
Naskah terkait Hak Paten Sederhana
- 08.02 Hak Paten Biasa
Naskah terkait Hak Paten Biasa
- 08.03 Hak Merek
Naskah terkait Hak Merek
- 08.04 Pendaftaran Varietas Tanaman
Naskah terkait Pendaftaran Varietas Tanaman
- 08.05 Permohonan Hak PVTT Tanaman Semusim
Naskah terkait Permohonan Hak PVTT Tanaman Semusim
- 08.06 Permohonan Hak PVTT Tanaman tahunan
Naskah terkait Permohonan Hak PVTT Tanaman Tahunan
- 08.07 Permohonan HKI yang ditolak
Naskah terkait Permohonan HKI yang ditolak
- 08.08 Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan
Naskah terkait Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan
- 08.09 Data Penelitian dan Pengembangan
Naskah terkait Data Penelitian dan Pengembangan

09 Ketahanan Pangan

09.00 Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Naskah terkait Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

09.01 Distribusi dan Cadangan Pangan

Naskah terkait Distribusi dan Cadangan Pangan

09.02 Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan

Naskah terkait Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan

09.03 Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan

Naskah terkait Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan

10 Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

10.00 Pelayanan Perlindungan Varietas Tanaman

Naskah terkait Pelayanan Perlindungan Varietas Tanaman

10.01 Pelayanan Perijinan Pertanian

Naskah terkait Pelayanan Perijinan Pertanian

10.02 Pelayanan Hukum

Naskah terkait Pelayanan Hukum

11 Bimbingan Teknis

Naskah terkait Bimbingan Teknis

12 Evaluasi

Naskah terkait Evaluasi

XXXI. ES. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

00 Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi (EBTKE)

00.00 Energi Baru Terbarukan (EBT)

Naskah terkait Data PLTS yang telah dibangun Pemprov. DKI Jakarta; Data Produksi Listrik PLTS yang telah dibangun Pemprov. DKI Jakarta

00.01 Penempatan & Konservasi Energi (P&K)

Naskah terkait Data Kuota LPG 3 Kg di Prov. DKI Jakarta; Data Pemanfaatan Lifting Migas (Dana Bagi Hasil) di Prov. DKI Jakarta

00.02 Usul Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Daerah dan Lembaga

Naskah terkait Proposal dan Dokumen Pendukung Usulan Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Daerah dan Lembaga; Matriks Evaluasi Dokumen Usulan Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Daerah dan Lembaga; Surat Tanggapan Usulan Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Daerah dan Lembaga

00.03 Perencanaan Pembangunan Infrastruktur

Naskah terkait Program Kerja Unit Kerja di Bidang EBTKE; Program Kerja Prioritas Nasional Bidang EBTKE

00.04 Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Bidang EBTKE

Naskah terkait Penyusunan Feasibility Study/Detail Engineering Design/Basic Engineering Design; Kerangka Acuan Kerja (KAK) serta Rencana Anggaran dan Biaya (RAB)

00.05 Evaluasi Program Kerja

Naskah terkait Program Kerja Unit Kerja di Bidang EBTKE; Program Kerja Prioritas Nasional Bidang EBTKE

01 Ketenagalistrikan

01.00 Pembinaan Program Tenaga Listrik

Naskah terkait Investasi dan pendanaan tenaga listrik : a. Dokumen grant/hibah/loan agreement luar negeri, b. Monitoring loan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, c. Laporan penanganan permasalahan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, Laporan kegiatan investasi dan pendanaan tenaga listrik; Pengembangan listrik pedesaan : a. Data program listrik pedesaan, b. Data rasio elektrifikasi (RE) dan Rasio Desa Berlistrik (RD), Monitoring dan evaluasi listrik pedesaan, Listrik untuk masyarakat tidak mampu

01.01 Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan

Naskah terkait Kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan : a. Dokumen kegagalan operasi instalasi tenaga listrik, Dokumen inspeksi rutin Inspektur Ketenagalistrikan untuk kelaikan instalasi dan keselamatan ketenagalistrikan, Dokumen forum komunikasi pembinaan inspektur ketenagalistrikan

01.02 Perlindungan lingkungan ketenagalistrikan

Naskah terkait Dokumen forum keselamatan instalasi pemanfaatan tenaga listrik; Dokumen pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup sektor ketenagalistrikan; Laporan pembinaan dan pengawasan lingkungan ketenagalistrikan; Dokumen perhitungan faktor emisi Clean Development Mechansim (CDM)

01.03 Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan

Naskah terkait Model Pengembangan Biofuel; Survei dan Pra-FS Potensi Panas bumi, PLT mikro Hidro, Angin dan Surya di daerah terpilih 2 Tahun 10 Tahun Permanen

- 01.04 Teknologi Ketenagalistrikan
Naskah terkait Pengembangan Teknologi Smart Grid; Kerjasama pengembangan teknologi PLTMH; Penelitian dan Pengembangan Teknologi Nuklir, Atom, Titanium
- 01.05 Lingkungan dan Konservasi Energi
Naskah terkait Penelitian dan Pengembangan Teknologi PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) dan Konservasi Energi
- 02 Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara
- 02.00 Perumusan RSNI (Rancangan Standar Nasional Indonesia)/ RSKKNI (Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia)
Naskah terkait Draft Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI)/Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI); Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI)/Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) hasil Konsensus/Konvensi; Standar Nasional Indonesia (SNI) /Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)
- 02.01 Pengawasan Standardisasi
Naskah terkait Pengawasan Standardisasi
- 02.02 Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang
Naskah terkait Permohonan Pengajuan Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang; Makalah Presentasi Calon Kepala Teknik; Persetujuan/Pengesahan Penunjukan Kepala/wakil Kepala Teknik Selama tidak ada penggantian
- 02.03 Pengawasan Keselamatan Kegiatan dan Keselamatan Pekerja
Naskah terkait Laporan Kecelakaan Tambang/Statistik; Kartu Izin Meledakan (KIM); Laporan Bulanan Bahan Peledak; Laporan Hasil Pemeriksaan Teknis Platform; Laporan Hasil Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
- 02.04 Pemeriksaan teknis dan pengujian instalasi dan peralatan tambang
Naskah terkait Dokumen Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi dan Peralatan Tambang; Sertifikat Kelayakan Konstruksi Platform; Surat Izin Laik Operasi; Izin Mendirikan dan Menggunakan Gudang/Kontainer Bahan Peledak; Sertifikat Kelayakan Penggunaan Peralatan; Rekomendasi Izin Pembelian dan Penggunaan (P2) Bahan Peledak (Izin dikeluarkan oleh Polri); Rekomendasi Pemusnahan Bahan Peledak (Izin dikeluarkan oleh Polri); Register Nomor Sertifikat dan Izin; SKPP (Sertifikat Kelayakan Penggunaan Peralatan); Dokumen SK dan Lampiran Kapal Keruk/Kapal Isap; Dokumen SK dan Lampiran Tanki Bahan Bakar Cair; Surat Tugas Inspeksi; Berita Acara Hasil Inspeksi; Surat Rekomendasi Perbaikan Hasil Inspeksi 2 Tahun 3 Tahun Permanen
- 02.05 Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
Naskah terkait Surat Permohonan Persetujuan Dokumen UKL/UPL; Berita Acara Pembahasan Dokumen; Surat Persetujuan dan Dokumen UKL/UPL
- 02.06 Rekomendasi bahan kimia
Naskah terkait Rekomendasi bahan kimia
- 02.07 Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
Naskah terkait Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)/Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) ; Laporan Pelaksanaan UKL/UPL 2 Tahun 5 Tahun Permanen; Laporan Catatan Perusahaan Tentang Terjadinya Pencemaran; Laporan Terjadinya Pencemaran (LPL-1) 2 Tahun 5 Tahun Permanen; Laporan Hasil Analisa Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) 2 Tahun 5 Tahun Permanen; Laporan

- Pengelolaan Lingkungan; Dokumen Rencana Reklamasi; Surat Penetapan Jaminan Reklamasi; Laporan Data Penggunaan Lahan Pertambangan; Dokumen Rencana Pasca Tambang; Surat Penetapan Jaminan Pasca Tambang
- 02.08 Laporan berkala teknik dan lingkungan pertambangan/laporan tahunan pelaksanaan reklamasi
Naskah terkait Laporan Bulanan Terjadinya Pencemaran (LPL-5); Laporan Bulanan Bahan Kimia untuk Penanggulangan Pencemaran dan Proses Produksi (LPL-2); Laporan Bulanan Analisa Air Buangan (LPL-5); Laporan Bulanan Analisa Slud (LPL-3); Laporan Triwulan Kinerja Teknik dan Lingkungan; Laporan Tahunan Kelengkapan Peralatan Penanggulangan Pencemaran Mekanis (LPL-4); Laporan Tahunan Pelaksanaan Reklamasi
- 02.09 Pemberian Penghargaan
Naskah terkait Lingkungan Pertambangan : Permohonan Mendapatkan Penghargaan, Penugasan Dalam Rangka Verifikasi, Hasil Evaluasi Verifikasi, Salinan Tanda Penghargaan; Keselamatan Kerja : Permohonan Mendapatkan Penghargaan, Penugasan Dalam Rangka Verifikasi, Hasil Evaluasi Verifikasi, Salinan Tanda Penghargaan; Keselamatan Kerja : Permohonan Mendapatkan Penghargaan, Penugasan Dalam Rangka Verifikasi, Hasil Evaluasi Verifikasi, Salinan Tanda Penghargaan; Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan lingkungan Pertambangan; Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan
- 02.10 Pengawasan lingkungan pertambangan
Naskah terkait Surat Tugas Inspeksi; Tindak Lanjut Hasil Inspeksi; Supervisi
- 02.11 Usaha Jasa Mineral dan Batubara
Naskah terkait Izin Usaha Jasa Pertambangan
- 02.12 Pembinaan dan pengawasan usaha jasa mineral dan batubara
Naskah terkait Laporan Pembinaan Usaha Jasa Mineral Dan Batubara; Laporan Hasil Pengawasan Usaha Jasa Mineral Dan Batubara; Laporan Hasil Evaluasi Triwulan/Tahun IUJP

XXXII. PA. PENGAWASAN

00 Rencana Pengawasan

00.00 Rencana Strategis

Naskah terkait rencana strategis inspektorat

00.01 Rencana Kerja Tahunan

Naskah terkait Rencana Kerja Tahunan

00.02 Rencana dan Penetapan Kinerja Tahunan

Naskah terkait rencana dan penetapan kinerja tahunan

00.03 Rakor Pengawasan Tingkat Nasional

Naskah terkait rakor pengawasan tingkat daerah/nasional

01 Pelaksanaan Pengawasan

01.00 Laporan yang memerlukan tindak lanjut (TL)

Naskah terkait laporan yang memerlukan TL

01.01 Laporan yang tidak memerlukan TL

Naskah terkait laporan yang tidak memerlukan TL

01.02 Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat

Naskah terkait laporan perkembangan penanganan surat pengaduan masyarakat

01.03 Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan

Naskah terkait laporan pemutakhiran data tindak lanjut temuan

01.04 Laporan Perkembangan Barang Milik Negara

Naskah terkait laporan perkembangan barang milik negara

01.05 Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan tidak memerlukan TL

Naskah terkait Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan tidak memerlukan TL

01.06 Good Corporate Governance (GCG)

Naskah terkait Good Corporate Governance (GCG)

02 Pengawasan Keuangan

02.00 Kebijakan Pengawasan

Naskah terkait pengkajian dan pengusulan kebijakan; penyiapan kebijakan; perumusan kebijakan; masukan dan dukungan kebijakan; penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)

02.01 Rencana Pengawasan

Naskah terkait rencana strategis pengawasan; rencana kerja pengawasan tahunan; rencana kinerja tahunan pengawasan; penetapan kinerja tahunan pengawasan; rakor pengawasan tingkat nasional; rakor pengawasan tingkat daerah

02.02 Hasil Pelaksanaan Pengawasan

Naskah terkait audit; hasil reviu; hasil evaluasi; hasil pemantauan/monitoring; hasil bimbingan teknis/konsultasi/asistensi/sosialisasi

02.03 Analisis, Evaluasi dan Pengolahan Hasil Pengawasan

Naskah terkait analisis, evaluasi dan pengolahan hasil pengawasan

02.04 Dokumen Penyelesaian Kerugian Daerah

Naskah terkait tuntutan perbendaharaan; tuntutan ganti rugi

XXXIII. UD. KEUANGAN

00 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)

00.00 Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA)

Naskah terkait Kebijakan Umum, Strategi, Prioritas dan Renstra; Dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang telah dibahas bersama antara DPRD dan Pemda; KUA beserta Nota Kesepakatannya; Dokumen Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) ; Nota Kesepakatan PPA ; Prioritas Plafon Anggaran; Dokumen Perencanaan Penetapan Pendapatan (APBD)

00.01 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)

Naskah terkait Dokumen Pedoman Penyusunan RKA-SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah; Dokumen RKA-SKPD

00.02 Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Naskah terkait Pengantar Nota Keuangan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Daerah RAPBD; Hasil Pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah ; Dokumen Persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah tentang Raperda APBD ; Dokumen Rancangan Penjabaran APBD beserta Lampirannya ; Penyampaian Permohonan Evaluasi kepada Menteri Dalam Negeri tentang RAPBD beserta penjabarannya; Hasil Evaluasi Menteri Dalam Negeri tentang RAPBD; Penetapan Perda APBD oleh Gubernur beserta Penjabarannya; Peraturan Daerah (PERDA) tentang APBD

00.03 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P)

Naskah terkait Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Perubahan; Pergeseran Anggaran; Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Perubahan; Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); Pengusulan Komponen APBD dan APBD Perubahan

01 Penyusunan Anggaran

01.00 Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan

Naskah terkait Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan

01.01 Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota/ Kabupaten

Naskah terkait Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten/Kota

01.02 Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah

Naskah terkait Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah

01.03 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

Naskah terkait Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

02 Pelaksanaan Anggaran

02.00 Surat Penyedia Dana (SPP, SPM dan SP2D): UP, GU, TU, LS

Naskah terkait Surat Penyedia Dana (SPP, SPM dan SP2D): UP, GU, TU, LS

- 02.01 Pendapatan
Naskah terkait Pendapatan Asli Daerah; Dokumen Penerimaan Dana Perimbangan; Dokumen Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah; Penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA); Dokumen Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Dokumen Piutang Daerah; Dokumen Pengelolaan Investasi
- 02.02 Belanja
Naskah terkait Dokumen Belanja langsung; Dokumen Belanja tidak langsung
- 02.03 Pembiayaan Daerah
Naskah terkait Bukti Penerimaan Pembiayaan; Bukti Pengeluaran Pembiayaan
- 02.04 Dokumen Penatausahaan Keuangan
Naskah terkait Dokumen Penatausahaan Keuangan
- 02.05 Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
Naskah terkait Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
- 02.06 Daftar Gaji
Naskah terkait Daftar Gaji
- 02.07 Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD)
Naskah terkait Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD)
- 02.08 Laporan Keuangan SKPD/SKPKD/LKPD (Audited)
Naskah terkait Laporan Keuangan SKPD/SKPKD/LKPD (Audited)
- 02.09 BLUD
Naskah terkait Hasil Penilaian Penetapan BLUD; Dokumen Rencana Belanja Anggaran BLUD

- 03 Bantuan/Pinjaman Luar Negeri
 - 03.00 Permohonan Pinjaman Luar Negeri (Blue Book)
Naskah terkait Permohonan Pinjaman Luar Negeri (Blue Book)
 - 03.01 Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (Green Book)
Naskah terkait Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (Green Book)
 - 03.02 Dokumen *Memorandum of Understanding* (MoU), dan Dokumen Sejenisnya
Naskah terkait Dokumen *Memorandum of Understanding* (MoU), dan Dokumen Sejenisnya
 - 03.03 Dokumen *Loan Agreement* (PHLN) seperti: *Draft Agreement, Legal Opinion*, Surat Menyurat dengan *Lender*
Naskah terkait Dokumen *Loan Agreement* (PHLN) seperti : *Draft Agreement, Legal Opinion*, Surat Menyurat dengan *Lender*
 - 03.04 Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri, a.l.: Usulan Luncuran Dana
Naskah terkait Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri, a.l.: Usulan Luncuran Dana
 - 03.05 Aplikasi Penarikan Dana BLN berikut Lampirannya
Naskah terkait Aplikasi Penarikan Dana BLN berikut Lampirannya :
 - 03.06 Dokumen Otorisasi Penarikan Dana (*Payment Advice*)
Naskah terkait Dokumen Otorisasi Penarikan Dana (*Payment Advice*)
 - 03.07 Dokumen Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri
Naskah terkait Dokumen Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri, yaitu : Surat Perintah Pencairan Dana, SPM beserta lampirannya, a.l. : SPP, Kontrak, BA, dan Data Pendukung lainnya.
 - 03.08 *Replenishment* (permintaan penarikan dana dari negara donor)
Naskah terkait *Replenishment* (permintaan penarikan dana dari negara donor) meliputi antara lain: No Objection Letter (NOL), Project

- Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization (WA), Statement of Expenditure (SE)
- 03.09 *Staff Appraisal Report*
Naskah terkait Staff Appraisal Report
- 03.10 *Report /Laporan*
Naskah terkait Report/Laporan (Progress Report, Monthly Report, Quarterly Report)
- 03.11 *Laporan Hutang Daerah (Audited)*
Naskah terkait Laporan Hutang Daerah (Laporan Pembayaran Hutang Daerah, Laporan Posisi Hutang Daerah)
- 03.12 *Completion Report/Annual Report*
Naskah terkait Completion Report/Annual Report
- 03.13 *Ketentuan/Peraturan yang Menyangkut Bantuan/Pinjaman Luar Negeri*
Naskah terkait Ketentuan/Peraturan yang Menyangkut Bantuan/Pinjaman Luar Negeri
- 04 *Keputusan Kepala Daerah tentang penetapan dalam Pengelolaan APBD/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)*
Naskah terkait penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Barang/Jasa, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pembuat Daftar Gaji, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Penerimaan/Pengeluaran, Pengelola Barang termasuk berita acara serah terima jabatan
- 05 *Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)*
- 05.00 *Manual Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)*
Naskah terkait Manual Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)
- 05.01 *Kebijakan Akuntansi*
Naskah terkait Kebijakan Akuntansi
- 05.02 *Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi*
Naskah terkait Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi
- 05.03 *Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan/Triwulanan/Semesteran*
Naskah terkait Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan/Triwulanan/Semesteran
- 06 *Penyaluran Anggaran Tugas Pembantuan*
- 06.00 *Penetapan personil*
Naskah terkait Surat Penetapan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek, Bendahara, atas Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembantuan, termasuk Spesimen Tanda Tangan
- 06.01 *Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan lampirannya*
Naskah terkait SPP-LS, SPP-GU, SP3, Daftar Perincian Penggunaan Dana, SPPR-LS, SPDR-L, SPM-LS, SPM- DU, bilyet giro, SPM Nihil, Penagihan/Invoice, Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank beserta bukti pendukungnya a.l.: copy Faktur Pajak dan Nota Kredit Bank, Permintaan Pelayanan Jasa/Service Report dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
- 06.02 *Buku Rekening Bank*
Naskah terkait Buku Rekening Bank
- 06.03 *Keputusan Pembukuan Rekening*
Naskah terkait Keputusan Pembukuan Rekening
- 06.03 *Pembukuan anggaran*
Naskah terkait Pembukuan anggaran (Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Register dan Buku Tambahan, Daftar Pembukuan

Pencairan/Pengeluaran (DPP), Daftar Himpunan Pencairan (DHP), Rekening Koran

07 Penerimaan Anggaran Tugas Pembantuan

07.00 Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembantuan termasuk Dana Sisa atau Pengeluaran lainnya

Naskah terkait Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembantuan termasuk Dana Sisa atau Pengeluaran lainnya

07.01 Berkas Penerimaan Pajak termasuk PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPn dan Denda Keterlambatan Menyelesaikan Pekerjaan

Naskah terkait Berkas Penerimaan Pajak termasuk PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPn dan Denda Keterlambatan Menyelesaikan Pekerjaan

08 Perimbangan Keuangan

08.00 Kebijakan

Naskah terkait Rumusan kebijakan di bidang dana perimbangan, non dana perimbangan, pajak daerah dan retribusi daerah, dan pembiayaan meliputi: Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan, Penyiapan Bahan, Perumusan Kebijakan, Penetapan dalam bentuk Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK)

08.01 Dana Perimbangan: Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK)

Naskah terkait Dana Perimbangan: Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK): Pendataan informasi, Perencanaan Alokasi, Rincian Rencana Alokasi

08.02 Pendataan dan Alokasi

Naskah terkait Pendataan informasi; Perencanaan Alokasi; Rincian Rencana Alokasi

08.03 Hibah Daerah

Naskah terkait Pendataan Informasi; Perencanaan Alokasi Hibah; Alokasi Hibah; Perumusan Perjanjian Hibah

08.04 Pembiayaan Daerah

Naskah terkait Persetujuan/Penolakan atas usulan Penerbitan Obligasi Daerah; Persetujuan/Penolakan atas usulan Pinjaman Daerah; Persetujuan/Penolakan atas pelampauan defisit APBD

08.05 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Naskah terkait Pendataan Informasi terkait pengembangan potensi daerah PAD; Sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang PDRB; Rekomendasi Hasil Sinkronisasi Raperda PDRD; Penghitungan potensi

08.06 Pelaksanaan Transfer

Naskah terkait Transfer Dana Perimbangan (DAU, DAK, DBH); Transfer Non Dana Perimbangan (Dana Otsus, DID, Dana Keistimewaan, Dana Desa); Transfer Hibah Daerah, Pinjaman Daerah, dan Dana Darurat; Rekonsiliasi Transfer

08.07 Laporan Keuangan

Naskah terkait Laporan Keuangan Pembiayaan, Hibah, dan Dana Darurat

08.08 Evaluasi Keuangan Daerah

Naskah terkait Evaluasi Dana Desentralisasi; Evaluasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; Penilaian Kinerja Keuangan Daerah

- 09 Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah
- 09.00 Peraturan pengelolaan keuangan daerah
 - Naskah terkait Peraturan pengelolaan keuangan daerah
- 09.01 Keputusan Gubernur Dokumen Usulan Bendahara
 - Naskah terkait Keputusan Gubernur Dokumen Usulan Bendahara
- 10 Penyusutan Arsip Keuangan
- 10.00 Berita Acara Penyusutan Arsip Keuangan
 - Naskah terkait Berita Acara Penyusutan Arsip Keuangan (Daftar Arsip musnah, Daftar Arsip Pindah Arsip Inaktif, Daftar Arsip Serah Arsip Statis
- 10.01 Daftar Arsip Usul Pindah
 - Naskah terkait Daftar Arsip Usul Pindah
- 10.02 Daftar Arsip Usul Serah
 - Naskah terkait Daftar Arsip Usul Serah
- 10.03 Daftar Arsip Usul Musnah
 - Naskah terkait Daftar Arsip Usul Musnah

XXXIV. PN. PENGADAAN

00 Kebijakan

- 00.00 Pengkajian dan pengusulan kebijakan
Naskah terkait Pengkajian dan pengusulan kebijakan
- 00.01 Penyiapan kebijakan
Naskah terkait Penyiapan kebijakan
- 00.02 Perumusan Kebijakan
Naskah terkait Perumusan Kebijakan
- 00.03 Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)
Naskah terkait Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)
- 00.04 Penetapan Kebijakan
Naskah terkait Penetapan Kebijakan
- 00.05 MOU
Naskah terkait MOU

01 Pelaksanaan Pengadaan

- 01.00 Penyusunan rencana umum pengadaan
Naskah terkait Identifikasi dan Analisis Kebutuhan Barang/Jasa; Penyusunan dan Penetapan Rencana Penganggaran Pengadaan; Penetapan Kebijakan Umum; Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK); Pengumuman Rencana Umum Pengadaan
 - 01.01 Pemilihan Penyedia
Naskah terkait Persiapan Pemilihan Penyedia : Review pengadaan, Menyusun dan Menetapkan spesifikasi teknis, Menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Menetapkan rancangan kontrak, Menyusun dokumen pengadaan; Pelaksanaan Pemilihan Penyedia : e-Purchasing, Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, Tender Cepat, Tender, Pengumuman, Dokumen Pemilihan, Penjelasan pekerjaan, Pemasukan, Pembukaan dan Evaluasi Penawaran, Pembuktian Kualifikasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi, Penetapan dan pengumuman pemenang, Pengelolaan Sanggahan, Surat Pengembalian Hasil Pemilihan ke PPK; Pemilihan Katalog Daerah : Permohonan Usulan Katalog Barang/Jasa kepada Gubernur cq Sekda, Pengkajian dan Evaluasi Terhadap Kelayakan Usulan Katalog Barang/Jasa, Pemilihan Penyedia Katalog, Reviu Hasil Pemilihan Penyedia Katalog, Penandatanganan Kontrak Katalog, Penayangan Katalog Barang/Jasa pada Sistem e-katalog LKPP
 - 01.02 Penandatanganan Kontrak dan Pelaksanaan Kontrak
Naskah terkait Persiapan Penandatanganan Kontrak; Penandatanganan Kontrak: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), Kontrak, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK); Pelaksanaan Kontrak : Laporan Pelaksanaan, Berita Acara Serah Terima (BAST)
 - 01.03 Swakelola
Naskah terkait Perencanaan; Persiapan; Pelaksanaan; Pengawasan; Serah Terima
- 02 Pengembangan Strategi Pengadaan
- 02.00 Pengembangan Strategi Pengadaan Umum
Naskah terkait Barang dan Jasa: Barang dan Jasa Lainnya, Jasa Konsultansi; Pekerjaan Konstruksi: Pelaksanaan Konstruksi, Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi

- 02.01 Pengembangan Strategi Pengadaan Khusus
Naskah terkait Kemitraan Pemerintah dengan Badan Usaha: Kemitraan infrastruktur, Kemitraan non infrastruktur; Badan usaha dan keadaan khusus : Badan usaha, Bidang pertahanan keamanan dan keadaan khusus
- 02.02 Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
Naskah terkait Pengembangan pelaku usaha: Laporan Kegiatan Pengembangan Pelaku Usaha, Dokumen Kajian pengembangan Pelaku Usaha; Pengembangan kesempatan usaha: Laporan Kegiatan Pengembangan Kesempatan Usaha, Dokumen Kajian Pengembangan Kesempatan Usaha; Kerjasama multilateral: Laporan Kerjasama Multilateral, Dokumen Kajian Kegiatan Kerjasama Multilateral; Kerjasama bilateral: Laporan Kerjasama Bilateral, Dokumen Kajian Kerjasama Bilateral
- 03 Monitoring Evaluasi Dan Pengembangan Sistem Informasi
- 03.00 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan
Naskah terkait Perencanaan Pengadaan; Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan: Pelaksanaan kebijakan pengadaan, Dokumen Kajian Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan
- 03.01 Pelaksanaan Sistem Katalog
Naskah terkait Riset dan kontrak: Riset Pasar dan Industri, Kontrak Payung; Pengelolaan Katalog: Pengendalian pelaksanaan katalog, Evaluasi katalog
- 03.02 Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
Naskah terkait Pengembangan aplikasi dan teknologi informasi: Pengembangan aplikasi SPSE, Teknologi Informasi dan Komunikasi SPSE; Pengelolaan dan pembinaan layanan pengadaan secara elektronik: Bimbingan Teknis LPSE, Monitoring dan Evaluasi LPSE Nasional
- 04 Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia di Bidang Pengadaan Barang/Jasa dan Kelembagaan Pengadaan
- 04.00 Pengembangan Pelaku dan/atau Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Kelembagaan Pengadaan
Naskah terkait Pelaksanaan Pengembangan Karir Pelaku dan/atau Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; Pelaksanaan Tata Kelola Pelaku dan/atau Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; Tata Kelola Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ); Penyusunan standar kompetensi pengelola pengadaan
- 04.01 Pelatihan Kompetensi
Naskah terkait Penyelenggaraan Diklat : Perencanaan: peserta, pengajar, penjadwalan, Penyelenggaraan, Konsultasi dan fasilitasi penyelenggaraan diklat, Pengembangan bahan ajar dan metodologi pembelajaran, Monitoring dan Evaluasi, Sistem informasi, Alumni; Pembinaan Pengajar/Narasumber : Seleksi dan pengembangan, Sertifikasi, Monitoring dan Evaluasi, Sistem informasi
- 04.02 Sertifikasi Profesi
Naskah terkait Sistem dan sarana Sertifikasi : Sistem Sertifikasi (Dokumen ISO, Dokumen Kebijakan/Reguler), Sarana Sertifikasi (Dokumen Inventaris dan Pemeliharaan Sarana, Master soal); Tata Kelola dan Evaluasi Sertifikasi : Tata Kelola Sertifikasi (Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Ujian), Evaluasi dan Surveilen (Dokumen Evaluasi, Dokumen Surveilen)
- 04.03 Pembinaan Etika Pelaku/Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
Naskah terkait Pelaksanaan Kode Etik SDM PBJ

05 Hukum

05.00 Advokasi Pengadaan Barang/Jasa

Naskah terkait Pelaksanaan Konsultasi Barang/Jasa; Sosialisasi Peraturan Barang/Jasa

05.01 Pelaksanaan Penanganan Permasalahan Hukum Pengadaan Barang/Jasa

Naskah terkait Penanganan Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa; Kontrak Katalog; Pengaduan Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa

05.02 Arsip yang berkaitan dengan peraturan pengadaan barang/jasa secara umum dan arsip kebijakan pengadaan barang/jasa khusus di Provinsi DKI Jakarta

Naskah terkait Arsip yang berkaitan dengan peraturan pengadaan barang/jasa secara umum dan arsip kebijakan pengadaan barang/jasa khusus di Provinsi DKI Jakarta

06 Pelayanan Elektronik

06.00 Pengelolaan SPSE dan Infrastrukturnya

Naskah terkait Pengelolaan SPSE dan Infrastrukturnya

06.01 Pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna SPSE

Naskah terkait Pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna SPSE

06.02 Pelaksanaan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian SPSE

Naskah terkait Pelaksanaan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian SPSE

06.03 Pelaksanaan konsultasi dan bimbingan teknis pengoperasian SPSE

Naskah terkait Pelaksanaan konsultasi dan bimbingan teknis pengoperasian SPSE

06.04 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi operasional SPSE

Naskah terkait Pelaksanaan monitoring dan evaluasi operasional SPSE

06.05 Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi Unit Pengelola LPSE

Naskah terkait Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi Unit Pengelola LPSE

XXXV. KG. KEPEGAWAIAN

00 Kebijakan Bidang Kepegawaian

- 00.00 Pengkajian, Pengusulan Kebijakan, dan Naskah Akademik
Naskah terkait pengkajian, pengusulan kebijakan, dan naskah akademik
- 00.03 Penyusunan Kebijakan
Naskah terkait penyusunan kebijakan
- 00.04 Perumusan Kebijakan
Naskah terkait perumusan kebijakan
- 00.03 Pemberian Masukan dan Dukungan
Naskah terkait masukan dan dukungan kebijakan
- 00.04 Penetapan Kebijakan
Naskah terkait penetapan kebijakan
- 00.06 *Memorandum of Understanding*
Naskah terkait *Memorandum of Understanding*

01 Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara

- 01.00 Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN)
Naskah terkait bahan penyusunan rencana kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN); analisis kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN)
- 01.01 Perencanaan Pertimbangan Formasi
Naskah terkait pertimbangan teknis penetapan formasi Aparatur Sipil Negara (ASN); pertimbangan teknis penetapan formasi ikatan dinas
- 01.02 Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN)
Naskah terkait penetapan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN)
- 01.03 Standarisasi Jabatan
Naskah terkait informasi jabatan; kompetensi jabatan; klasifikasi jabatan

02 Formasi dan Pengadaan Pegawai

- 02.00 Formasi Aparatur Sipil Negara (ASN)
Naskah terkait usulan formasi Aparatur Sipil Negara (ASN); persetujuan formasi; penetapan formasi; penetapan formasi khusus
- 02.01 Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN)
Naskah terkait proses rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN); pengumuman kelulusan Aparatur Sipil Negara (ASN); berkas lamaran yang tidak diterima; pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN); *Open Bidding* (seleksi terbuka jabatan)
- 02.02 Sistem Rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN)
Naskah terkait pengelolaan sistem rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN); fasilitasi penyelenggaraan seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN)

03 Mutasi Pegawai

- 03.00 Alih Tugas Aparatur Sipil Negara (ASN)
Naskah terkait surat keputusan mutasi
- 03.01 Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan
Naskah terkait SK kenaikan pangkat, golongan, dan jabatan
- 03.02 Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Struktural/Fungsional
Naskah terkait SK pengangkatan dan pemberhentian jabatan
- 03.03 Perubahan Data Dasar/Status/Kedudukan Hukum Pegawai
Naskah terkait perubahan data dasar/ status/kedudukan hukum pegawai
- 03.04 Peninjauan Masa Kerja
Naskah terkait SK penetapan masa kerja

- 03.05 Baperjakat
Naskah terkait Baperjakat
- 03.06 Penempatan Jabatan Pelaksana
Naskah terkait penempatan jabatan pelaksana
- 03.07 Pengaktifan Pegawai Tugas Belajar
Naskah terkait pengaktifan pegawai tugas belajar
- 03.08 Pengelolaan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (ASN)
Naskah terkait pengelolaan pegawai Non Aparatur Sipil Negara (ASN)

- 04 Pengembangan Karir
 - 04.00 Tugas Belajar/Ijin Belajar/Diklat/Kursus/Magang/Ujian Dinas/
Praktek Kerja di Instansi lain/Pertukaran Antar ASN dengan Pegawai
Swasta
Naskah terkait perencanaan dan penyusunan analisis kebutuhan;
pelaksanaan; pelaporan; ijazah/surat tanda tamat pendidikan dan
pelatihan (sttpl)/sertifikat
 - 04.01 Penyesuaian Ijazah dan Peningkatan Pendidikan
Naskah terkait penyesuaian ijazah dan peningkatan pendidikan
 - 04.02 Penyusunan Sistem Karier
Naskah terkait penyusunan sistem karier
 - 04.03 Rencana Kinerja, Sistem Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi
Kerja
Naskah terkait rencana kinerja, sistem kinerja pegawai (SKP) dan
penilaian prestasi kerja
 - 04.04 Angka Kredit
Naskah terkait pengajuan daftar usul pengajuan angka kredit; penilaian
daftar usul pengajuan angka kredit

- 05 Kinerja
 - 05.00 Penilaian Kinerja dan Standar Kerja
Naskah terkait sistem penilaian kerja Aparatur Sipil Negara (ASN);
standar kinerja jabatan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); penilaian
kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)
 - 05.01 Pengelolaan *Database* dan Analisis Sistem Informasi Kinerja
Naskah terkait pengelolaan *database* penilaian kinerja pegawai Aparatur
Sipil Negara (ASN); analisis sistem informasi kinerja pegawai Aparatur
Sipil Negara (ASN); teknis penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN)
 - 05.02 Evaluasi dan Pemantauan Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja
Naskah terkait Evaluasi dan Pemantauan Penilaian Kinerja dan Standar
Kinerja

- 06 Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN
 - 06.00 Kode Etik Pegawai
Naskah terkait penetapan kode etik; penegakan kode etik; SK hukuman
 - 06.01 Disiplin
Naskah terkait penegakan disiplin; peningkatan disiplin; SK hukuman
disiplin
 - 06.02 Pemberhentian
Naskah terkait pemberhentian dengan hormat; pemberhentian tidak
dengan hormat; pemberhentian sementara
 - 06.03 Pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN)
Naskah terkait administrasi pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN);
penetapan pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN); penetapan
pertimbangan teknis pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN); SK pensiun
(pensiun bup, janda/duda/yatim, atas permintaan sendiri, pensiun
uzur, dan pensiun tewas); pensiun pejabat negara dan janda/ dudanya

07 Bantuan Hukum

07.00 Pemberian Bantuan Hukum

Naskah terkait pemberian bantuan hukum

07.01 Bantuan Hukum Pegawai

Naskah terkait bantuan hukum pegawai

08 Status dan Kedudukan Pegawai

08.00 Pertimbangan Status Kepegawaian

Naskah terkait analisis status kepegawaian; penyusunan pertimbangan status kepegawaian

08.01 Pertimbangan Kedudukan Kepegawaian

Naskah terkait analisis kedudukan kepegawaian; penyusunan pertimbangan kedudukan kepegawaian

08.02 Keberatan Pegawai

Naskah terkait keberatan pegawai

08.03 Perselisihan/Sengketa Kepegawaian

Naskah terkait Perselisihan/Sengketa Kepegawaian

09 Sistem Informasi Kepegawaian

09.00 Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian

Naskah terkait pengolahan data; informasi kepegawaian

09.01 Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian

Naskah terkait pengembangan sistem informasi kepegawaian

09.02 Pengembangan Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Elektronik

Naskah terkait arsip kepegawaian elektronik; arsip kepegawaian fisik

10 Pengawasan dan Pengendalian

10.00 Formasi, Pengadaan dan Pasca Diklat

Naskah terkait pelaksanaan peraturan perundang-undangan; monitoring dan evaluasi; rekomendasi, evaluasi dan pelaporan

10.01 Kepangkatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dalam Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Naskah terkait pelaksanaan peraturan perundang-undangan; monitoring dan evaluasi; rekomendasi, evaluasi dan pelaporan

10.02 Gaji dan Tunjangan, Kesejahteraan dan Kinerja

Naskah terkait pelaksanaan peraturan perundang-undangan; monitoring dan evaluasi; rekomendasi, evaluasi dan pelaporan; SK kenaikan gaji berkala

10.03 Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN)

Naskah terkait pelaksanaan peraturan perundang-undangan; monitoring dan evaluasi; rekomendasi, evaluasi dan pelaporan

10.04 Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian

Naskah terkait laporan hasil pengawasan dan pengendalian

10.05 Sanggahan terhadap Permasalahan Tenaga Honorer

Naskah terkait sanggahan terhadap permasalahan tenaga honorer

11 Administrasi Pegawai

11.00 Surat Perintah Dinas/Surat Tugas

Naskah terkait surat perintah dinas/surat tugas

11.01 Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti Tahunan

Naskah terkait cuti sakit, cuti bersalin, cuti tahunan

11.02 Cuti Alasan Penting

Naskah terkait cuti alasan penting

11.03 Cuti Besar dan Cuti di Luar Tanggungan Negara

Naskah terkait cuti besar dan cuti diluar tanggungan negara

- 11.04 Dokumen Identitas Pegawai
Naskah terkait Karpeg, KPE, Karis, Karsu dan kartu tanda pengenal ASN; keanggotaan organisasi profesi/kedinasan; Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P); Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)
- 11.05 Berkas Kepegawaian dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
Naskah terkait berkas kepegawaian dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
- 11.06 Berkas Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi Gaji/tunjangan
Naskah terkait berkas pengurusan kenaikan gaji berkala, mutasi gaji/tunjangan
- 11.07 Pemberian Bebas Tugas Menjelang Pensiun
Naskah terkait pemberian bebas tugas menjelang pensiun; SK pemberian bebas tugas menjelang pensiun PNS masuk
- 11.08 Izin Perceraian
Naskah terkait izin perceraian; SK izin perceraian
- 11.09 Izin Beristri Lebih dari Satu
Naskah terkait izin beristri lebih dari satu; SK izin beristri lebih dari satu

- 12 Kesejahteraan Pegawai
- 12.00 Pemeliharaan Kesehatan Pegawai
Naskah terkait pemeliharaan kesehatan pegawai
- 12.01 Asuransi Pegawai/BPJS
Naskah terkait asuransi pegawai/BPJS
- 12.02 Tabungan Perumahan
Naskah terkait tabungan perumahan
- 12.03 Bantuan Sosial
Naskah terkait bantuan sosial
- 12.04 Pakaian Dinas
Naskah terkait pakaian dinas
- 12.05 Layanan Pegawai yang Meninggal dan Kecelakaan Karena Dinas dan Jaminan Kematian
Naskah terkait layanan pegawai yang meninggal dan kecelakaan karena dinas dan jaminan kematian
- 12.06 Pemberian Tali Kasih
Naskah terkait pemberian tali kasih
- 12.07 Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa
Naskah terkait pemberian piagam penghargaan dan tanda jasa ; sertifikat piagam penghargaan dan tanda jasa
- 12.08 Olahraga dan Rekreasi
Naskah terkait olahraga dan rekreasi
- 12.09 Rekam Medis
Naskah terkait rekam medis
- 12.10 Kajian Kesejahteraan Pegawai
Naskah terkait kajian kesejahteraan pegawai
- 12.11 Jaminan Sosial Pegawai
Naskah terkait jaminan sosial pegawai
- 12.12 Tabungan Pensiun
Naskah terkait tabungan pensiun

- 13 Administrasi Pegawai
- 13.00 Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Naskah terkait Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- 13.01 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Naskah terkait Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

- 13.02 Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya yang Disetarakan
Naskah terkait Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Gubernur dan Wakil Gubernur; Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; Pejabat negara lainnya yang ditentukan Undang-Undang
- 13.03 Sekretaris Daerah
Naskah terkait Sekretaris Daerah
- 13.04 Aparatur Sipil Negara (ASN) Berjasa/Terlibat Dalam Peristiwa Berskala Nasional
Naskah terkait Aparatur Sipil Negara (ASN) berjasa/terlibat dalam peristiwa berskala nasional

- 14 Penilaian Kompetensi
 - 14.00 Penilaian Kompetensi
Naskah terkait penilaian kompetensi
 - 14.01 Hasil Penilaian Kompetensi
Naskah terkait hasil penilaian kompetensi
 - 14.02 Konseling Kerja Pegawai
Naskah terkait Konseling Kerja Pegawai
 - 14.03 Penyusunan Alat Ukur Psikologi
Naskah terkait penyusunan alat ukur psikologi
 - 14.04 Standar Kompetensi Jabatan
Naskah terkait standar kompetensi jabatan

- 15 KORPRI
Naskah terkait KORPRI

XXXVI. DL. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

00 Kebijakan

00.00 Pengkajian dan Penyusunan Kebijakan

Naskah terkait pengkajian dan penyusunan kebijakan

00.01 Penyiapan Kebijakan

Naskah terkait penyiapan kebijakan

00.02 Perumusan Kebijakan

Naskah terkait perumusan kebijakan

00.03 Masukan dan Dukungan Kebijakan

Naskah terkait masukan dan dukungan kebijakan

00.04 Penetapan NSPK

Naskah terkait penetapan NSPK

01 Pendidikan dan Pelatihan

01.00 Pengembangan Program dan Pembinaan Diklat

Naskah terkait standarisasi; akreditasi program/institusi yang dinilai; kurikulum dan modul; sistem informasi; monitoring dan evaluasi; konsultasi, advokasi, asistensi diklat

01.01 Pembinaan Widyaiswara

Naskah terkait seleksi dan pengembangan; sertifikasi; monitoring dan evaluasi; penilaian; konsultasi, advokasi dan asistensi; sistem informasi widyaiswara

01.02 Penyelenggaraan Diklat

Naskah terkait perencanaan; penyelenggaraan; konsultasi, advokasi, asistensi penyelenggaraan diklat; pengembangan bahan ajar dan metodologi pembelajaran; sistem informasi diklat; monitoring dan evaluasi; alumni

01.03 Tugas Belajar

Naskah terkait seleksi; SK program; konsultasi; hasil tugas belajar

XXXVII. HK. HUKUM

00 Kebijakan

- 00.00 Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan
Naskah terkait Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan
- 00.01 Penyiapan Kebijakan
Naskah terkait Penyiapan Kebijakan
- 00.02 Perumusan Kebijakan
Naskah terkait Perumusan Kebijakan
- 00.03 Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)
Naskah terkait Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)
- 00.04 MOU
Naskah terkait MOU

01 Program Legislasi

- 01.00 Bahan/materi Program Legislasi Pemerintah Provinsi
Naskah terkait Bahan/materi Program Legislasi Pemerintah Provinsi
- 01.01 Program Legislasi Pemerintah Provinsi
Naskah terkait Program Legislasi Pemerintah Provinsi
- 01.02 Peraturan Daerah, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum
Naskah terkait Peraturan Daerah, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum
- 01.03 Peraturan Gubernur termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum
Naskah terkait Peraturan Gubernur termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum
- 01.04 Keputusan/Ketetapan Gubernur termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum
Naskah terkait Keputusan/Ketetapan Gubernur termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum
- 01.05 Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum
Naskah terkait Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum
- 01.06 Instruksi/Surat Edaran Gubernur
Naskah terkait Instruksi/Surat Edaran Gubernur
- 01.07 Instruksi/Surat Edaran Kepala SKPD/Pejabat Eselon I dan II
Naskah terkait Instruksi/Surat Edaran Kepala SKPD/Pejabat Eselon I dan II
- 01.08 Surat Perintah Gubernur
Naskah terkait Surat Perintah Gubernur
- 01.09 Surat Perintah Pejabat setingkat Eselon I dan II
Naskah terkait Surat Perintah Pejabat setingkat Eselon I dan II
- 01.10 Standar/Pedoman/Prosedur Kerja/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis yang bersifat Nasional/Regional/Instansional termasuk rancangan
Naskah terkait Standar/Pedoman/Prosedur Kerja/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis yang bersifat Nasional/Regional/Instansional termasuk rancangan
- 01.11 Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU)/Kontrak/Perjanjian
Naskah terkait Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU)/Kontrak/Perjanjian
- 01.12 Dokumentasi Hukum
Naskah terkait Dokumentasi Hukum

- 01.13 Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum
Naskah terkait Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum
- 01.14 Kasus/Sengketa Hukum Pidana
Naskah terkait Kasus/Sengketa Hukum Pidana
- 01.15 Kasus/Sengketa Hukum Perdata
Naskah terkait Kasus/Sengketa Hukum Perdata
- 01.16 Kasus/Sengketa Hukum Tata Usaha Negara
Naskah terkait Kasus/Sengketa Hukum Tata Usaha Negara
- 01.17 Perburuhan
Naskah terkait Perburuhan
- 01.18 Arbitrase
Naskah terkait Arbitrase
- 01.19 Sengketa
Naskah terkait Sengketa ada
- 01.20 Bantuan/Konsultasi Hukum/Advokasi
Naskah terkait Bantuan/Konsultasi Hukum/ Advokasi
- 01.21 Perizinan
Naskah terkait Perizinan
- 01.22 Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI)
Naskah terkait Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI)
- 01.23 Permohonan HKI yang ditolak
Naskah terkait Permohonan HKI yang ditolak

- 02 Hukum dan Penyelesaian Sengketa
- 02.00 Bantuan hukum/konsultasi hukum/advokasi Pemberian bantuan/
konsultasi hukum
Naskah terkait Bantuan hukum/konsultasi hukum/advokasi Pemberian
bantuan/konsultasi hukum
- 02.01 Kasus sengketa hukum pidana
Naskah terkait Kasus sengketa hukum pidana
- 02.02 Kasus sengketa hukum perdata
Naskah terkait Kasus sengketa hukum perdata
- 02.03 Kasus sengketa hukum Tata Usaha Negara
Naskah terkait Kasus sengketa hukum Tata Usaha Negara
- 02.04 Kasus sengketa hukum Mahkamah Konstitusi
Naskah terkait Kasus sengketa hukum Mahkamah Konstitusi
- 02.05 Kasus sengketa hukum Mahkamah Agung
Naskah terkait Kasus sengketa hukum Mahkamah Agung
- 02.06 Penanganan Permasalahan Hukum
Naskah terkait Penanganan Permasalahan Hukum
- 02.07 Penyusunan dan penyuluhan hukum
Naskah terkait Penyusunan dan penyuluhan hukum
- 02.08 Kerjasama antarlembaga
Naskah terkait Kerjasama antarlembaga
- 02.09 Penyuluhan hukum
Naskah terkait Penyuluhan hukum
- 02.10 Bantuan Penasihat hukum, penerapan hukum
Naskah terkait Bantuan Penasihat hukum, penerapan hukum
- 02.11 Penyuluhan hukum
Naskah terkait Penyuluhan hukum
- 02.12 Bantuan Penasihat hukum
Naskah terkait Bantuan Penasihat hukum
- 02.13 Penerapan hukum
Naskah terkait Penerapan hukum

03 Dokumentasi Hukum

- 03.00 Inventarisasi peraturan Perundang-undangan dan Bahan Hukum Lainnya
Naskah terkait Inventarisasi peraturan Perundang-undangan dan Bahan Hukum Lainnya
- 03.01 Pengolahan Peraturan Perundang-undangan dalam bentuk hardcopy
Naskah terkait Katalogisasi Peraturan Perundangan-undangan; Abstraksi Peraturan Perundang-undangan; Katalogisasi Monografi Hukum; Klasifikasi Monografi Hukum; Bahan perundang-undangan (Row Data); Hasil Entry Data; Back Up; Data Base
- 03.02 Pengolah Peraturan Perundang-undangan dan bahan hukum lainnya dalam bentuk online melalui website/jaringan internet
Naskah terkait Bahan perundang-undangan (Row Data); Hasil Entry Data; Back Up; DataBase
- 03.03 Sosialisasi/penyebarluasan peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya
Naskah terkait Sosialisasi/penyebarluasan peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya
- 03.04 Evaluasi dan pemantauan pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Naskah terkait Evaluasi dan pemantauan pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
- 03.05 Publikasi hasil kegiatan Badan Pembinaan Hukum Nasional (penelitian, pengkajian, naskah akademis, dll)
Naskah terkait Publikasi hasil kegiatan Badan Pembinaan Hukum Nasional (penelitian, pengkajian, naskah akademis, dll)
- 03.06 Bimbingan teknis pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Naskah terkait Bimbingan teknis pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
- 03.07 Pertemuan berkala pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Naskah terkait Pertemuan berkala pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

04 Penyuluhan Hukum

- 04.00 Penyusunan kebijakan teknis pembentukan Tenaga Fungsional Penyuluh Hukum
Naskah terkait Penyusunan kebijakan teknis pembentukan Tenaga Fungsional Penyuluh Hukum
- 04.01 Penyuluhan Hukum Melalui Media Elektronik dan Cetak
Naskah terkait Penyuluhan Hukum Melalui Media Elektronik dan Cetak
- 04.02 Konsultasi dan Bantuan Hukum
Naskah terkait Konsultasi dan Bantuan Hukum
- 04.03 Pengelolaan dan Pengembangan Keluarga Sadar Hukum
Naskah terkait Pengelolaan dan Pengembangan Keluarga Sadar Hukum
- 04.04 Forum koordinasi pelaksanaan penyuluhan hukum seluruh Indonesia
Naskah terkait Forum koordinasi pelaksanaan penyuluhan hukum seluruh Indonesia

XXXVIII. RB. PERENCANAAN PEMBANGUNAN

00 Perumusan Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah

00.00 Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan

Naskah terkait pengkajian dan pengusulan kebijakan

00.01 Penyiapan Kebijakan

Naskah terkait penyiapan kebijakan

00.02 Perumusan dan penyusunan bahan

Naskah terkait perumusan dan penyusunan bahan

00.03 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan

Naskah terkait Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan

00.04 Penetapan dalam bentuk peraturan perundang-undangan

Naskah terkait Penetapan dalam bentuk peraturan perundang-undangan

01 Musyawarah Perencanaan Pembangunan/Musrenbang

01.00 Musrenbang Nasional

Naskah terkait Aturan, Surat Dinas dan administrasi lain mengenai keikutsertaan serta Usulan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat pada Pelaksanaan Musrenbang Nasional

01.01 Musrenbang Provinsi

Naskah terkait Pedoman, Aturan, Surat Dinas, Berita acara dan administrasi lain mengenai pelaksanaan Musrenbang Provinsi

01.02 Musrenbang Kota/Kab

Naskah terkait Pedoman, Aturan, Surat Dinas dan administrasi lain mengenai pelaksanaan Musrenbang Kota/Kabupaten

01.03 Musrenbang Kecamatan

Naskah terkait Pedoman, Aturan, Surat Dinas dan administrasi lain mengenai pelaksanaan Musrenbang Kecamatan

01.04 Musrenbang Kelurahan

Naskah terkait Pedoman, Aturan, Surat Dinas dan administrasi lain mengenai pelaksanaan Musrenbang Kelurahan

01.05 Rembuk RW

Naskah terkait Pedoman, Aturan, Surat Dinas dan administrasi lain mengenai pelaksanaan Rembuk RW

02 Perencanaan Pembangunan Daerah

02.00 Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Naskah terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang

02.01 Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Naskah terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah

02.02 Rencana Anggaran Daerah

Naskah terkait Rencana Anggaran Daerah

02.03 Rencana Pembangunan Tahunan

Naskah terkait RKPD; Perubahan RKPD

02.04 Rencana Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Naskah terkait Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah

02.05 Program kerja tahunan

Naskah terkait Usulan unit kerja beserta data pendukungnya; Program kerja tahunan unit kerja/OPD; Program kerja tahunan Pemerintah Daerah; Penyusunan Pagu Indikatif Perangkat Daerah; Pengusulan Kegiatan Tahun Jamak; Pengusulan DAK Fisik

02.06 Penetapan/Kontrak Kinerja

Naskah terkait Pimpinan Unit Kerja; Pimpinan setingkat Eselon III dan IV; Pimpinan Daerah

- 02.07 Laporan
Naskah terkait Berkala; Laporan Insidental
- 02.08 Evaluasi Program
Naskah terkait Unit Kerja/OPD; Monitoring Kegiatan OPD;
Lembaga/Instansi
- 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan
Naskah terkait Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan
- 04 Konsultasi Perencanaan Pembangunan
Naskah terkait Konsultasi Perencanaan Pembangunan
- 05 Pemantauan, Evaluasi, Penilaian, dan Pelaporan Perencanaan
Pembangunan
- 05.00 Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan
Perangkat Daerah
Naskah terkait Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta dan Perangkat Daerah; Perjanjian Kinerja
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Perangkat Daerah; Penyusunan
Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan
Perangkat Daerah
- 05.01 Evaluasi Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Naskah terkait Dokumen Evaluasi Perjanjian Kinerja Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta
- 05.02 Evaluasi RKPD
Naskah terkait Evaluasi RKPD
- 06 Aksi Strategis Daerah
- 06.00 Rancangan awal perencanaan aksi strategi daerah
Naskah terkait Rancangan awal perencanaan aksi strategi daerah
- 06.01 Rapat pembahasan rancangan awal dengan Perangkat Daerah
Naskah terkait Rapat pembahasan rancangan awal dengan Perangkat
Daerah
- 06.02 Sosialisasi dengan Perangkat Daerah
Naskah terkait Sosialisasi dengan Perangkat Daerah
- 06.03 Rancangan akhir perencanaan aksi strategi daerah
Naskah terkait Rancangan akhir perencanaan aksi strategi daerah
- 06.04 Penerapan perencanaan aksi strategi daerah
Naskah terkait Penerapan perencanaan aksi strategi daerah
- 07 Perencanaan Pendanaan Pembangunan
- 07.00 Pendanaan Nasional dan Hibah
Naskah terkait Pendanaan Nasional dan Hibah
- 07.01 Pendanaan Daerah
Naskah terkait Pendanaan Daerah
- 07.02 Kerjasama Pembangunan Nasional
Naskah terkait Kerjasama Pembangunan Nasional
- 07.03 Surat Berharga Syariah Negara
Naskah terkait Surat Berharga Syariah Negara
- 07.04 Pendanaan On Top atau Inisiatif Baru
Naskah terkait Pendanaan On Top atau Inisiatif Baru

XXXIX. IP. PENELITIAN, PENGKAJIAN, PENGEMBANGAN, PEREKAYASAAN, PENERAPAN, SERTA PENDAYAGUNAAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

00 Kebijakan

- 00.00 Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan
Naskah terkait pengkajian dan pengusulan kebijakan
- 00.01 Penyiapan Kebijakan
Naskah terkait penyiapan kebijakan
- 00.02 Perumusan dan Penyusunan Bahan
Naskah terkait Perumusan dan Penyusunan Bahan
- 00.03 Pemberian masukan/uji petik/hearing dan dukungan dalam penyusunan kebijakan
Naskah terkait Pemberian masukan/uji petik/hearing dan dukungan dalam penyusunan kebijakan
- 00.04 Penetapan Dalam Bentuk NSPK
Naskah terkait penetapan dalam bentuk NSPK

01 Penelitian dan Pengkajian

- 01.00 Rencana Kerja
Naskah terkait Rencana Kerja
- 01.01 Administrasi Penelitian
Naskah terkait Administrasi Penelitian
- 01.02 Pelaksanaan penelitian/pengkajian
Naskah terkait Pelaksanaan penelitian/pengkajian
- 01.03 Hasil penelitian/pengkajian/rekomendasi
Naskah terkait Hasil penelitian/pengkajian/rekomendasi
- 01.04 Hasil Penelitian dan Pengkajian hasil jasa layanan
Naskah terkait Hasil Penelitian dan Pengkajian hasil jasa layanan

02 Pengembangan dan Inovasi

- 02.00 Rencana kerja
Naskah terkait Rencana kerja
- 02.01 Administrasi pengembangan dan inovasi
Naskah terkait Administrasi pengembangan dan inovasi
- 02.02 Pelaksanaan
Naskah terkait Pelaksanaan
- 02.03 Hasil Pengembangan dan Inovasi
Naskah terkait Hasil Pengembangan dan Inovasi

03 Dokumen

- 03.00 Dokumen penerapan hasil
Naskah terkait penelitian/pengkajian/perekayasaan/pengembangan inovasi dari masyarakat/dunia industri/pemerintahan
- 03.01 Dokumen pemanfaatan hasil
Naskah terkait penelitian/pengkajian/perekayasaan/pengembangan inovasi dari masyarakat/dunia industri/pemerintahan
- 03.02 Dokumen Pendayagunaan hasil
Naskah terkait penelitian/pengkajian/perekayasaan/pengembangan inovasi dari masyarakat/dunia industri/pemerintahan
- 03.03 Dokumen replikasi/prototipe hasil
Naskah terkait penelitian/pengkajian/perekayasaan/pengembangan inovasi dari masyarakat/dunia industri/pemerintahan

- 04 Advokasi dan Fasilitasi penelitian, pengembangan dan inovasi
 - 04.00 Advokasi dan fasilitasi penelitian
 - Naskah terkait Advokasi dan fasilitasi penelitian
 - 04.01 Pengembangan dan inovasi
 - Naskah terkait Pengembangan dan inovasi

- 05 Diseminasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - 05.00 Promosi
 - Naskah terkait Promosi
 - 05.01 Pemasarakatan
 - Naskah terkait Pemasarakatan

- 06 Pembinaan penelitian/pengkajian, pengembangan dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - 06.00 Pembinaan penelitian/pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi
 - Naskah terkait Pembinaan penelitian/pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi
 - 06.01 Pembinaan pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - Naskah terkait Pembinaan pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi

- 07 Jaringan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
 - 07.00 Jaringan Sistem Nasional Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
 - Naskah terkait Jaringan Sistem Nasional Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
 - 07.01 Jaringan Sistem Nasional Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
 - Naskah terkait Jaringan Sistem Nasional Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
 - 07.02 Jaringan Sistem Nasional Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
 - Naskah terkait Jaringan Sistem Nasional Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

- 08 Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - 08.00 Data dan informasi hasil penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi
 - Naskah terkait Data dan informasi hasil penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi
 - 08.01 Data dan informasi hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - Naskah terkait Data dan informasi hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - 08.02 Data dan informasi hasil penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - Naskah terkait Data dan informasi hasil penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi

- 09 *Master proceeding*/jurnal penelitian, pengembangan,dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - 09.00 Penerbitan: Jurnal/buletin ilmiah, bahan publikasi khusus
 - Naskah terkait Penerbitan: Jurnal/buletin ilmiah, bahan publikasi khusus
 - 09.01 Leaflet dan booklet
 - Naskah terkait Leaflet dan booklet

- 09.02 Kamus istilah
 - Naskah terkait Kamus istilah

- 10 Hak atas kekayaan intelektual (HaKI)
 - 10.00 Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - Naskah terkait Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - 10.01 Forum komunikasi penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi
 - Naskah terkait Forum komunikasi penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi
 - 10.02 Forum komunikasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - Naskah terkait Forum komunikasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - 10.03 Forum komunikasi penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - Naskah terkait Forum komunikasi penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi

- 11 Layanan jasa penelitian, pengembangan, penerapan IPTEK
 - 11.00 Jasa laboratorium pengujian
 - Naskah terkait Jasa laboratorium pengujian
 - 11.01 Jasa teknologi produksi
 - Naskah terkait Jasa teknologi produksi
 - 11.02 Jasa studi
 - Naskah terkait Jasa studi
 - 11.03 Jasa penyewaan peralatan
 - Naskah terkait Jasa penyewaan peralatan
 - 11.04 Jasa perbantuan tenaga ahli/profesi
 - Naskah terkait Jasa perbantuan tenaga ahli/profesi
 - 11.05 Jasa sertifikasi/kalibrasi dan sertifikasi
 - Naskah terkait Jasa sertifikasi/kalibrasi dan sertifikasi
 - 11.06 Buku rekaman barang yang diuji/dikalibrasi
 - Naskah terkait Buku rekaman barang yang diuji/dikalibrasi

- 12 Sertifikasi personil peneliti
 - Naskah terkait Sertifikasi personil peneliti

- 13 Akreditasi laboratorium
 - Naskah terkait Akreditasi laboratorium

XL. CB. BENCANA, KECELAKAAN DAN KONDISI BAHAYA

- 00 Kebijakan Pencarian dan Pertolongan Meliputi Kebijakan di Bidang Potensi dan Operasi Pencarian dan Pertolongan
 - 00.00 Pengkajian dan pengusulan kebijakan
 - Naskah terkait Pengkajian dan pengusulan kebijakan
 - 00.01 Penyiapan kebijakan
 - Naskah terkait Penyiapan kebijakan
 - 00.02 Perumusan dan penyusunan bahan
 - Naskah terkait perumusan dan penyusunan bahan
 - 00.03 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan
 - Naskah terkait pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan
 - 00.04 Penetapan dalam bentuk NSPK
 - Naskah terkait penetapan dalam bentuk NSPK
- 01 Potensi Pencarian dan Pertolongan
 - 01.00 Sarana dan Prasarana
 - Naskah terkait Rencana dan Standardisasi; Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Darat, laut, Udara dan Peralatan Pencarian dan Pertolongan; Pengawakan dan perbekalan;
 - 01.01 Bina Ketenagaan dan Pemasarakatan
 - Naskah terkait Rencana Pendidikan dan Pelatihan; Penyiapan tenaga dan potensi Pencarian dan Pertolongan; Pemasarakatan dan Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan
- 02 Operasi Pencarian dan Pertolongan
 - 02.00 Operasi dan Latihan
 - Naskah terkait Perencanaan dan Standardisasi; Penyelenggaraan Operasi SAR; Siaga dan Latihan
 - 02.01 Komunikasi
 - Naskah terkait Rencana Pengembangan dan Standardisasi Komunikasi; Operasi Komunikasi; Inventarisasi dan Pemeliharaan
- 03 Data dan Informasi
 - 03.00 Pengembangan Sistem Informasi
 - Naskah terkait Perangkat Lunak; Perangkat Keras
 - 03.01 Pelayanan Informasi
 - Naskah terkait Penyajian dan pelayanan Data Informasi; Laporan dan Pembuatan Dokumentasi (Data Base)

XLI. TB. PENANGGULANGAN BENCANA

00 Kebijakan

00.00 Pengkajian dan pengusulan kebijakan

Naskah terkait Pengkajian dan pengusulan kebijakan

00.01 Penyiapan kebijakan

Naskah terkait Penyiapan kebijakan

00.02 Perumusan dan penyusunan kebijakan

Naskah terkait perumusan dan penyusunan kebijakan

00.03 Pemberian Masukan dan Dukungan Dalam Penyusunan Kebijakan

Naskah terkait pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan

00.05 Penetapan Dalam Bentuk NSPK

Naskah terkait penetapan dalam bentuk NSPK

01 Pencegahan dan Kesiapsiagaan

01.00 Pengurangan Resiko Bencana

Naskah terkait Pencegahan; Mitigasi

01.01 Pemberdayaan Masyarakat

Naskah terkait Peran Lembaga Usaha; Peran Organisasi Sosial Masyarakat; Peran Masyarakat

01.02 Kesiapsiagaan

Naskah terkait Peringatan Dini; Perencanaan Siaga; Penyiapan Sumber Daya

02 Penanganan Darurat

02.00 Tanggap Darurat

Naskah terkait Perencanaan Darurat; Pengendalian Operasi; Penyelamatan dan Evakuasi

02.01 Bantuan Darurat

Naskah terkait Bantuan Sandang Pangan; Bantuan Kesehatan dan Air Bersih; Bantuan Hunian Sementara

02.02 Perbaikan Darurat

Naskah terkait Pembersihan Lingkungan; Perbaikan Sarana Vital; Pemantauan dan Pelaporan

03 Rehabilitasi dan Rekonstruksi

03.00 Penilaian Kerusakan

Naskah terkait inventarisasi kerusakan, estimasi pembiayaan

03.01 Pemulihan dan Peningkatan Fisik

Naskah terkait Rehabilitasi Rekonstruksi Fasilitas Umum; Rehabilitasi Rekonstruksi Fasilitas Sosial; Rehabilitasi Rekonstruksi Perumahan

03.02 Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi

Naskah terkait Pemulihan dan Peningkatan Sosial; Pemulihan dan Peningkatan Ekonomi

03.03 Penanganan Pengungsi

Naskah terkait Perlindungan Pemberdayaan Pengungsi; Penempatan Pengungsi

04 Logistik dan Peralatan

04.00 Logistik

Naskah terkait Inventarisasi Kebutuhan dan Pengadaan; Penyimpanan dan Distribusi

04.01 Peralatan

Naskah terkait Inventarisasi Kebutuhan dan Pengadaan; Penyimpanan dan Pemeliharaan; Pengerahan dan Distribusi Penyaluran

05 Pendidikan dan latihan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan

05.00 Pelaksanaan diklat

Naskah terkait SOP Diklat; Prosedur Teknis Praktek Latihan; GBPP dan SAP; Bahan Ajar (Power Point dan modul); Laporan Pendidikan dan latihan bagi Dinas GULKARMAT Provinsi DKI Jakarta

05.01 Pengembangan Diklat

Naskah terkait Standart operasional penyelenggaraan diklat; Penyusunan kurikulum; Sertifikasi penyelenggaraan diklat; Sertifikasi program diklat; evaluasi penyelenggaraan diklat

05.02 Sarana dan Prasarana Diklat

Naskah terkait Analisis Kebutuhan; Pengadaan; Standart peralatan diklat; Standart operasi penggunaan peralatan diklat; Standart Pemeliharaan sarana dan prasarana diklat; Inventarisir sarana dan prasarana

06 Pemeriksaan dan pengujian (UPT Laboratorium)

06.00 Investigasi Penyebab kebakaran

Naskah terkait Pengujian mutu bahan/peralatan/komponen pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan; Penyusunan Panduan perhitungan Taksiran Kerugian Kebakaran; Laporan hasil perhitungan taksiran kerugian kebakaran

06.01 Peralatan pengujian

Naskah terkait Analisis Kebutuhan; Standar peralatan pengujian dan penggunaan peralatan pengujian

XLII. OT. ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN

00 Struktur organisasi

00.00 Pembentukan

Naskah terkait Pembentukan

00.01 Pengubahan

Naskah terkait Pengubahan

00.02 Pembubaran

Naskah terkait Pembubaran

01 Uraian Jabatan dan Tata Kerja

Naskah terkait Uraian Jabatan dan Tata Kerja

02 Evaluasi Kelembagaan

Naskah terkait Evaluasi Kelembagaan

03 Standar Kompetensi Jabatan Struktural dan Fungsional

Naskah terkait Standar Kompetensi Jabatan Struktural dan Fungsional

04 Analisa Jabatan dan Beban Kerja Struktural/Fungsional Tertentu/
Fungsional UmumNaskah terkait Analisa Jabatan dan Beban Kerja Struktural/Fungsional
Tertentu/Fungsional Umum

05 Ketatalaksanaan

05.00 SOP/Prosedur Tetap

Naskah terkait SOP/Prosedur Tetap

05.01 Mekanisme Kerja/Tata Hubungan Kerja

Naskah terkait Mekanisme Kerja/Tata Hubungan Kerja

06 Internalisasi Reformasi Birokrasi

Naskah terkait Internalisasi Reformasi Birokrasi

XLIII. TG. KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN

00 Telekomunikasi

Naskah terkait administrasi penggunaan/langganan peralatan telekomunikasi meliputi: telepon, faksimile, radio, teleks, TV kabel, dan internet

01 Perjalanan Dinas

01.00 Dalam negeri

Naskah terkait Dalam negeri

01.01 Luar negeri

Naskah terkait Luar negeri

02 Administrasi penggunaan fasilitas kantor meliputi permintaan dan penggunaan ruang, gedung, kendaraan

Naskah terkait Administrasi penggunaan fasilitas kantor meliputi permintaan dan penggunaan ruang, gedung, kendaraan

03 Risalah/Notulen Rapat

03.00 Rapat Pimpinan

Naskah terkait Rapat Pimpinan

03.01 Rapat staf

Naskah terkait Rapat staf

04 Administrasi penyediaan konsumsi dan akomodasi

Naskah terkait Administrasi penyediaan konsumsi dan akomodasi

05 Pengurusan Kendaraan Dinas

05.00 Pengurusan surat-surat kendaraan dinas

Naskah terkait pengurusan surat-surat kendaraan dinas

05.01 Pemeliharaan dan perbaikan

Naskah terkait pemeliharaan dan perbaikan

05.02 Pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan

Naskah terkait pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan

XLIV. HM. HUBUNGAN MASYARAKAT

00 Keprotokolan

00.00 Penyelenggaraan Acara Kedinasan

Naskah terkait Upacara, Pelantikan, Peresmian, dan Jamuan Termasuk Acara Peringatan Hari-Hari Besar

00.01 Buku Tamu

Naskah terkait Buku Tamu

00.02 Agenda Kegiatan Pimpinan

Naskah terkait Agenda Kegiatan Pimpinan Arsip Nasional Republik Indonesia

00.03 Kunjungan Dinas

Naskah terkait Kunjungan Dinas Dalam dan Luar Negeri; Kunjungan Dinas Eselon I/II; Kunjungan Dinas Pejabat Lain/Pegawai

00.04 Daftar Nama/Alamat Kantor/Pejabat

Naskah Terkait Daftar Nama/Alamat Kantor/Pejabat

01 Dokumentasi/Liputan Kegiatan Dinas Pimpinan, Acara Kedinasan, dan Peristiwa-Peristiwa bidang masing-masing, dalam berbagai Media: Kertas/Foto/Video/Rekaman Suara/Multimedia

01.00 Eselon I

Naskah terkait Eselon I

01.01 Pejabat Lain/Pegawai

Naskah terkait Pejabat Lain/Pegawai

02 Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Informasi Kelembagaan

02.00 Kliping Koran

Naskah terkait Kliping Koran

02.01 Brosur/Leaflet/Poster/Plakat

Naskah terkait Brosur/Leaflet/Poster/Plakat

02.02 Pengumuman/Pemberitaan

Naskah terkait Pengumuman/Pemberitaan

03 Hubungan Antar Lembaga Negara dan Badan Pemerintahan/Instansi

03.00 Hubungan Antar Badan Pemerintah

Naskah terkait Hubungan Antar Badan Pemerintah

03.01 Hubungan dengan Organisasi Sosial/LSM

Naskah terkait Hubungan dengan Organisasi Sosial/LSM

03.02 Hubungan dengan Perusahaan

Naskah terkait Hubungan dengan Perusahaan

03.03 Hubungan dengan Perguruan Tinggi/Sekolah

Naskah terkait Hubungan dengan Perguruan Tinggi/Sekolah

03.04 Hubungan dengan Perguruan Tinggi/Sekolah mengenai Magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/Praktek Kerja Lapangan (PKL)

Naskah terkait Hubungan dengan Perguruan Tinggi/Sekolah mengenai Magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/Praktek Kerja Lapangan (PKL)

03.05 Forum Kehumasan (Misal Bakohumas/Perhumas)

Naskah terkait Forum Kehumasan (Misal Bakohumas/Perhumas)

03.06 Hubungan dengan Media Massa

Naskah terkait Siaran Pers/Konferensi Pers/Press Release/Wawancara; Kunjungan Wartawan/Peliputan

04 Dokumen Persidangan dan Rapat

04.00 Bahan Rapim

Naskah terkait Bahan Rapim

- 04.01 RDP DPRD
Naskah terkait RDP DPRD
- 04.02 Rakor Tingkat Perangkat Daerah termasuk Hasil Rumusan dan Transkrip
Naskah terkait Rakor Tingkat Perangkat Daerah Termasuk Hasil Rumusan dan Transkrip
- 04.03 Bahan Rapat Terbatas
Naskah terkait Bahan Rapat Terbatas
- 04.04 Bahan Pidato Pimpinan
Naskah terkait Bahan Pidato Pimpinan

- 05 Penerbitan Majalah, Buletin, Koran dan Jurnal
Naskah terkait Penerbitan Majalah, Buletin, Koran dan Jurnal

- 06 Publikasi melalui Media Cetak maupun Elektronik
Naskah terkait Publikasi melalui Media Cetak maupun Elektronik

- 07 Pameran/Sayembara/Lomba/Festival/Pembuatan Spanduk dan Iklan
Naskah terkait Pameran/Sayembara/Lomba/Festival/Pembuatan Spanduk dan Iklan

- 08 Penghargaan/Tanda Kenang-Kenangan Administrasi Pemberian Penghargaan/Tanda Kenang-Kenangan kepada Masyarakat yang memiliki Jasa Prestasi Besar
Naskah terkait Penghargaan/Tanda Kenang-Kenangan Administrasi Pemberian Penghargaan/Tanda Kenang-Kenangan kepada Masyarakat yang memiliki Jasa Prestasi Besar

- 09 Ucapan Terima Kasih, Ucapan Selamat, Belasungkawa, Permohonan Maaf
Naskah terkait Ucapan Terima Kasih, Ucapan Selamat, Belasungkawa, Permohonan Maaf

- 10 Layanan Kehumasan
 - 10.00 Layanan Diorama
Naskah terkait Layanan Diorama
 - 10.01 Layanan Mobile
Naskah terkait Layanan Mobile
 - 10.02 Layanan Informasi Publik
Naskah terkait Layanan Informasi Publik
 - 10.03 Layanan Website
Naskah terkait Layanan Website

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES RASYID BASWEDAN